SEKOLAH NEGARAWAN

RANJAU-RANJAU SEPANJANG JALAN

Jalan Sunyi Menemukan Seribu Penjaga Bangsa

Manifesto Perjuangan Spiritual, Kultural, dan Ketatanegaraan Indonesia



Prayogi R. Saputra, S.IP., M.M., Ph.D
Rinto Setiyawan, A.Md.T., S.H., CTP
Sayyid Abdullah Assegaf, S.Sos., M.Hub.Int.

SEKOLAH
NEGARAWAN
X
SHIKSHAYATI RAJANITIVIDAM

DAFTAR ISI

PROLOG v

BAGIAN I – MEDAN PERANG BANGSA 1
Bab 1. Indonesia yang Merasa Merdeka, Tetapi Sedang Dikepung 2
A. Kemerdekaan Formal vs Penjajahan Modern 2
B. Penjajahan Tanpa Invasi 8
C. Bangsa yang Tidak Sadar Sedang Dijajah 16
Bab 2. Dari Meriam ke Algoritma, Evolusi Penjajahan Modern 24
A. Kolonialisme Klasik 24
B. Neo-Kolonialisme 30
C. Perang Asimetris, Perang Non-Konvensional, dan Penguasaan Tanpa Pendudukan 37
Bab 3. Ranjau Ranjau Sepanjang Jalan, Delapan Belas Jenis Perang Melawan Bangsa 39
A. Serangan terhadap Pikiran, Budaya, dan Jiwa 39
1. Perang Media dan Disinformasi 40
2. Perang Budaya 42
3. Perang Narkoba 44
4. Perang Teknologi 45
5. Perang Psikologi 47
6. Perang Spiritual / Teologis 48
B. Serangan terhadap Kedaulatan Sistem 50
1. Perang Ekonomi 51

2. Perang Jaringan....52
3. Perang Hukum Internasional....54
4. Perang Regulasi....56
5. Perang Data....57
6. Perang Elite Capture....58
C. Serangan terhadap Keberlangsungan Bangsa....60
1. Perang Lingkungan....61
2. Perang Pendidikan....62
3. Perang Pangan....64
4. Perang Kesehatan....65
5. Perang Demografi....67
6. Perang Identitas....68

BAGIAN II – EMPAT PILAR YANG DISERANG ...70
Bab 4. Ketika Otak Bangsa Dijajah, Serangan terhadap Kecerdasan Nasional (Intelektual) ..71
Bab 5. Ketika Hati Bangsa Dibius, Serangan terhadap Spiritualitas (Rohaniawan) 80
Bab 6. Ketika Jiwa Budaya Dilumpuhkan: Serangan terhadap Etika, Seni, dan Peradaban (Budayawan)....88
Bab 7. Ketika Tulang Bangsa Dilemahkan: Serangan terhadap Jiwa Militer, Disiplin, dan Ketegasan (TNI/Polri) 98

BAGIAN III — MENGAPA RAKYAT LUMPUH ...106
Bab 8. Delapan Tahap Pelumpuhan Bangsa....107
Bab 9. Mengapa Tidak Banyak yang Bertahan?....117
Bab 10. Seribu dari Tiga Ratus Juta (Minoritas yang Menjaga Bangsa) 124

BAGIAN IV – JALAN SUNYI 137
Bab 11. Akhirnya Kutempuh Jalan yang Sunyi 138
Bab 12. Mendengarkan Lagu Bisu 147
Bab 13. Mengetuk Pintu Rumah Bangsa 155
Bab 14. Para Kekasih Rahasia Allah 163

BAGIAN V - PENGORBANAN 172
Bab 15. Mungkin Engkau Memerlukan Darahku ... 173
Bab 16. Mungkin Engkau Butuh Kematianku 181
Bab 17. Akan Kumintakan Izin kepada Allah 189

BAGIAN VI – JALAN SEKOLAH NEGARAWAN 198
Bab 18. Negara Salah Desain 199
Bab 19. Mengembalikan Kedaulatan Rakyat 209
Bab 20. Empat Kaum Penjaga Bangsa 218
Bab 21. Teknologi Menjaga Amanah 227
Bab 22. Suluk Negarawan 238

BAGIAN VII – INDONESIA BARU 251
Bab 23. Dari Bangsa Lumpuh Menjadi Bangsa Berdaulat 252
Bab 24. Gemah Ripah Loh Jinawi 264
EPILOG 276

PROLOG

Kami Berlindung Pada-Mu, Tuhan

"Ranjau-ranjau sepanjang jalan
Beribu panah berhamburan
Letusan ledakan berurutan
Kami berlindung pada-Mu, Tuhan…"

Syair dari Cak Nun tersebut bukan sekadar lagu. Syair itu adalah cermin zaman. Syair itu menggambarkan sebuah keadaan ketika perjalanan hidup tidak lagi lapang, ketika setiap langkah dipenuhi jebakan, ketika ancaman datang dari berbagai arah, dan ketika manusia menyadari bahwa kekuatan dirinya saja tidak cukup untuk bertahan. Jika dahulu syair tersebut mungkin terdengar sebagai puisi spiritual, hari ini syair tersebut terasa seperti potret nyata perjalanan bangsa Indonesia.

Indonesia secara formal adalah negara merdeka. Bendera berkibar di seluruh penjuru negeri. Lagu kebangsaan dinyanyikan. Pemilu dilaksanakan. Pemerintahan berjalan. Lembaga-lembaga negara berdiri megah. Namun pertanyaan yang jujur harus diajukan. Apakah kemerdekaan formal identik dengan kemerdekaan yang sejati? Apakah sebuah bangsa benar-benar merdeka apabila akalnya dibentuk oleh propaganda, budayanya digeser oleh infiltrasi nilai asing, ekonominya bergantung pada kekuatan luar, regulasinya dikendalikan kepentingan elite, moralnya

dilemahkan, spiritualitasnya dimanipulasi, dan keberaniannya dilumpuhkan oleh rasa takut?

Penjajahan modern tidak selalu datang bersama tentara yang mendarat di pantai, meriam yang diarahkan ke kota, atau bendera asing yang ditancapkan di tanah air. Penjajahan modern jauh lebih canggih. Penjajahan modern masuk melalui berita, layar, algoritma, pasar, budaya populer, hutang, pendidikan, hukum, bahkan melalui tafsir keagamaan yang salah arah. Penjajahan modern tidak selalu merebut wilayah, tetapi merebut kesadaran. Penjajahan modern tidak selalu menghancurkan bangunan, tetapi menghancurkan daya pikir. Penjajahan modern tidak selalu menaklukkan tubuh, tetapi menundukkan jiwa.

Bangsa yang dijajah dengan cara seperti ini justru sering tidak merasa sedang dijajah. Inilah bentuk penaklukan paling sempurna, yaitu ketika korban merasa dirinya bebas, padahal pikirannya telah diarahkan, perilakunya telah dibentuk, dan reaksinya telah diprediksi. Dalam keadaan seperti itu, perjuangan bangsa tidak dapat dibaca hanya sebagai pertarungan perebutan kekuasaan biasa. Jika akar masalahnya adalah kerusakan sistem, mengganti orang tanpa mengganti sistem hanya akan melahirkan wajah baru dari persoalan lama. Jika masalah telah menyentuh akal, hati, budaya, dan jiwa, perjuangan perebutan kekuasaan saja jelas tidak cukup.

Inilah sebabnya perjuangan bangsa memerlukan dua jalur yang berjalan bersamaan.

Jalur pertama adalah ikhtiar rasional dan sistemik. Bangsa ini membutuhkan keberanian untuk

mengkaji ulang desain ketatanegaraan, menata kembali struktur kekuasaan, memulihkan kedaulatan rakyat, memperbaiki regulasi, membangun sistem pengawasan yang transparan, dan menciptakan instrumen teknologi yang mampu meminimalkan kelemahan manusia. Tanpa sistem yang sehat, manusia baik sekalipun dapat terseret menjadi bagian dari kerusakan.

Namun jalur kedua sama pentingnya, yaitu ikhtiar spiritual. Sejarah manusia membuktikan bahwa sistem terbaik sekalipun dapat runtuh ketika manusia di dalamnya kehilangan amanah. Kecerdasan tanpa moral dapat berubah menjadi alat manipulasi. Kekuatan tanpa iman dapat berubah menjadi penindasan. Bahkan perjuangan yang tampak benar sekalipun dapat menyimpang ketika ego mengambil alih. Karena itulah bangsa ini tidak cukup hanya dengan strategi, teori, hukum, teknologi, dan organisasi. Bangsa ini juga membutuhkan kejernihan hati, kelurusan niat, doa, munajat, dan pertolongan dari Allah SWT.

Dalam keyakinan penulis, perubahan besar selalu lahir dari perpaduan antara ikhtiar maksimal manusia dan kehendak Tuhan. Para nabi tidak pernah hanya berdoa tanpa bertindak. Para nabi juga tidak pernah hanya bertindak tanpa bersandar kepada Allah. Pada titik itulah perjuangan bangsa menemukan maknanya, yaitu membangun sistem terbaik yang mampu dirancang manusia sambil menyadari bahwa keberhasilan sejatinya tetap berada dalam izin-Nya.

Buku ini lahir dari kegelisahan tersebut. Buku ini lahir dari kesadaran bahwa bangsa ini sedang berjalan di jalan yang penuh ranjau. Buku ini lahir dari

keyakinan bahwa ancaman terhadap Indonesia tidak hanya berbentuk fisik, tetapi juga berbentuk perang multidimensi yang menyerang akal, spiritualitas, budaya, dan jiwa pertahanan bangsa. Buku ini lahir dari keprihatinan bahwa tidak banyak manusia yang mampu tetap jernih di tengah berbagai jebakan zaman.

Namun kegelisahan buku ini tidak berhenti pada keadaan bangsa. Buku ini juga lahir dari perenungan tentang nasib manusia-manusia yang memilih tetap menjaga bangsa ketika zaman bergerak ke arah yang berbeda. Sebab sejarah menunjukkan bahwa ketika sebuah bangsa menghadapi tekanan dari berbagai arah, tidak semua manusia mampu bertahan. Sebagian menyerah pada kenyamanan. Sebagian larut dalam arus zaman. Sebagian kehilangan keberanian. Sebagian kehilangan harapan. Sebagian memilih diam karena merasa perjuangan tidak lagi memiliki arti.

Pada titik inilah syair lagu Jalan Sunyi dari Cak Nun yang juga menjadi ruh buku ini menemukan maknanya.

"Akhirnya kutempuh jalan yang sunyi
Mendendangkan lagu bisu
Sendiri di lubuk hati
Puisi yang kusembunyikan dari kata-kata
Cinta yang takkan kutemukan bentuknya..."

Syair tersebut menggambarkan perjalanan batin manusia yang memilih tetap berjalan meskipun tidak selalu dipahami oleh zamannya. Syair tersebut berbicara tentang kesadaran yang sering kali lahir lebih dahulu daripada kesadaran kolektif. Syair tersebut berbicara tentang suara yang belum tentu didengar,

tentang pintu-pintu yang terus diketuk meskipun belum tentu terbuka, dan tentang cinta kepada bangsa yang tidak selalu menemukan bentuknya dalam pengakuan manusia.

Jalan sunyi bukan sekadar kesendirian. Jalan sunyi adalah konsekuensi yang sering harus diterima oleh mereka yang memilih menjaga kesadaran ketika mayoritas masih tertidur. Jalan sunyi adalah jalan para penjaga yang tetap berbicara meskipun tidak selalu didengar, tetap mengingatkan meskipun sering dianggap berlebihan, dan tetap menyalakan harapan ketika banyak orang mulai kehilangan keyakinan.

Karena itu perjuangan yang dibahas dalam buku ini tidak berhenti pada pembacaan tentang ancaman. Perjuangan ini juga menyentuh wilayah pengorbanan. Sebab menjaga bangsa selalu menuntut harga. Ada yang harus mengorbankan kenyamanan. Ada yang harus mengorbankan reputasi. Ada yang harus mengorbankan relasi sosial. Dan dalam sejarah, selalu ada manusia-manusia yang rela mempertaruhkan seluruh hidup demi sesuatu yang lebih besar daripada dirinya sendiri.

"Mungkin engkau memerlukan darahku untuk melepas dahagamu

Mungkin engkau butuh kematianku untuk menegakkan hidupmu

Ambilah, ambilah, akan kumintakan izin kepada Allah yang memiliki-Nya..."

Syair tersebut tidak berbicara tentang kematian dalam makna yang sempit. Syair tersebut berbicara tentang keberanian melepaskan kepentingan diri demi

amanah yang lebih besar. Syair tersebut berbicara tentang kesediaan membayar harga perjuangan. Syair tersebut berbicara tentang penghambaan yang menempatkan Allah di atas seluruh ambisi manusia. Dan syair tersebut tidak berakhir pada pengorbanan. Syair tersebut berakhir pada tauhid.

Sebab perjuangan sebesar apa pun pada akhirnya tidak boleh berpusat pada ego manusia. Perjuangan harus kembali kepada Allah sebagai sumber kekuatan, sumber harapan, dan sumber pertolongan. Karena itulah jalan sunyi yang dibahas dalam buku ini bukan jalan keputusasaan, melainkan jalan penghambaan. Sebuah perjalanan yang menggabungkan ikhtiar maksimal manusia dengan penyerahan total kepada Tuhan.

Dengan demikian, jika syair Ranjau-Ranjau Sepanjang Jalan menggambarkan medan yang harus dilalui bangsa ini, maka syair Jalan Sunyi menggambarkan perjalanan manusia yang memilih tetap berjalan di atas medan tersebut. Buku ini bukan sekadar kritik terhadap keadaan. Buku ini adalah upaya membaca anatomi penaklukan bangsa, memahami bagaimana rakyat dapat dilumpuhkan secara sistematis, menjelaskan mengapa hanya sedikit manusia yang mampu bertahan, dan menawarkan jalan kebangkitan melalui perubahan struktur, kesadaran, budaya, spiritualitas, dan kepemimpinan.

Buku ini juga merupakan ikhtiar untuk menjawab pertanyaan besar yang sering terlupakan. Jika bangsa ini terus-menerus diserang melalui berbagai bentuk perang yang tidak terlihat, siapakah yang akan

tetap berdiri menjaga bangsa? Jika mayoritas manusia jatuh pada satu atau beberapa jebakan zaman, siapakah yang akan tetap menjaga akal sehat, moralitas, identitas budaya, dan keberanian bangsa? Pertanyaan-pertanyaan itulah yang melahirkan perjalanan panjang dalam halaman-halaman berikutnya.

Karena penulis percaya bahwa meskipun ranjau dipasang di sepanjang jalan, meskipun panah berhamburan dari segala arah, dan meskipun ledakan datang bertubi-tubi, bangsa ini belum selesai.

Selama masih ada manusia yang menjaga akalnya. Selama masih ada manusia yang menjaga hatinya. Selama masih ada manusia yang menjaga budayanya. Selama masih ada manusia yang menjaga keberaniannya. Selama masih ada manusia yang bersedia menempuh jalan sunyi.

Dan selama bangsa ini masih percaya kepada pertolongan Allah. Maka harapan itu tetap hidup. Kami berlindung pada-Mu, Tuhan.

SHIKSHAYATI RAJANITIVIDAM

BAGIAN I – MEDAN PERANG BANGSA

BAB 1
Indonesia yang Merasa Merdeka, Tetapi Sedang Dikepung

A. Kemerdekaan Formal vs Penjajahan Modern

Kemerdekaan adalah kata yang sangat agung. Kemerdekaan bukan sekadar status hukum, bukan hanya deklarasi, dan bukan pula sekadar simbol yang diperingati setiap tahun melalui upacara bendera. Kemerdekaan, dalam makna terdalamnya, adalah keadaan ketika sebuah bangsa benar-benar memiliki kemampuan untuk menentukan nasibnya sendiri, mengelola sumber dayanya sendiri, membangun sistem nilainya sendiri, menjaga identitas budayanya sendiri, serta memastikan bahwa seluruh keputusan besar yang menentukan masa depan bangsa benar-benar lahir dari kehendak rakyatnya sendiri, bukan dari tekanan, manipulasi, atau pengaruh kekuatan lain.

Secara formal, Indonesia telah merdeka sejak 17 Agustus 1945. Proklamasi kemerdekaan adalah peristiwa monumental yang menandai berakhirnya era penjajahan klasik oleh kekuatan asing yang datang dengan senjata, kapal perang, kekerasan fisik, dan pendudukan wilayah. Sejak saat itu, Indonesia diakui sebagai sebuah negara berdaulat, memiliki pemerintahan sendiri, konstitusi sendiri, wilayah sendiri, dan identitas nasional sendiri. Dalam pengertian hukum internasional, status kemerdekaan itu sah. Dunia mengenal Indonesia sebagai negara merdeka. Bendera Merah Putih berkibar. Lagu

Indonesia Raya dikumandangkan. Pemerintahan berjalan. Pemilu dilaksanakan. Seluruh atribut kenegaraan tampak lengkap.

Namun sejarah selalu mengajarkan bahwa bentuk luar tidak selalu mencerminkan kenyataan di dalam. Sebuah bangsa dapat tampak merdeka secara simbolik, tetapi tetap hidup dalam ketergantungan. Sebuah negara dapat memiliki pemerintahan sendiri, tetapi kebijakan negara tersebut dikendalikan oleh tekanan eksternal. Sebuah rakyat dapat diberi hak memilih, tetapi pilihan rakyat telah dibentuk oleh sistem yang tidak dikuasai rakyat sendiri. Di titik inilah kita harus membedakan antara kemerdekaan formal dan kemerdekaan substantif.



Kemerdekaan formal adalah kemerdekaan yang diakui di atas kertas. Kemerdekaan formal dapat dilihat melalui keberadaan negara, pemerintahan, lembaga, hukum, dan simbol-simbol kebangsaan. Namun kemerdekaan substantif adalah kemerdekaan yang

benar-benar hidup dalam praktik. Kemerdekaan substantif tercermin dari kemandirian berpikir, keberanian, kedaulatan ekonomi, kebebasan budaya, kekuatan moral, dan kemampuan rakyat untuk mengendalikan arah bangsanya sendiri. Pertanyaan mendasarnya sederhana namun sangat penting, yaitu apakah Indonesia hari ini hanya merdeka secara formal, atau benar-benar merdeka secara substantif?

Pertanyaan ini tidak dimaksudkan untuk menafikan jasa para pendiri bangsa. Pertanyaan ini pula tidak dimaksudkan untuk mengecilkan arti Proklamasi 17 Agustus 1945. Justru sebaliknya. Pertanyaan ini lahir karena penghormatan yang tinggi terhadap cita-cita kemerdekaan itu sendiri. Sebab jika kemerdekaan adalah cita-cita luhur, maka bangsa ini wajib jujur untuk menilai apakah cita-cita itu telah benar-benar tercapai, atau justru mengalami distorsi dalam perjalanan sejarah.

Jika penjajahan hanya dipahami sebagai pendudukan fisik oleh tentara asing, maka mudah untuk mengatakan bahwa Indonesia sudah lama merdeka. Namun jika penjajahan dipahami sebagai keadaan ketika suatu bangsa kehilangan kendali atas dirinya sendiri, maka persoalan kemerdekaan menjadi jauh lebih kompleks. Penjajahan modern tidak selalu hadir dalam bentuk yang kasar. Penjajahan modern justru sering kali hadir dalam bentuk yang halus, legal, terstruktur, dan bahkan tampak normal.

Dunia modern telah mengubah cara kekuasaan bekerja. Jika dahulu bangsa ditaklukkan dengan meriam, kini bangsa dapat ditaklukkan dengan

pinjaman. Jika dahulu wilayah direbut dengan perang terbuka, kini kebijakan suatu negara dapat diarahkan melalui tekanan ekonomi. Jika dahulu rakyat dipaksa tunduk melalui kekerasan, kini kesadaran rakyat dapat dibentuk melalui media, algoritma, budaya populer, pendidikan, dan manipulasi informasi. Bentuk penjajahan berubah, tetapi esensi penjajahan tetap sama yakni penguasaan.

Inilah yang oleh banyak pemikir disebut sebagai neo-kolonialisme, yaitu bentuk baru kolonialisme yang tidak lagi membutuhkan pendudukan fisik. Penjajahan tidak lagi harus datang dari luar dalam bentuk pasukan bersenjata. Penjajahan dapat berlangsung melalui kontrak, utang, investasi, regulasi, perdagangan, propaganda, dan infiltrasi budaya. Bangsa yang dijajah tidak selalu sadar bahwa dirinya sedang dijajah, karena seluruh mekanisme penjajahan dibungkus dengan bahasa kemajuan, modernisasi, pembangunan, demokrasi, globalisasi, atau kerja sama internasional.

Dalam konteks Indonesia, gejala seperti ini patut dibaca secara kritis. Sebuah bangsa yang kaya sumber daya alam, memiliki jumlah penduduk besar, posisi geografis strategis, warisan budaya yang kuat, dan sejarah panjang peradaban, semestinya memiliki tingkat kemandirian yang tinggi. Namun kenyataan menunjukkan bahwa ketergantungan masih menjadi persoalan besar. Ketergantungan ekonomi, ketergantungan teknologi, ketergantungan pangan, ketergantungan investasi, bahkan dalam beberapa aspek, ketergantungan arah pembangunan.

Lebih dari itu, ancaman terbesar justru mungkin tidak datang dari ketergantungan material, melainkan dari ketergantungan mental. Bangsa yang kehilangan keberanian berpikir mandiri jauh lebih mudah dikendalikan daripada bangsa yang miskin tetapi sadar. Bangsa yang kehilangan kepercayaan diri terhadap budayanya jauh lebih mudah diserap ke dalam arus global dibandingkan bangsa yang tetap menjaga identitasnya. Bangsa yang rakyatnya lebih percaya pada narasi yang dibentuk oleh sistem daripada pada nurani dan akal sendiri akan sulit membedakan mana kebijakan untuk kepentingan rakyat dan mana kebijakan yang justru menjauhkan rakyat dari kedaulatannya.

Di titik inilah konsep penjajahan modern menjadi sangat relevan. Karena penjajahan modern tidak selalu memerlukan kekuatan fisik. Penjajahan modern memerlukan kontrol terhadap kesadaran. Penjajahan modern bekerja dengan membuat sesuatu yang tidak sehat terasa normal. Penjajahan modern membuat rakyat terbiasa dengan ketidakadilan. Penjajahan modern membuat sistem yang menekan terlihat sebagai sesuatu yang wajar. Penjajahan modern membentuk generasi yang lebih sibuk menyesuaikan diri dengan sistem daripada mempertanyakan sistem itu sendiri.

Sebuah bangsa yang benar-benar merdeka seharusnya mampu mendidik rakyatnya menjadi manusia yang berpikir bebas, kritis, bermoral, dan berani. Namun jika pendidikan justru lebih banyak diarahkan untuk mencetak operator pasar daripada pembentuk peradaban, maka patut dipertanyakan ke

mana arah kemerdekaan itu berjalan. Sebuah bangsa yang benar-benar berdaulat seharusnya memiliki kemampuan untuk melindungi rakyatnya dari dominasi ekonomi eksternal. Namun jika kebijakan ekonomi terus-menerus bergantung pada struktur global yang tidak sepenuhnya dikendalikan bangsa sendiri, maka pertanyaan tentang kedaulatan menjadi sah untuk diajukan.

Kemerdekaan yang sejati juga tidak hanya diukur dari kemampuan memilih pemimpin. Sebab pemilu bukanlah otomatis bukti kedaulatan rakyat. Jika pilihan rakyat dibentuk oleh propaganda, jika jalur pencalonan dikendalikan oligarki, jika partisipasi pejabat hanya formalitas tanpa kontrol substantif, maka demokrasi dapat berubah menjadi ilusi partisipasi. Rakyat diberi hak memilih, tetapi rakyat tidak benar-benar memiliki kendali atas desain sistem yang menentukan hidup rakyat sendiri.

Inilah ironi zaman modern. Penjajahan paling efektif justru bukan penjajahan yang menindas secara terang-terangan, melainkan penjajahan yang membuat korban merasa dirinya bebas. Dalam kondisi seperti itu, bangsa yang sedang dikuasai justru dapat membela sistem yang menguasai bangsa tersebut. Mereka dapat memusuhi siapa pun yang mencoba membangunkan kesadaran mereka. Mereka dapat melihat kritik sebagai ancaman, bukan sebagai upaya penyelamatan.

Karena itu, persoalan Indonesia hari ini tidak cukup dibaca dalam kategori sederhana seperti pemerintahan baik atau buruk, pemimpin kuat atau lemah, ekonomi naik atau turun. Persoalan

kemerdekaan Indonesia jauh lebih mendasar yaitu apakah bangsa ini benar-benar memiliki kedaulatan substantif, atau hanya hidup dalam struktur kemerdekaan formal yang dibungkus sedemikian rupa sehingga tampak seperti kebebasan?

Jika sebuah bangsa masih bisa diarahkan melalui tekanan ekonomi, dipengaruhi melalui perang informasi, digeser budayanya melalui infiltrasi nilai asing, dibentuk pola pikirnya melalui sistem pendidikan yang tidak membebaskan, dan dibatasi keberaniannya melalui sistem yang membuat rakyat takut untuk melawan ketidakadilan, maka perdebatan tentang kemerdekaan tidak bisa berhenti pada simbol.

Karena kemerdekaan bukan sekadar bendera melainkan kesadaran, keberanian, dan kemampuan menentukan nasib sendiri. Dan jika kemerdekaan itu belum sepenuhnya dimiliki, maka bangsa ini mungkin memang telah merdeka secara formal tetapi belum sepenuhnya bebas secara substantif. Inilah titik awal pembacaan kita yaitu bahwa Indonesia mungkin tidak sedang menghadapi penjajahan dalam bentuk lama, tetapi Indonesia sangat mungkin sedang dikepung oleh bentuk penjajahan yang jauh lebih canggih, jauh lebih halus, dan jauh lebih berbahaya karena penjajahan jenis ini bekerja bukan dengan merampas wilayah terlebih dahulu melainkan dengan merebut kesadaran bangsa itu sendiri.

B. Penjajahan Tanpa Invasi

Jika pada masa lalu penjajahan identik dengan kapal perang yang merapat di pelabuhan, tentara yang

mendarat di pesisir, benteng yang direbut, dan wilayah yang diduduki secara paksa, maka dunia modern telah mengubah wajah penjajahan menjadi jauh lebih halus, lebih canggih, dan sering kali jauh lebih efektif. Bangsa-bangsa tidak lagi harus ditaklukkan dengan kekuatan militer secara langsung. Tidak perlu lagi mengirim armada perang dalam jumlah besar. Tidak perlu menumpahkan darah di jalan-jalan utama kota. Bahkan dalam banyak kasus, penjajah modern tidak perlu menduduki wilayah sedikit pun. Sebab jika sebuah bangsa sudah dapat diarahkan, dikendalikan, dan dilemahkan dari dalam, maka invasi fisik justru menjadi tidak efisien.



Penjajahan modern bekerja dengan prinsip yang sederhana namun sangat berbahaya, yaitu menguasai tanpa terlihat menguasai. Penjajahan modern tidak selalu tampil sebagai ancaman, tetapi sering hadir sebagai kerja sama. Penjajahan modern tidak selalu datang sebagai pemaksaan, tetapi sering dibungkus sebagai bantuan. Penjajahan modern tidak selalu muncul sebagai tekanan terbuka, tetapi dapat hadir

sebagai sistem yang perlahan membentuk ketergantungan. Di sinilah penjajahan tanpa invasi menemukan bentuknya yang paling efektif.

Bangsa yang dijajah secara klasik tahu bahwa dirinya sedang dijajah. Bangsa tersebut melihat seragam asing, mendengar bahasa penjajah, menyaksikan simbol kekuasaan asing berdiri di tanah mereka. Tetapi bangsa yang dijajah secara modern sering tidak memiliki pengalaman visual seperti itu. Bangsa yang dijajah secara modern tetap menyanyikan lagu kebangsaan, tetap memiliki presiden, tetap memiliki parlemen, tetap memiliki institusi negara. Secara lahiriah semuanya tampak normal. Namun substansi pengendalian dapat tetap berjalan.

Dalam model penjajahan seperti ini, yang direbut bukan sekadar wilayah, melainkan pusat-pusat pengaruh strategis. Yang dikendalikan bukan hanya tanah, tetapi arah berpikir. Yang dikejar bukan hanya sumber daya alam, tetapi juga perilaku masyarakat. Penjajahan tidak lagi selalu bergerak secara horizontal dari luar ke dalam, tetapi justru sering tumbuh vertikal dari dalam struktur bangsa itu sendiri.

Salah satu bentuk paling nyata adalah penjajahan informasi. Di era digital, informasi bukan sekadar alat komunikasi, tetapi alat kekuasaan. Siapa yang menguasai arus informasi memiliki kemampuan untuk membentuk persepsi publik, menentukan apa yang dianggap penting, mengarahkan emosi masyarakat, bahkan membentuk reaksi kolektif. Dalam situasi seperti ini, bangsa tidak perlu ditembak untuk menjadi lemah, namun sebuah bangsa cukup dibanjiri informasi

yang membuatnya bingung, terpecah, marah, takut, atau kehilangan kemampuan berpikir jernih.

Berita palsu, propaganda, manipulasi opini, framing media, algoritma digital, buzzer penguasa, dan perang narasi adalah bentuk-bentuk baru medan tempur modern. Ketika masyarakat tidak lagi mampu membedakan fakta dari rekayasa, kebenaran dari manipulasi, maka kemampuan masyarakat untuk membuat keputusan rasional ikut runtuh. Sebuah bangsa yang tidak lagi mampu mempercayai realitas yang objektif akan mudah digiring ke arah mana pun.

Selain informasi, penjajahan ekonomi juga menjadi instrumen yang sangat efektif. Dalam penjajahan klasik, sumber daya diambil secara paksa. Dalam penjajahan modern, penguasaan ekonomi dapat berlangsung melalui mekanisme yang tampak legal dan normal. Ketergantungan pada utang, dominasi investasi asing pada sektor strategis, ketidakmampuan membangun industri mandiri, ketergantungan impor pangan, ketidakstabilan energi, dan dominasi pasar global terhadap kebijakan nasional merupakan bentuk-bentuk tekanan yang jauh lebih halus, tetapi dampaknya sangat nyata.

Bangsa yang ekonominya rapuh lebih mudah dikendalikan. Pemerintah yang terikat pada tekanan finansial akan sulit mengambil keputusan secara sepenuhnya independen. Rakyat yang hidup dalam tekanan ekonomi kronis juga lebih mudah diarahkan, karena energi rakyat habis untuk bertahan hidup. Dalam kondisi seperti itu, kesadaran rakyat sering melemah bukan karena rakyat tidak peduli, tetapi

karena ruang berpikir rakyat dikuasai oleh kecemasan ekonomi.

Bentuk lain yang sangat penting adalah penjajahan budaya. Penjajahan budaya mungkin merupakan salah satu medan tempur yang paling sering diremehkan, padahal pengaruh penjajahan budaya sangat dalam. Budaya membentuk selera, kebiasaan, identitas, cara berpikir, bahkan standar tentang apa yang dianggap baik, indah, keren, sukses, atau normal. Jika sebuah bangsa kehilangan kemampuan untuk menjaga filter budayanya, maka infiltrasi nilai akan berlangsung tanpa terasa.

Penjajahan budaya tidak selalu berarti budaya asing itu buruk. Dunia modern memang penuh interaksi lintas budaya, dan pertukaran budaya adalah hal alami. Namun masalah muncul ketika bangsa kehilangan kemampuan menyaring, lalu menjadikan standar luar sebagai ukuran mutlak, sambil memandang budaya sendiri sebagai sesuatu yang kuno, rendah, atau tidak relevan. Saat itulah identitas bangsa perlahan terkikis.

Budaya populer, media hiburan, gaya hidup konsumtif, budaya viral, standar kecantikan global, glorifikasi materialisme, hingga kebiasaan digital yang membentuk generasi baru, semuanya dapat menjadi bagian dari proses kolonisasi budaya. Bangsa yang kehilangan budayanya kehilangan fondasi etisnya. Dan bangsa yang kehilangan fondasi etisnya lebih mudah dibentuk sesuai kepentingan luar.

Penjajahan teknologi juga merupakan wajah baru yang sangat menentukan. Di era modern, teknologi

bukan sekadar alat bantu, tetapi infrastruktur kekuasaan. Data, platform digital, kecerdasan buatan, komunikasi, sistem keamanan, transaksi keuangan, hingga pola konsumsi masyarakat kini banyak bergantung pada sistem teknologi yang sering kali berada di luar kendali bangsa sendiri. Ketika ketergantungan teknologi menjadi terlalu besar, kedaulatan suatu bangsa menjadi rapuh.

Siapa yang menguasai teknologi, pada akhirnya menguasai perilaku. Algoritma menentukan apa yang dilihat masyarakat. Platform digital menentukan apa yang viral. Sistem digital menentukan bagaimana informasi bergerak. Bahkan preferensi manusia dapat dipelajari, diprediksi, dan diarahkan. Penjajahan model ini sangat halus karena manusia sering merasa sedang memilih secara bebas, padahal banyak pilihan manusia telah dipengaruhi oleh arsitektur digital yang tidak disadari manusia itu sendiri.

Selain itu, ada penjajahan regulasi. Penjajahan regulasi adalah bentuk yang sangat canggih karena menggunakan hukum sebagai instrumen pengendalian. Dalam kondisi ideal, hukum adalah alat keadilan. Tetapi dalam struktur yang rusak, hukum dapat berubah menjadi alat legitimasi ketimpangan. Regulasi dapat dirancang untuk menguntungkan segelintir pihak. Mekanisme kekuasaan dapat dibuat sedemikian rupa sehingga akses rakyat terhadap perubahan menjadi sangat terbatas. Sistem hukum dapat dibuat rumit sehingga hanya elite tertentu yang mampu bermain di dalam sistem hukum tersebut.

Inilah bentuk penjajahan yang paling berbahaya, yaitu ketika penindasan menjadi legal. Ketika rakyat yang dirugikan justru dianggap melawan hukum jika mencoba melawan. Ketika aturan yang semestinya melindungi justru menjadi instrumen pembatasan.

Tidak kalah penting adalah penjajahan spiritual dan psikologis. Sebuah bangsa dapat dilemahkan bukan hanya melalui tekanan material, tetapi juga melalui kondisi mental. Rasa takut yang terus menerus, kelelahan sosial, ketidakpercayaan kepada sesama, sinisme terhadap perubahan, keyakinan bahwa melawan itu sia-sia, semuanya adalah bentuk pelumpuhan psikologis.

Dalam beberapa kasus, agama pun dapat disalahgunakan. Bukan agama sebagai ajaran sucinya, tetapi tafsir yang dipelintir untuk meninabobokan. Kesabaran dipersempit menjadi kepasrahan tanpa ikhtiar. Ketaatan diubah menjadi pembungkaman kritik. Syukur dipahami sebagai menerima segala keadaan tanpa keberanian memperbaiki. Dalam kondisi seperti itu, spiritualitas yang seharusnya membebaskan justru bisa berubah menjadi alat pembiusan sosial.

Jika semua bentuk penjajahan ini digabungkan, kita melihat pola yang sangat jelas, yakni bangsa modern tidak perlu lagi ditaklukkan dengan invasi. Cukup sebuah bangsa dibuat tergantung. Cukup dibuat bingung. Cukup dibuat lelah. Cukup dibuat takut. Cukup dibuat nyaman dengan ketidakadilan. Cukup dibuat kehilangan identitas. Maka bangsa tersebut akan melemah dengan sendirinya.

Penjajahan tanpa invasi justru lebih berbahaya karena penjajahan tanpa invasi tidak menciptakan musuh yang mudah dikenali. Dalam penjajahan klasik, rakyat tahu kepada siapa rakyat melawan. Dalam penjajahan modern, musuh sering tidak memiliki wajah yang jelas. Kadang musuh berbentuk sistem. Kadang musuh berbentuk kebiasaan. Kadang musuh hadir sebagai budaya populer. Kadang musuh datang melalui ekonomi. Kadang musuh masuk melalui elite bangsa sendiri.

Karena itu, bangsa yang sedang menghadapi penjajahan modern membutuhkan jenis kesadaran yang berbeda. Jika dahulu perjuangan membutuhkan keberanian mengangkat senjata, kini perjuangan membutuhkan kemampuan membaca pola, menjaga akal sehat, melindungi budaya, memperkuat moral, dan membangun sistem yang tahan terhadap infiltrasi.

Indonesia hari ini mungkin tidak sedang menghadapi invasi dalam pengertian klasik. Tidak ada pasukan asing yang mendarat di pelabuhan. Tidak ada bendera asing yang berkibar di istana negara. Namun jika berbagai instrumen strategis bangsa dapat dipengaruhi, jika kesadaran rakyat dapat diarahkan, jika sistem dapat dikunci, jika elite dapat dikooptasi, maka pertanyaan tentang penjajahan tetap relevan.

Karena penjajahan modern tidak selalu membutuhkan penjajah yang tampak. Kadang penjajahan modern cukup dengan sistem yang bekerja dengan sangat rapi. Dan bangsa yang tidak memahami bentuk penjajahan baru ini akan terus merasa aman,

padahal sesungguhnya bangsa tersebut sedang berjalan di medan perang yang tidak kasat mata.

C. Bangsa yang Tidak Sadar Sedang Dijajah

Bentuk penjajahan yang paling berbahaya bukanlah penjajahan yang datang dengan kekerasan terbuka, melainkan penjajahan yang berhasil membuat korbannya tidak menyadari bahwa dirinya sedang dijajah. Dalam kondisi seperti itu, tidak ada perlawanan, karena tidak ada kesadaran untuk melawan. Tidak ada kemarahan kolektif, karena tidak ada pemahaman bahwa sedang terjadi ketidakadilan sistemik. Bahkan lebih tragis lagi, korban dapat justru membela sistem yang melemahkan korban, menyerang siapa pun yang mencoba mengingatkan korban, dan menganggap segala bentuk kritik sebagai ancaman terhadap stabilitas.

Di titik inilah penjajahan modern mencapai bentuknya yang paling sempurna. Penjajahan klasik bergantung pada kekuatan fisik. Penjajahan klasik menundukkan tubuh. Namun penjajahan modern menundukkan kesadaran. Penjajahan modern tidak perlu menembak rakyat jika rakyat sudah kehilangan keberanian. Penjajahan modern tidak perlu menyensor semua suara jika masyarakat sudah terbiasa membungkam dirinya sendiri. Penjajahan modern tidak perlu menghancurkan identitas secara frontal jika budaya populer sudah cukup untuk menggeser orientasi generasi baru. Penjajahan modern tidak perlu menduduki negara jika sistem negara itu sendiri sudah bekerja sesuai arah yang diinginkan.

Karena itu, pertanyaan paling penting dalam membaca kondisi bangsa hari ini bukanlah semata "siapa yang berkuasa?", tetapi "bagaimana kesadaran rakyat dibentuk?" Sebab sistem kekuasaan yang paling stabil bukanlah sistem yang mengandalkan paksaan terus menerus, melainkan sistem yang berhasil menciptakan kepatuhan tanpa harus selalu memaksa.



Bangsa yang tidak sadar sedang dijajah biasanya menunjukkan gejala yang khas. Bangsa tersebut hidup dalam berbagai tekanan, tetapi menganggap tekanan itu normal. Bangsa tersebut mengalami ketidakadilan, tetapi memaknai ketidakadilan itu sebagai bagian biasa dari kehidupan. Bangsa tersebut melihat korupsi, penyimpangan, manipulasi, kerusakan lingkungan, ketimpangan ekonomi, konflik sosial, dan degradasi moral, tetapi tidak lagi memiliki energi untuk benar-benar mempertanyakan semuanya. Ketika kondisi abnormal telah diterima sebagai kewajaran, maka

proses penjajahan telah bekerja jauh lebih dalam daripada sekadar dominasi kekuasaan.

Lihatlah bagaimana masyarakat dapat terbiasa dengan kualitas udara yang buruk, kemacetan kronis, pelayanan publik yang lambat, birokrasi yang tidak efisien, korupsi yang terus berulang, harga kebutuhan yang tidak stabil, atau ketimpangan yang terasa mencolok. Banyak dari persoalan ini memang kompleks. Namun ketika masyarakat kehilangan sensitivitas moral terhadap ketidakberesan, maka yang sedang rusak bukan hanya sistem, tetapi kesadaran kolektif.

Salah satu ciri utama bangsa yang tidak sadar sedang dijajah adalah hilangnya kemampuan membedakan masalah struktural dari sekadar gejala permukaan. Ketika rakyat hanya marah kepada individu tertentu tetapi tidak pernah melihat desain sistem yang memungkinkan masalah itu terus berulang, maka kemarahan rakyat akan mudah habis tanpa perubahan substantif. Rakyat mengganti wajah, tetapi struktur tetap sama. Rakyat menaruh harapan pada figur, tetapi tidak membangun mekanisme yang sehat. Rakyat sibuk pada gejala, tetapi akar persoalan tetap tumbuh.

Inilah mengapa propaganda modern begitu efektif. Propaganda tidak selalu berarti kebohongan terang-terangan. Dalam bentuk paling canggih, propaganda justru bekerja melalui pengulangan, pembingkaian, pemilihan isu, pengalihan perhatian, atau pembentukan persepsi yang perlahan tetapi konsisten. Masyarakat yang terus menerus dibanjiri

narasi tertentu akan cenderung menganggap narasi itu sebagai realitas. Jika media terus menekankan konflik dangkal, masyarakat sibuk pada konflik itu. Jika media memuja gaya hidup tertentu, masyarakat mengejar gaya hidup itu. Jika isu strategis dikaburkan oleh hiburan, perhatian rakyat pun berpindah.

Di era digital, persoalan ini menjadi jauh lebih serius. Informasi bergerak sangat cepat, tetapi kecepatan informasi tidak identik dengan kualitas informasi. Banyak orang merasa dirinya lebih tahu karena terhubung dengan banyak informasi, padahal yang mereka konsumsi justru dapat membentuk kebingungan, kemarahan, atau bias yang tidak sehat. Dalam situasi seperti ini, masyarakat dapat merasa aktif, padahal masyarakat hanya reaktif. Masyarakat tampak terlibat, tetapi sebenarnya hanya mengikuti arus yang dibentuk oleh algoritma.

Penjajahan kesadaran juga bekerja melalui pembiasaan. Sesuatu yang awalnya dianggap salah, jika diulang terus menerus, dapat kehilangan daya kejutnya. Ketika kebohongan menjadi biasa, integritas melemah. Ketika ketidakadilan terus berulang tanpa koreksi, masyarakat menjadi kebal secara moral. Ketika budaya konsumtif dipromosikan terus menerus, kesederhanaan dianggap ketinggalan zaman. Ketika penghormatan kepada ilmu digantikan oleh penghormatan kepada popularitas, kualitas berpikir menurun.

Bangsa yang tidak sadar sedang dijajah juga sering mengalami kelelahan psikologis kolektif. Terlalu banyak masalah dapat membuat manusia berhenti memproses semuanya dengan sehat. Ketika setiap hari

dipenuhi berita buruk, konflik, tekanan ekonomi, kekhawatiran sosial, dan tuntutan hidup, banyak orang akhirnya memilih untuk menutup diri. Bukan karena mereka tidak peduli, tetapi karena energi mental mereka habis. Di titik ini, apatisme tumbuh. Dan apatisme adalah sahabat terbaik bagi sistem yang tidak ingin diganggu.

Kondisi ekonomi memainkan peran besar dalam hal ini. Rakyat yang terus menerus bergulat dengan kebutuhan dasar sering kali tidak memiliki cukup ruang untuk memikirkan desain ketatanegaraan, kualitas demokrasi, atau ancaman strategis bangsa. Ini bukan kelemahan moral rakyat, melainkan realitas psikologis manusia. Ketika hidup sehari-hari penuh tekanan, horizon berpikir cenderung memendek. Perjuangan berubah dari membangun masa depan menjadi sekadar bertahan hari ini.

Selain tekanan ekonomi, budaya juga sangat memengaruhi kesadaran. Budaya populer modern memiliki kemampuan luar biasa dalam membentuk orientasi masyarakat. Hiburan, media sosial, tren visual, gaya hidup, bahasa, humor, semuanya dapat menjadi instrumen pembentukan kesadaran. Ini tidak berarti hiburan itu buruk. Namun ketika hiburan menjadi pelarian utama dari realitas, sementara isu strategis bangsa kehilangan ruang, maka masyarakat perlahan kehilangan kapasitas reflektif.

Bangsa yang tidak sadar sedang dijajah sering juga menunjukkan gejala ketergantungan pada validasi eksternal. Bangsa tersebut lebih mudah percaya pada label luar daripada pada potensi diri sendiri. Mereka

merasa sesuatu bernilai jika diakui pihak lain. Mereka lebih bangga meniru daripada mencipta. Dalam kondisi seperti itu, kolonisasi mental berjalan sangat halus. Tidak ada pemaksaan, tetapi ada inferioritas yang terinternalisasi.

Di wilayah spiritual, penjajahan kesadaran dapat mengambil bentuk yang sangat halus dan berbahaya. Ketika agama dipersempit menjadi ritual tanpa keberanian moral, maka spiritualitas kehilangan daya transformasinya. Kesabaran yang seharusnya menjadi kekuatan justru dibelokkan menjadi alasan untuk diam. Syukur yang semestinya memperkuat jiwa berubah menjadi pembenaran atas ketidakadilan. Ketaatan yang seharusnya berakar pada kebenaran berubah menjadi kepatuhan tanpa nalar.

Padahal spiritualitas sejati tidak pernah identik dengan pasif terhadap kezaliman. Tradisi keagamaan justru penuh dengan kisah keberanian moral. Namun jika tafsir yang dominan justru membuat masyarakat takut mempertanyakan ketidakadilan, maka agama kehilangan fungsi pembebasannya.

Ada pula gejala yang sangat khas, yakni rakyat yang justru menyerang pihak yang mencoba membangunkan kesadaran mereka. Ini adalah fenomena psikologis yang sering terjadi ketika identitas seseorang terlalu menyatu dengan sistem tertentu. Kritik terhadap sistem dianggap sebagai serangan pribadi. Padahal yang dikritik adalah struktur, bukan identitas mereka. Dalam situasi seperti ini, perubahan menjadi sangat sulit, karena yang dilawan bukan hanya

elite, tetapi juga persepsi masyarakat yang telah terbentuk.

Bangsa yang tidak sadar sedang dijajah bukan berarti bangsa yang bodoh. Poin ini penting untuk ditekankan. Banyak masyarakat yang cerdas secara individu, terdidik, bahkan sukses secara profesional, tetapi tetap menjadi bagian dari sistem yang menekan tanpa menyadarinya. Karena persoalannya bukan sekadar kecerdasan intelektual, melainkan kesadaran struktural. Seseorang bisa sangat pintar di bidang teknis, tetapi orang tersebut tidak pernah mempertanyakan desain sistem yang mengelilinginya.

Karena itu, perjuangan membebaskan bangsa modern bukan hanya perjuangan mengganti pemimpin atau memenangkan pemilu. Perjuangan ini adalah perjuangan membangunkan kesadaran. Perjuangan ini membantu rakyat melihat apa yang selama ini dianggap normal. Perjuangan ini mengajak masyarakat membedakan antara kenyamanan semu dan kebebasan sejati. Perjuangan ini menumbuhkan kembali kemampuan berpikir kritis, keberanian moral, dan kepercayaan diri budaya.

Sebab bangsa yang sadar akan jauh lebih sulit dijajah karena bangsa yang sadar akan mulai bertanya, akan mulai menghubungkan titik-titik persoalan, tidak mudah diprovokasi, tidak mudah ditipu propaganda, tidak mudah dibeli dengan kenyamanan sementara, dan tahu bahwa kedaulatan bukan sekadar slogan. Dan karena itulah, jika penjajahan modern ingin berhasil, hal pertama yang harus dihancurkan adalah kesadaran bangsa itu sendiri.

Indonesia mungkin tidak sedang diduduki secara fisik. Tetapi jika rakyat kehilangan kemampuan untuk menyadari bahwa ada sesuatu yang salah secara mendasar, maka penjajahan telah bekerja pada level yang jauh lebih dalam. Penjajahan modern tidak bekerja pada tanah, tidak bekerja pada gedung, dan tidak bekerja pada institusi melainkan bekerja pada akal, hati, dan kesadaran kolektif bangsa itu sendiri.

SHIKSHAYATI RAJANITIVIDAM

BAB 2
Dari Meriam ke Algoritma, Evolusi Penjajahan Modern

A. Kolonialisme Klasik

Untuk memahami bagaimana penjajahan modern bekerja, kita harus terlebih dahulu memahami bagaimana penjajahan klasik bekerja. Sebab sejarah selalu meninggalkan pola. Bentuk penjajahan mungkin berubah, instrumen penjajahan mungkin berkembang, bahasa penjajahan mungkin berganti, tetapi logika dasar penjajahan sering tetap sama yaitu penguasaan atas manusia, wilayah, sumber daya, dan arah masa depan suatu bangsa.



Kolonialisme klasik adalah bentuk penjajahan yang paling mudah dikenali. Kolonialisme klasik datang secara terang-terangan. Kolonialisme klasik tidak bersembunyi di balik istilah kerja sama,

pembangunan, globalisasi, atau kemajuan. Kolonialisme klasik hadir dengan wajah yang jelas, kekuatan yang nyata, dan niat penguasaan yang tidak perlu disamarkan. Kapal-kapal asing datang ke pelabuhan. Serdadu bersenjata mendarat di pesisir. Benteng dibangun. Raja-raja lokal ditekan, ditipu, atau diperangi. Rakyat dipaksa tunduk. Sumber daya diambil. Dan jika ada perlawanan, kekerasan menjadi jawaban atas perlawanan tersebut.

Dalam bentuk klasik ini, penjajahan bekerja melalui kekuatan fisik. Penjajahan klasik merebut wilayah terlebih dahulu, lalu mengendalikan manusia di dalam wilayah tersebut. Tanah adalah target utama, karena siapa yang menguasai tanah menguasai sumber daya, jalur perdagangan, posisi strategis, dan kehidupan ekonomi masyarakat. Tidak mengherankan jika sepanjang sejarah dunia, kolonialisme hampir selalu dimulai dengan ekspansi wilayah.

Indonesia mengenal fase kolonialisme klasik ini dengan sangat dalam. Selama ratusan tahun, Nusantara menjadi arena perebutan kekuasaan asing. Perebutan kekuasaan asing di Nusantara awalnya melalui perdagangan, kemudian berkembang menjadi dominasi kekuasaan dan militer. Kedatangan bangsa-bangsa Eropa ke wilayah ini tidak dapat dipisahkan dari ambisi ekonomi global pada saat itu. Rempah-rempah, jalur laut strategis, kekayaan alam, dan posisi geografis Nusantara, menjadikan Nusantara sangat bernilai dalam peta perebutan kekuasaan dunia.

Salah satu aktor paling terkenal dalam sejarah kolonialisme di Indonesia adalah VOC. Secara formal,

VOC adalah perusahaan dagang. Namun dalam praktik, VOC memiliki karakter yang jauh melampaui korporasi biasa. VOC memiliki tentara, armada laut, hak monopoli, kewenangan diplomatik, bahkan kemampuan untuk berperang. Dalam konteks modern, fakta ini tampak absurd, yakni sebuah perusahaan dengan kekuasaan yang menyerupai negara. Namun justru di situlah pelajaran pentingnya. Sejak awal, kolonialisme tidak selalu murni negara versus negara. Korporasi dan kekuasaan bisa berjalan beriringan.

VOC bukan sekadar berdagang. VOC mengendalikan harga, memaksa monopoli, menghancurkan pesaing, menciptakan ketergantungan, dan menggunakan kekerasan untuk mempertahankan kepentingan VOC. Dalam banyak hal, kolonialisme klasik sudah memperlihatkan bahwa penguasaan ekonomi dan penguasaan pemerintahan tidak pernah benar-benar terpisah.

Setelah VOC runtuh, kolonialisme formal berlanjut melalui negara kolonial. Pola penguasaan menjadi lebih sistematis. Administrasi diperkuat. Struktur birokrasi dibangun. Sistem hukum diciptakan untuk melayani kepentingan penguasa. Infrastruktur dibangun bukan terutama untuk kesejahteraan rakyat, melainkan untuk efisiensi penguasaan dan eksploitasi. Jalan, rel kereta, pelabuhan, dan fasilitas strategis bukan semata simbol modernisasi, tetapi bagian dari mesin kolonial.

Di sinilah penting untuk memahami bahwa kolonialisme klasik tidak hanya menggunakan kekerasan militer. Kolonialisme klasik juga

menggunakan administrasi, hukum, ekonomi, dan pengelolaan pengetahuan. Namun perbedaan kolonialisme klasik dengan kolonialisme modern adalah bahwa dalam kolonialisme klasik semuanya masih sangat terang-terangan. Rakyat tahu siapa penguasanya. Tidak ada ilusi kedaulatan. Tidak ada kesan bahwa sistem penjajahan dibangun untuk rakyat. Penjajahan terlihat jelas.

Salah satu ciri paling brutal dari kolonialisme klasik adalah eksploitasi tenaga manusia. Kerja paksa, pajak yang menindas, monopoli perdagangan, dan sistem ekonomi ekstraktif adalah wajah sehari-hari penjajahan klasik. Rakyat tidak dilihat sebagai warga yang harus disejahterakan, melainkan sebagai instrumen produksi. Tubuh manusia menjadi alat ekonomi. Tanah menjadi mesin keuntungan. Alam diperas. Keringat dipanen. Dan jika perlu, nyawa dikorbankan.

Namun kolonialisme klasik tidak hanya menghancurkan ekonomi. Kolonialisme klasik juga menghancurkan struktur sosial dan psikologis bangsa. Ketika sebuah bangsa terlalu lama hidup dalam struktur subordinasi, efek dari subordinasi tersebut tidak berhenti pada generasi yang mengalami kekerasan langsung. Mentalitas ketergantungan, rasa inferior, trauma kolektif, dan fragmentasi sosial dapat bertahan jauh lebih lama daripada kehadiran fisik penjajah itu sendiri.

Kolonialisme juga sering menggunakan strategi pecah belah. Strategi pecah belah ini bukan strategi baru, tetapi strategi ini adalah salah satu yang paling

efektif. Bangsa yang bersatu lebih sulit dikuasai. Maka identitas-identitas lokal dipertajam. Konflik internal dimanfaatkan. Elite tertentu dikooptasi. Sebagian kelompok diberi keuntungan agar menjadi perpanjangan tangan kekuasaan. Sebagian lainnya dilemahkan. Dalam situasi seperti itu, penjajah tidak perlu selalu hadir di setiap titik. Cukup menciptakan sistem di mana rakyat saling mengawasi, saling mencurigai, atau bahkan saling menekan.

Strategi ini sangat penting dicatat, karena banyak orang mengira kolonialisme klasik hanya tentang tentara dan kekerasan fisik. Padahal sejak awal, kolonialisme juga sangat cerdas secara perebutan kekuasaan. Kolonialisme klasik memahami bahwa menguasai elite lokal sering lebih efisien daripada memerintah seluruh rakyat secara langsung. Inilah embrio dari pola yang kelak berkembang jauh lebih halus dalam bentuk neo-kolonialisme.

Kolonialisme klasik juga memahami pentingnya narasi. Penguasaan tidak cukup dengan kekuatan, penguasaan juga membutuhkan legitimasi. Maka muncullah berbagai justifikasi moral bahkan peradaban. Penjajahan dibungkus sebagai misi peradaban, modernisasi, atau pembangunan. Penjajah memosisikan dirinya sebagai pihak yang membawa keteraturan, sementara bangsa yang dijajah digambarkan sebagai bangsa yang belum matang, belum maju, atau membutuhkan arahan.

Narasi ini sangat berbahaya, karena narasi ini tidak hanya menundukkan tubuh, tetapi juga berusaha membentuk persepsi. Jika rakyat yang dijajah mulai

percaya bahwa penjajah lebih superior, maka dominasi menjadi jauh lebih stabil. Penjajahan fisik berubah menjadi penjajahan mental.

Dalam konteks Indonesia, perjuangan kemerdekaan lahir sebagai respons terhadap seluruh struktur penguasaan kolonial ini. Kemerdekaan bukan sekadar pergantian bendera, tetapi penolakan terhadap sistem yang memperlakukan bangsa sebagai objek. Proklamasi 17 Agustus 1945 menjadi momen historis ketika bangsa ini menyatakan bahwa penguasaan fisik atas tanah air harus berakhir. Namun penting untuk dicatat adalah berakhirnya kolonialisme klasik. tidak otomatis berarti berakhirnya logika kolonial. Inilah titik transisi yang sangat penting.

Karena kolonialisme klasik pada dasarnya mengajarkan satu hal, yaitu penguasaan bangsa selalu mencari cara paling efisien. Jika kekuatan militer efektif, maka militer digunakan. Jika ekonomi lebih efektif, maka ekonomi digunakan. Jika elite lokal lebih mudah dikendalikan, maka elite lokal didekati. Jika narasi lebih kuat daripada kekerasan, maka narasi digunakan. Artinya, ketika dunia berubah, strategi penjajahan pun ikut berubah.

Kolonialisme klasik adalah fase ketika penguasaan dilakukan secara fisik dan terbuka. Namun ketika biaya kekuasaan, ekonomi, dan militer untuk pendudukan langsung menjadi terlalu mahal, dunia kekuasaan mencari model baru yang lebih canggih. Kekuasaan tidak perlu lagi menduduki wilayah jika pengaruh bisa ditanamkan. Kekuasaan tidak perlu lagi mengirim tentara jika keputusan strategis bisa

diarahkan dari jauh. Kekuasaan tidak perlu lagi menaklukkan rakyat dengan cambuk jika rakyat bisa dikondisikan untuk patuh melalui sistem.

Di sinilah kolonialisme klasik menjadi penting untuk dipelajari, bukan sekadar sebagai sejarah, tetapi sebagai fondasi pemahaman terhadap bentuk-bentuk penjajahan yang lebih modern. Karena jika dahulu meriam adalah simbol kekuasaan, maka hari ini meriam mungkin telah berubah bentuk. Namun tujuan akhir dari setiap bentuk kekuasaan tetap sama, yaitu "Penguasaan". Dan bangsa yang gagal memahami evolusi bentuk penguasaan akan terus membaca ancaman dengan kacamata lama, sementara medan perang bangsa tersebut telah berubah total.

B. Neo-Kolonialisme

Jika kolonialisme klasik adalah wajah penjajahan yang terang-terangan, maka neo-kolonialisme adalah wajah penjajahan yang jauh lebih halus, lebih cerdas, dan dalam banyak hal lebih berbahaya. Kolonialisme klasik memerlukan kapal perang, serdadu, benteng, administrasi pendudukan, dan kekuatan fisik yang nyata. Neo-kolonialisme tidak selalu membutuhkan semua itu. Neo-kolonialisme dapat bekerja tanpa pendudukan militer, tanpa deklarasi penaklukan, bahkan tanpa harus menampilkan diri sebagai penjajah. Inilah sebabnya banyak bangsa yang secara formal telah merdeka, tetapi secara substantif masih hidup dalam struktur ketergantungan yang mendalam.



Setelah gelombang dekolonisasi di berbagai belahan dunia pada abad ke-20, termasuk kemerdekaan Indonesia, banyak orang mengira era penjajahan telah berakhir. Negara-negara baru lahir, pemerintahan nasional dibentuk, bendera nasional dikibarkan, dan simbol-simbol kedaulatan tampil di panggung internasional. Secara hukum, kolonialisme memang tampak surut. Namun kekuatan global yang sebelumnya menikmati manfaat besar dari kolonialisme tentu tidak serta merta kehilangan kepentingan tersebut. Kekuatan global hanya mengubah cara.

Di titik inilah konsep neo-kolonialisme menjadi relevan. Secara sederhana, neo-kolonialisme adalah bentuk penguasaan baru atas bangsa-bangsa yang secara formal telah merdeka, tetapi secara ekonomi, sosial, budaya, atau strategis tetap berada dalam orbit pengaruh kekuatan yang lebih besar. Neo-kolonialisme bukan lagi penguasaan langsung atas wilayah,

melainkan penguasaan atas keputusan. Neo-kolonialisme bukan lagi penjajahan atas tanah, melainkan penjajahan atas arah.

Salah satu kekuatan utama neo-kolonialisme adalah kemampuan neo-kolonialisme menciptakan ilusi kedaulatan. Sebuah negara tampak merdeka, memiliki pemerintahan sendiri, lembaga sendiri, dan proses birokrasi sendiri. Namun ketika keputusan-keputusan strategis negara tersebut sangat dipengaruhi oleh tekanan eksternal, maka pertanyaan tentang kedaulatan menjadi sah. Sebuah bangsa dapat memiliki bendera sendiri, tetapi apakah bangsa tersebut benar-benar bebas menentukan masa depannya?

Tidak semua ketergantungan berarti penjajahan, tentu saja. Dunia modern memang saling terhubung. Perdagangan internasional, kerja sama ekonomi, pertukaran teknologi, dan hubungan diplomatik adalah bagian normal dari kehidupan global. Namun masalah muncul ketika hubungan itu menjadi tidak seimbang, ketika ketergantungan menjadi terlalu dalam, dan ketika kemampuan bangsa untuk mengambil keputusan independen melemah secara sistematis.

Salah satu instrumen utama neo-kolonialisme adalah ekonomi. Jika kolonialisme klasik mengambil kekayaan dengan kekuatan langsung, neo-kolonialisme dapat bekerja melalui mekanisme pasar, pinjaman, investasi, dan struktur keuangan global. Ketika negara-negara berkembang sangat bergantung pada pembiayaan eksternal, maka ruang kebijakan negara-negara tersebut dapat menyempit. Ketika pembangunan sangat bergantung pada modal luar,

maka posisi tawar negara berkembang bisa melemah. Ketika sumber daya strategis dikuasai melalui skema ekonomi tertentu, maka bentuk penguasaannya hanya berganti wajah.

Ketergantungan ekonomi adalah medan yang sangat sensitif karena efek ketergantungan ekonomi langsung terasa pada rakyat. Negara yang ekonominya lemah akan sulit menjaga kemandirian. Pemerintah yang terus menerus menghadapi tekanan fiskal lebih mudah mengambil keputusan jangka pendek. Rakyat yang dibebani persoalan ekonomi sehari-hari cenderung lebih fokus pada bertahan hidup daripada membangun kesadaran strategis. Di titik ini, ekonomi bukan sekadar soal kesejahteraan, tetapi juga soal kedaulatan.

Neo-kolonialisme juga sering bekerja melalui elite lokal. Ini salah satu pelajaran penting dari sejarah. Tidak semua bentuk penguasaan harus datang langsung dari luar. Kadang pengaruh justru jauh lebih efektif ketika pengaruh tersebut dijalankan melalui elite dalam negeri yang memiliki akses terhadap kekuasaan, kebijakan, ekonomi, atau opini publik. Dalam model seperti ini, penguasaan tampak seperti keputusan domestik, padahal arah besarnya dapat sangat dipengaruhi oleh kepentingan eksternal.

Ini bukan berarti setiap elite nasional adalah agen kepentingan luar. Tuduhan seperti itu terlalu simplistik dan tidak sehat. Namun secara struktural, sejarah menunjukkan bahwa kekuatan besar sering lebih memilih bekerja melalui jaringan pengaruh, kemitraan strategis, elite yang kompatibel, atau struktur ekonomi-

sosial yang membuat ketergantungan menjadi permanen. Hasil akhir dari mekanisme tersebut tetap sama, yaitu pengambilan keputusan nasional menjadi tidak sepenuhnya otonom.

Selain ekonomi, budaya menjadi arena penting neo-kolonialisme. Jika dahulu penjajah memaksakan dominasi secara kasar, kini pengaruh budaya dapat menyebar melalui media global, hiburan, platform digital, mode, gaya hidup, bahasa, hingga sistem nilai. Kolonialisme budaya bekerja bukan dengan larangan, tetapi dengan daya tarik. Kolonialisme budaya tidak memaksa, tetapi menggoda. Kolonialisme budaya tidak menghancurkan identitas secara frontal, tetapi membuat identitas lokal terasa kurang menarik, kurang modern, atau kurang bergengsi.

Bangsa yang kehilangan kepercayaan terhadap budayanya sendiri akan lebih mudah mengadopsi nilai luar tanpa filter kritis. Sekali lagi, ini bukan penolakan terhadap pertukaran budaya. Dunia memang saling terhubung. Namun perbedaannya terletak pada apakah bangsa itu tetap menjadi subjek yang memilih, atau justru menjadi objek yang dibentuk.

Neo-kolonialisme juga sangat bergantung pada produksi narasi. Dalam era kolonial klasik, legitimasi penjajahan dibangun melalui ide superioritas rasial atau misi peradaban. Dalam era neo-kolonial, legitimasi sering dibangun melalui bahasa yang lebih modern, yaitu pembangunan, reformasi, stabilitas, investasi, integrasi global, efisiensi, tata kelola, atau modernisasi. Istilah-istilah ini tidak salah pada dirinya sendiri.

Namun seperti semua bahasa kekuasaan, istilah-istilah ini bisa digunakan untuk tujuan yang sangat beragam.

Ketika sebuah bangsa tidak cukup kritis membaca narasi yang dibangun di sekelilingnya, maka kebijakan strategis bangsa tersebut dapat diterima begitu saja tanpa pembacaan mendalam. Sesuatu yang tampak sebagai kemajuan bisa saja menyimpan ketergantungan. Sesuatu yang terlihat efisien bisa saja mengikis kemandirian jangka panjang. Sesuatu yang tampak rasional secara ekonomi bisa saja merugikan kedaulatan strategis.

Di era globalisasi, teknologi menjadi instrumen baru yang memperkuat neo-kolonialisme. Ketergantungan pada infrastruktur digital, platform asing, ekosistem perangkat, data, dan teknologi inti menciptakan bentuk ketergantungan yang sebelumnya tidak dikenal dalam kolonialisme klasik. Negara yang tidak memiliki kapasitas teknologi strategis akan semakin bergantung pada pihak luar, bukan hanya untuk produktivitas, tetapi juga untuk keamanan, komunikasi, dan kontrol informasi.

Yang menarik, neo-kolonialisme sering tidak terasa menindas. Justru banyak orang merasa diuntungkan oleh neo-kolonialisme. Mereka mendapatkan akses teknologi, produk global, hiburan, konektivitas, dan kenyamanan hidup modern. Di sinilah letak kecanggihan neo-kolonialisme. Sebuah sistem pengaruh yang memberi manfaat nyata dalam beberapa aspek akan jauh lebih mudah diterima. Masalah dari sistem tersebut muncul ketika manfaat

jangka pendek menutupi konsekuensi strategis jangka panjang.

Neo-kolonialisme juga memiliki karakter yang fleksibel. Neo-kolonialisme tidak harus selalu terpusat pada satu negara tertentu atau satu aktor tertentu. Dalam dunia modern, kekuatan pengaruh bisa datang dari korporasi global, lembaga keuangan, platform digital, jaringan transnasional, industri budaya, atau kombinasi dari semuanya. Medan pengaruh menjadi jauh lebih kompleks dibanding kolonialisme klasik.

Dalam konteks Indonesia, pembacaan terhadap neo-kolonialisme tidak boleh jatuh pada paranoia atau teori konspirasi dangkal. Justru yang diperlukan adalah kedewasaan strategis. Bangsa ini harus mampu membaca mana bentuk kerja sama yang sehat, mana ketergantungan yang berbahaya, mana integrasi global yang menguntungkan, dan mana pola yang justru melemahkan kedaulatan. Tidak semua hubungan global adalah ancaman, tetapi tidak semua hubungan global juga netral.

Yang paling berbahaya adalah ketika neo-kolonialisme berhasil menciptakan kenyamanan ketergantungan. Rakyat merasa semuanya baik-baik saja karena sistem tetap berjalan, konsumsi tetap tersedia, hiburan tetap melimpah, dan kehidupan tampak modern. Namun secara perlahan, kapasitas nasional untuk mandiri menurun. Ketika kesadaran strategis melemah, bangsa dapat masuk ke fase di mana ketergantungan dianggap normal.

Neo-kolonialisme tidak membutuhkan deklarasi penjajahan. Neo-kolonialisme tidak membutuhkan

tentara pendudukan. Neo-kolonialisme tidak membutuhkan gubernur jenderal. Neo-kolonialisme hanya membutuhkan sistem yang membuat bangsa lain sulit hidup tanpa dirinya. Dan jika bangsa yang dipengaruhi tidak cukup sadar, maka bangsa tersebut justru akan mempertahankan sistem itu atas nama kemajuan.

Inilah mengapa neo-kolonialisme jauh lebih sulit dilawan dibanding kolonialisme klasik. Dalam kolonialisme klasik, musuh terlihat jelas. Dalam neo-kolonialisme, pengaruh sering tersebar, samar, dan bercampur dengan mekanisme normal kehidupan global. Yang harus dilawan bukan hanya aktor, tetapi pola. Bukan hanya kebijakan tertentu, tetapi desain ketergantungan itu sendiri.

Jika kolonialisme klasik menggunakan meriam untuk merebut wilayah, maka neo-kolonialisme menggunakan sistem untuk merebut arah. Dan bangsa yang gagal memahami perubahan ini akan terus merasa merdeka, padahal keputusan-keputusan paling strategis bangsa tersebut perlahan tidak lagi sepenuhnya lahir dari dirinya sendiri.

C. Perang Asimetris, Perang Non-Konvensional, dan Penguasaan Tanpa Pendudukan

Jika kolonialisme klasik menaklukkan bangsa dengan kekuatan militer terbuka, dan neo-kolonialisme menundukkan bangsa melalui ketergantungan sistemik, maka fase berikutnya dalam evolusi penguasaan global adalah sesuatu yang jauh lebih

canggih, yakni perang asimetris, perang non-konvensional, dan penguasaan tanpa pendudukan.

Pada fase ini, medan perang tidak lagi mudah dikenali. Tidak selalu ada deklarasi perang. Tidak selalu ada garis depan yang jelas. Tidak selalu ada suara tembakan. Namun dampak dari fase ini dapat sama besar, bahkan dalam banyak kasus lebih dalam, karena yang diserang bukan hanya infrastruktur fisik, melainkan pikiran, perilaku, budaya, ekonomi, dan kesadaran suatu bangsa.

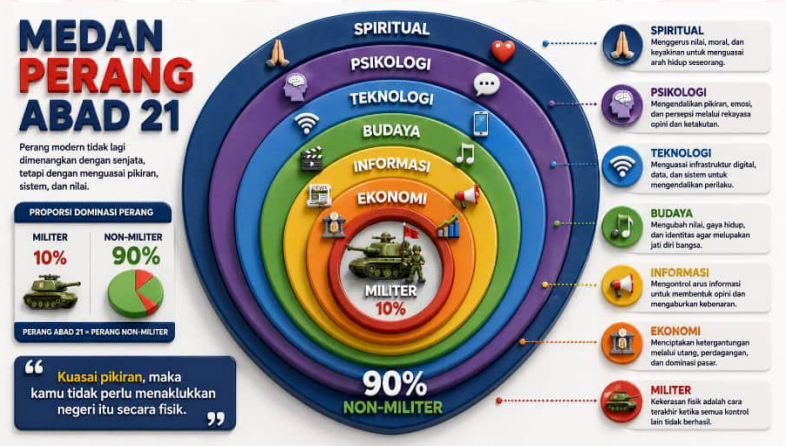

BAB 3
Ranjau Ranjau Sepanjang Jalan, Delapan Belas Jenis Perang Melawan Bangsa



A. Serangan terhadap Pikiran, Budaya, dan Jiwa

"Ranjau-ranjau sepanjang jalan, beribu panah berhamburan…"

Ada kalanya sebuah syair lebih jujur daripada pidato pemerintah. Ada saat-saat ketika puisi justru mampu menangkap realitas yang gagal dijelaskan oleh statistik, berita, atau jargon-jargon kebijakan. Syair tersebut berbicara tentang ranjau, panah, dan ledakan. Pada pandangan pertama, syair itu tampak seperti gambaran medan perang.

Namun jika kita membaca perjalanan bangsa hari ini dengan kejernihan yang cukup, kita akan menemukan bahwa metafora syair itu bukanlah hiperbola. Bangsa ini memang sedang berjalan di medan yang penuh ranjau. Hanya saja, ranjau-ranjau itu

tidak selalu tertanam di tanah. Banyak di antaranya tertanam di layar, di ruang kelas, di ruang budaya, di ruang spiritual, dan bahkan di dalam kesadaran manusia sendiri.

Perang modern tidak selalu bertujuan membunuh tubuh. Banyak perang justru bertujuan melumpuhkan kemampuan berpikir, menggeser orientasi nilai, menghancurkan daya tahan moral, atau membuat manusia kehilangan kemampuan membedakan mana ancaman dan mana kenyamanan semu. Dalam konteks itulah, bangsa modern menghadapi jenis peperangan yang jauh lebih kompleks daripada sekadar konflik bersenjata. Bangsa modern menghadapi perang terhadap pikiran, budaya, dan jiwa.

1. Perang Media dan Disinformasi



Salah satu senjata paling kuat dalam era modern adalah informasi. Ironisnya, sesuatu yang seharusnya menjadi alat pencerahan justru dapat berubah menjadi alat pengendalian yang sangat efektif. Media, dalam idealnya, adalah

instrumen pendidikan publik, ruang pertukaran gagasan, pengawas kekuasaan, dan penjaga kualitas demokrasi. Namun ketika media menjadi bagian dari perebutan pengaruh, pertarungan ekonomi, atau operasi narasi tertentu, maka fungsi media dapat berubah secara drastis.

Perang media tidak selalu berarti kebohongan terang-terangan. Dalam bentuk paling canggih, perang media justru bekerja melalui pemilihan isu, pembingkaian realitas, pengaturan prioritas perhatian, pengulangan pesan, dan penciptaan persepsi. Apa yang terus-menerus dilihat publik akan terasa penting. Apa yang terus-menerus diulang akan terasa benar. Apa yang tidak pernah ditampilkan perlahan dianggap tidak relevan.

Di era digital, persoalan ini semakin kompleks. Dulu media relatif terpusat. Kini setiap orang bisa menjadi penyebar informasi. Kondisi ini tampak demokratis, tetapi juga menciptakan kerentanan baru. Disinformasi menyebar cepat. Kebohongan emosional sering bergerak lebih cepat daripada fakta yang terverifikasi. Algoritma memperkuat konten yang memicu keterlibatan, bukan selalu konten yang paling benar. Akibatnya, masyarakat hidup dalam ruang informasi yang padat tetapi belum tentu sehat.

Perang media bekerja dengan satu prinsip dasar, yaitu membentuk persepsi adalah membentuk realitas sosial. Jika masyarakat diyakinkan bahwa sesuatu adalah ancaman, mereka akan bereaksi seolah-olah sesuatu itu ancaman. Jika masyarakat diyakinkan bahwa sesuatu normal, mereka akan menoleransi sesuatu itu. Jika publik terus dibanjiri konflik dangkal, publik akan kelelahan untuk membaca persoalan mendasar.

Bangsa yang kehilangan kendali atas kualitas informasinya akan mudah terpecah, mudah dimanipulasi, dan mudah kehilangan fokus strategis. Dalam kondisi seperti itu, perang tidak perlu menggunakan peluru. Perang cukup menggunakan narasi.

2. Perang Budaya



Jika media menyerang pikiran, maka budaya menyerang orientasi hidup. Budaya

adalah salah satu kekuatan paling halus sekaligus paling menentukan dalam membentuk manusia. Budaya mengajarkan apa yang dianggap keren, normal, memalukan, sukses, indah, atau layak dikejar. Karena itu, menguasai budaya berarti menguasai selera, kebiasaan, bahkan struktur nilai masyarakat.

Perang budaya tidak selalu datang dalam bentuk pemaksaan. Justru kekuatan perang budaya terletak pada daya tariknya. Perang budaya membuat manusia mengadopsi sesuatu karena merasa tertarik, bukan karena dipaksa. Gaya hidup, hiburan, simbol status, bahasa populer, mode, humor, visual digital, hingga pola interaksi sosial menjadi bagian dari arena perang budaya ini.

Masalahnya bukan pada pertukaran budaya itu sendiri. Dunia memang saling terhubung, dan interaksi budaya adalah kenyataan sejarah. Persoalan perang budaya muncul ketika sebuah bangsa kehilangan kemampuan menyaring, lalu menerima semua arus budaya tanpa kesadaran kritis. Dalam situasi seperti itu, budaya lokal perlahan menjadi aksesori nostalgia, sementara orientasi hidup sehari-hari dibentuk oleh standar luar yang belum tentu sesuai dengan karakter bangsa.

Perang budaya dapat menciptakan generasi yang lebih mengenal simbol global daripada akar peradabannya sendiri. Perang budaya dapat menciptakan generasi yang lebih

cepat meniru daripada mencipta. Perang budaya dapat menciptakan generasi yang mengukur harga diri melalui validasi visual, konsumsi, atau citra digital. Jika perang budaya ini berlangsung lama, bangsa bukan hanya kehilangan kebiasaan, tetapi kehilangan identitas.

Bangsa yang kehilangan identitas budayanya akan mudah dibentuk ulang. Karena budaya bukan dekorasi. Budaya adalah sistem nilai hidup.

3. Perang Narkoba



Tidak semua perang datang melalui ide. Sebagian perang datang langsung menyerang tubuh, pikiran, dan masa depan generasi. Perang narkoba adalah salah satu bentuk penghancuran paling brutal, karena perang narkoba tidak hanya merusak individu, tetapi juga menghancurkan fondasi sosial bangsa.

Narkoba melumpuhkan disiplin, merusak kesehatan mental, menghancurkan potensi produktif, melemahkan keluarga, dan

menciptakan ketergantungan yang sangat destruktif. Generasi yang seharusnya tumbuh menjadi pembangun bangsa justru dapat kehilangan arah, kesehatan, bahkan masa depannya akibat narkoba.

Dalam perspektif strategis, bangsa yang generasi mudanya rusak secara masif akan menghadapi pelemahan jangka panjang. Produktivitas bangsa menurun. Stabilitas sosial bangsa terganggu. Beban kesehatan bangsa meningkat. Kapasitas kepemimpinan masa depan bangsa menyusut.

Perang narkoba bukan hanya persoalan kriminalitas atau kesehatan masyarakat. Perang narkoba adalah persoalan ketahanan nasional. Karena bangsa yang generasinya lemah akan jauh lebih mudah dikendalikan.

4. Perang Teknologi



Teknologi adalah salah satu berkah terbesar peradaban manusia. Namun seperti

semua alat kekuasaan, teknologi juga dapat menjadi instrumen pengendalian. Dunia modern sangat bergantung pada teknologi. Komunikasi, pendidikan, transaksi, keamanan, media, pekerjaan, bahkan hubungan sosial kini sangat dipengaruhi oleh infrastruktur digital.

Masalah perang teknologi muncul ketika bangsa hanya menjadi pengguna teknologi, bukan pengendali teknologi. Ketika sistem teknologi inti berada di luar kendali nasional, maka kedaulatan strategis bangsa menjadi rapuh. Siapa yang menguasai platform, algoritma, data, dan ekosistem digital memiliki kekuatan yang sangat besar terhadap perilaku masyarakat.

Teknologi bukan lagi sekadar alat bantu. Teknologi telah menjadi arsitektur kehidupan. Algoritma menentukan apa yang kita lihat. Platform digital menentukan pola konsumsi. Sistem digital memengaruhi keputusan. Bahkan emosi dan perhatian manusia kini dapat dipelajari dan diarahkan melalui teknologi.

Bangsa yang tidak memahami dimensi strategis teknologi akan mengira dirinya hanya sedang menikmati kemudahan, padahal bangsa tersebut mungkin sedang membangun ketergantungan jangka panjang. Teknologi dapat membebaskan, tetapi teknologi juga dapat mengunci. Dan perang teknologi bekerja justru ketika masyarakat merasa sedang dimudahkan oleh teknologi.

5. Perang Psikologi



Tidak semua perang bertujuan menghancurkan lawan secara fisik. Banyak perang justru bertujuan membuat lawan menyerah sebelum bertempur. Perang psikologi bekerja pada emosi, persepsi, rasa aman, harapan, ketakutan, dan stamina mental masyarakat.

Bangsa yang terus-menerus dicekam rasa takut akan sulit berpikir jernih. Bangsa yang kelelahan secara emosional cenderung mencari kenyamanan cepat, bukan perubahan strategis. Bangsa yang kehilangan harapan akan mudah menerima status quo.

Perang psikologi bisa hadir melalui banjir berita buruk, polarisasi sosial, ketidakpastian ekonomi, konflik identitas, rasa tidak percaya, atau pengalaman berulang bahwa perubahan tidak pernah membawa hasil. Sedikit demi sedikit, manusia menjadi sinis akibat perang

psikologi. Mereka mulai percaya bahwa melawan itu sia-sia. Bahwa semua sama saja. Bahwa tidak ada yang bisa diubah. Di titik itu, perang psikologi telah berhasil. Karena manusia yang kehilangan harapan lebih mudah dikendalikan daripada manusia yang marah tetapi masih percaya perubahan mungkin terjadi.

6. Perang Spiritual / Teologis



Perang spiritual mungkin merupakan salah satu medan perang yang paling sensitif sekaligus paling menentukan. Spiritualitas seharusnya menjadi sumber kekuatan, keberanian moral, keteguhan hati, dan makna hidup. Namun ketika tafsir spiritual dibelokkan, spiritualitas dapat berubah menjadi alat pembiusan sosial.

Yang perlu dibedakan adalah agama sebagai ajaran suci, dan manipulasi terhadap tafsir keagamaan demi kepentingan tertentu. Perang spiritual tidak menyerang agama secara

frontal. Perang spiritual justru sering bekerja dengan menggunakan bahasa agama.

Kesabaran dipersempit menjadi diam terhadap ketidakadilan. Syukur dibelokkan menjadi pembenaran atas kondisi yang rusak. Ketaatan dipahami sebagai larangan berpikir kritis. Tawakal dipersempit menjadi pasrah tanpa ikhtiar. Dalam kondisi manipulasi tafsir seperti ini, spiritualitas kehilangan daya pembebasannya.

Padahal sepanjang sejarah, nilai-nilai spiritual justru melahirkan keberanian besar. Para nabi tidak datang untuk meninabobokan masyarakat dalam ketidakadilan. Spiritualitas sejati membangun manusia yang kuat, bukan manusia yang lumpuh. Jika masyarakat kehilangan kekuatan spiritual yang sehat, maka masyarakat kehilangan salah satu benteng terpenting dalam menghadapi tekanan zaman.

Perang-perang di atas mungkin tampak berbeda bentuknya. Sebagian perang menyerang pikiran. Sebagian perang menyerang budaya. Sebagian perang menyerang tubuh. Sebagian perang menyerang jiwa. Namun esensi dari semua perang tersebut sama, yaitu melemahkan manusia sebagai subjek yang merdeka.

Bangsa yang pikirannya bingung, budayanya goyah, generasinya rusak, teknologinya tergantung, mentalnya lelah, dan spiritualitasnya dibelokkan akan sangat sulit membangun kedaulatan yang sejati. Dan ini baru

sebagian dari medan perang. Karena ranjau-ranjau di sepanjang jalan bangsa ternyata jauh lebih banyak daripada yang terlihat di permukaan.

B. Serangan terhadap Kedaulatan Sistem

Jika pada bagian sebelumnya kita membahas perang yang menyerang pikiran, budaya, dan jiwa manusia, maka pada bagian ini kita memasuki medan yang tidak kalah berbahaya, yakni serangan terhadap sistem yang menopang kedaulatan bangsa. Sebab sebuah bangsa tidak hanya hidup melalui manusia-manusianya, tetapi juga melalui struktur yang mereka bangun bersama. Sistem ekonomi, hukum, jaringan kekuasaan, regulasi, data, dan kualitas elite menentukan apakah sebuah bangsa mampu berdiri tegak atau justru perlahan kehilangan kendali atas dirinya sendiri.



Sebuah bangsa dapat memiliki rakyat yang cerdas, religius, berbudaya, bahkan patriotik. Namun jika sistem bangsa tersebut rapuh, mudah diinfiltrasi, atau dirancang sedemikian rupa sehingga membuka

ruang dominasi kepentingan tertentu, maka kualitas individu saja tidak cukup. Sistem yang rusak dapat mengalahkan niat baik manusia. Dalam konteks itulah, perang modern tidak hanya menyerang manusia secara langsung, tetapi juga menyerang arsitektur kekuasaan bangsa itu sendiri.

1. **Perang Ekonomi**



Ekonomi adalah darah yang mengalir dalam tubuh bangsa. Jika aliran ekonomi itu sehat, negara dapat bernapas dengan tenang, membangun dengan percaya diri, dan melindungi rakyat dengan lebih baik. Namun jika ekonomi rapuh, tergantung, atau mudah ditekan, maka kedaulatan pun ikut terpengaruh.

Perang ekonomi tidak selalu tampak seperti serangan. Perang ekonomi sering hadir dalam bentuk fluktuasi pasar, ketergantungan utang, dominasi impor, kendali atas komoditas strategis, ketidakseimbangan perdagangan, tekanan fiskal, atau penguasaan sektor vital. Karena bentuk perang ekonomi tampak legal dan normal, banyak orang tidak menyadari bahwa

ekonomi dapat menjadi instrumen perang yang sangat efektif.

Bangsa yang tidak mandiri secara ekonomi akan selalu memiliki titik lemah. Ketika kebutuhan dasar bangsa bergantung pada pihak lain, tekanan terhadap bangsa menjadi mudah dilakukan. Ketika pembangunan bangsa hanya mungkin dengan pembiayaan eksternal, posisi tawar bangsa melemah. Ketika struktur ekonomi terlalu oligarkis, rakyat kehilangan ruang partisipasi yang sehat.

Lebih jauh lagi, perang ekonomi sering tidak hanya menargetkan negara, tetapi juga menargetkan rakyat secara psikologis. Rakyat yang terus hidup dalam tekanan biaya hidup, pekerjaan yang tidak stabil, kecemasan ekonomi, dan ketidakpastian masa depan akan sulit memikirkan persoalan strategis bangsa. Energi rakyat habis untuk bertahan hidup.

Inilah salah satu kecanggihan perang ekonomi, karena perang ekonomi akan melemahkan bangsa dari atas melalui kebijakan, dan dari bawah melalui tekanan kehidupan sehari-hari.

2. Perang Jaringan

Tidak semua kekuasaan bekerja secara formal. Banyak kekuatan justru bergerak melalui jaringan informal, seperti relasi elite, komunitas strategis, kelompok pengaruh, akses informasi, patronase, jejaring bisnis, organisasi

transnasional, hingga simpul-simpul kekuasaan yang tidak selalu terlihat di permukaan.



Perang jaringan adalah perang untuk menguasai konektivitas strategis bangsa. Bangsa modern tidak hanya ditentukan oleh siapa yang duduk di kursi kekuasaan, tetapi juga oleh siapa yang memiliki akses kepada pengambil keputusan, siapa yang membentuk opini, siapa yang memengaruhi kebijakan, siapa yang menghubungkan sektor-sektor strategis, dan siapa yang mengendalikan arus informasi.

Jika jaringan strategis suatu bangsa dikuasai oleh kepentingan yang tidak sejalan dengan kedaulatan rakyat, maka keputusan formal bisa tetap tampak sah, tetapi substansi keputusan tersebut akan bergeser.

Perang jaringan sangat efektif karena perang jaringan bekerja secara halus. Tidak perlu merebut seluruh institusi. Cukup menguasai simpul-simpul kunci. Tidak perlu

mengendalikan semua orang. Cukup menghubungkan orang-orang strategis dalam orbit pengaruh tertentu.

Bangsa yang gagal membangun jaringan internal yang sehat akan mudah kalah bukan karena kekurangan sumber daya, tetapi karena bangsa tersebut kalah dalam konektivitas kekuasaan.

3. Perang Hukum Internasional



Dalam dunia modern, hukum bukan hanya alat keadilan, tetapi juga arena kekuasaan. Hubungan antarnegara diatur oleh berbagai perjanjian, mekanisme arbitrase, standar global, norma internasional, dan struktur kelembagaan transnasional. Dalam kondisi ideal, kerangka hukum ini dapat membantu menciptakan keteraturan. Namun dalam realitas geostrategi, hukum internasional juga bisa menjadi instrumen pengaruh.

Perang hukum internasional terjadi ketika kerangka hukum global digunakan secara strategis untuk menekan, membatasi, atau memengaruhi ruang gerak suatu bangsa. Ini tidak berarti hukum internasional selalu buruk. Tetapi seperti semua instrumen kekuasaan, hukum internasional dapat digunakan secara tidak seimbang. Negara yang kuat memiliki kapasitas negosiasi, sumber daya hukum, dan posisi tawar yang lebih besar. Negara yang lemah lebih rentan masuk ke dalam struktur hukum internasional yang merugikan.

Ketika suatu negara tidak cukup kuat secara diplomatik atau strategis, maka keputusan penting negara tersebut tentang perdagangan, investasi, sumber daya, bahkan kebijakan tertentu dapat dipengaruhi oleh struktur hukum yang berada di luar kendali langsung rakyatnya. Dalam kondisi seperti ini, hukum tidak lagi terasa sebagai instrumen netral, tetapi hukum dapat berubah menjadi medan tekanan yang sangat canggih.

4. Perang Regulasi



Jika hukum internasional menyerang dari luar, maka perang regulasi bekerja dari dalam. Regulasi adalah instrumen yang sangat kuat karena regulasi menentukan apa yang boleh, tidak boleh, mudah, sulit, legal, atau ilegal. Dalam negara modern, regulasi seharusnya menjadi alat tata kelola yang adil. Namun jika desain regulasi terlalu rumit, bias, mudah dimanipulasi, atau lebih melayani kepentingan elite tertentu, maka regulasi berubah menjadi instrumen penguncian.

Perang regulasi adalah kondisi ketika aturan tidak lagi murni menjadi alat keadilan, tetapi aturan menjadi alat pengendalian. Negara yang rakyatnya dibatasi oleh regulasi yang kompleks, tetapi elite tertentu justru mudah bermanuver di dalam regulasi tersebut, sedang menghadapi persoalan serius. Karena regulasi yang buruk tidak selalu menindas secara kasar.

Kadang regulasi yang buruk melelahkan rakyat. Kadang regulasi yang buruk

membingungkan rakyat. Kadang regulasi yang buruk membuat rakyat menyerah karena merasa sistem terlalu besar untuk dilawan. Inilah bentuk penjajahan yang sangat canggih, yaitu ketika pembatasan terhadap rakyat dilakukan melalui mekanisme legal.

5. Perang Data



Di era digital, data adalah aset strategis yang nilainya sangat besar. Data bukan sekadar angka atau catatan teknis. Data adalah peta perilaku manusia. Data menunjukkan kebiasaan, preferensi, pola konsumsi, relasi sosial, pergerakan, hingga kecenderungan psikologis masyarakat.

Siapa yang menguasai data, orang tersebut memiliki kemampuan memahami masyarakat pada level yang belum pernah terjadi sebelumnya. Perang data adalah perang untuk menguasai pengetahuan tentang bangsa.

Jika data strategis suatu bangsa tidak dikelola dengan baik, tersebar, dikuasai pihak

luar, atau dipakai untuk membentuk perilaku masyarakat tanpa kesadaran masyarakat, maka ancaman terhadap kedaulatan menjadi sangat nyata.

Dalam era digital, data bahkan bisa lebih penting daripada wilayah fisik tertentu. Karena data memberi kekuatan prediksi. Dan prediksi memberi kekuatan kontrol. Bangsa yang gagal memahami pentingnya data akan menjadi objek, bukan subjek, dalam era digital.

6. Perang Elite Capture



Mungkin perang elite capture merupakan salah satu bentuk perang yang paling berbahaya, karena perang elite capture menyerang pusat pengambilan keputusan bangsa. Elite capture adalah kondisi ketika elite strategis di bidang kekuasaan, ekonomi, hukum, birokrasi, media, atau institusi lain perlahan lebih terhubung dengan kepentingan tertentu daripada dengan

kepentingan rakyat secara luas. Elite capture tidak selalu berbentuk korupsi vulgar karena kadang elite capture hadir dalam bentuk kedekatan kepentingan, loyalitas struktural, hubungan patronase, atau insentif yang membuat keputusan elite bergeser.

Perang elite capture sangat efektif karena perang ini tidak perlu menaklukkan seluruh bangsa, melainkan cukup mengendalikan mereka yang mengendalikan bangsa. Sejarah menunjukkan bahwa banyak bangsa tidak jatuh karena kekurangan rakyat baik, tetapi karena simpul-simpul strategis bangsa tersebut terlalu mudah dikooptasi. Ketika elite menjadi lebih sibuk menjaga orbit kekuasaan daripada menjaga rakyat, maka sistem kehilangan fungsi pengamanannya.

Jika kita membaca keenam bentuk perang ini secara terpisah, mungkin sebagian dari bentuk perang tersebut tampak seperti persoalan teknis biasa. Ekonomi dianggap urusan pasar. Jaringan dianggap dinamika sosial. Regulasi dianggap prosedur hukum. Data dianggap isu teknologi. Namun jika keenam bentuk perang ini dibaca sebagai satu pola besar, kita melihat sesuatu yang sangat serius yaitu bahwa ini adalah perang terhadap kedaulatan sistem. Bangsa tidak perlu dihancurkan dengan bom jika sistem bangsa tersebut bisa dikunci. Bangsa tidak perlu dijajah dengan tentara jika ekonomi bangsa tersebut bisa ditekan. Bangsa tidak perlu direbut

wilayahnya jika elite strategis bangsa tersebut bisa dikooptasi. Bangsa tidak perlu diperintah langsung jika regulasi bangsa tersebut sudah cukup membuat rakyat tidak berdaya. Inilah bentuk perang modern yang sangat efisien.

Dan ini baru bagian kedua karena serangan terhadap bangsa tidak berhenti pada pikiran, jiwa, atau sistem, melainkan serangan terhadap bangsa juga menyerang keberlangsungan hidup bangsa itu sendiri.

C. Serangan terhadap Keberlangsungan Bangsa

Jika pada bagian pertama kita membahas perang yang menyerang pikiran, budaya, dan jiwa, lalu pada bagian kedua kita melihat serangan terhadap sistem kedaulatan bangsa, maka pada bagian ini kita memasuki wilayah yang paling mendasar: serangan terhadap keberlangsungan hidup bangsa itu sendiri. Sebab sebuah bangsa tidak hanya hidup melalui ide dan sistem, tetapi juga melalui tanah yang sehat, generasi yang kuat, pangan yang cukup, kesehatan yang terjaga, komposisi penduduk yang stabil, dan identitas yang tidak tercerai-berai.

Di sinilah bentuk perang modern menjadi semakin kompleks. Karena target dari perang modern bukan lagi sekadar kekuasaan, tetapi masa depan biologis, sosial, dan peradaban bangsa.

1. Perang Lingkungan



Lingkungan hidup adalah fondasi paling dasar dari keberlangsungan bangsa. Udara yang bersih, air yang sehat, tanah yang produktif, hutan yang terjaga, laut yang Lestari, semuanya bukan isu pinggiran. Lingkungan hidup adalah soal hidup dan mati peradaban.

Namun dalam era modern, lingkungan justru sering menjadi korban dari model pembangunan yang tidak seimbang, eksploitasi berlebihan, tata kelola yang lemah, atau keputusan strategis yang lebih mementingkan keuntungan jangka pendek daripada keberlanjutan jangka panjang.

Perang lingkungan tidak selalu berarti ada pihak yang secara terang-terangan ingin menghancurkan alam. Kadang perang lingkungan bekerja melalui pembiaran. Kadang perang lingkungan bekerja melalui regulasi yang longgar. Kadang perang lingkungan bekerja melalui eksploitasi yang dilegalkan. Kadang

perang lingkungan bekerja melalui pembangunan yang tidak memperhitungkan daya dukung ekologis.

Dampak perang lingkungan sangat nyata. Polusi udara meningkatkan gangguan pernapasan, memperburuk kualitas hidup, bahkan berbagai penelitian menunjukkan hubungan antara polusi kronis dengan gangguan neurologis dan penurunan kualitas kesehatan jangka panjang. Air yang tercemar merusak kesehatan masyarakat. Hutan yang rusak memperparah bencana. Laut yang tercemar merusak rantai pangan.

Bangsa yang lingkungan hidupnya rusak sedang menghadapi perang jangka panjang. Karena kerusakan ekologis tidak hanya menyerang generasi hari ini, tetapi juga mencuri hak generasi mendatang.

2. Perang Pendidikan



Pendidikan adalah mesin pembentuk masa depan bangsa. Di dunia pendidikankah

generasi belajar berpikir, membangun karakter, memahami sejarah, mengenali identitas, dan menyiapkan diri menjadi warga negara yang bertanggung jawab. Namun pendidikan juga bisa menjadi alat pengendalian.

Perang pendidikan terjadi ketika sistem pendidikan lebih banyak membentuk kepatuhan teknis daripada kebebasan berpikir. Perang pendidikan terjadi ketika sekolah lebih fokus mencetak operator ekonomi daripada pembangun peradaban. Perang pendidikan terjadi ketika siswa dilatih menjawab soal, tetapi tidak diajak mempertanyakan sistem. Perang pendidikan terjadi ketika kreativitas dibatasi oleh standar seragam. Perang pendidikan terjadi ketika keberanian moral tidak menjadi prioritas.

Ini bukan berarti semua unsur dalam sistem pendidikan salah. Tetapi pertanyaan strategisnya apakah sistem pendidikan kita membentuk manusia merdeka atau sekadar manusia yang mudah disesuaikan?

Bangsa yang generasinya sangat terdidik secara teknis tetapi miskin kesadaran kebangsaan akan rapuh. Generasi tersebut mungkin produktif secara ekonomi, tetapi tidak cukup kuat secara peradaban. Pendidikan yang tidak membangun kemandirian berpikir dapat menjadi alat kolonisasi mental yang sangat halus.

3. Perang Pangan



Bangsa yang tidak mampu menjamin pangan bagi rakyatnya berada dalam posisi rentan. Pangan bukan sekadar komoditas ekonomi. Pangan adalah fondasi stabilitas sosial, keamanan nasional, kesehatan publik, dan martabat bangsa. Ketika pasokan pangan terganggu, harga melonjak, distribusi bermasalah, atau ketergantungan impor terlalu tinggi, maka kedaulatan bangsa ikut terancam.

Perang pangan bisa hadir melalui penguasaan rantai pasok, ketergantungan pada bibit tertentu, distribusi yang rapuh, permainan pasar, atau model pertanian yang membuat petani semakin lemah.

Jika bangsa kehilangan kedaulatan pangannya, maka keputusan strategis bangsa yang lain menjadi ikut terpengaruh. Karena rakyat yang lapar tidak memikirkan filsafat negara. Rakyat yang lapar memikirkan bertahan hidup. Karena itu, pangan adalah instrumen strategis. Bangsa yang tidak menjaga ketahanan

pangannya sedang membuka salah satu titik lemah paling serius.

4. Perang Kesehatan



Kesehatan masyarakat adalah benteng utama keberlangsungan bangsa. Bangsa yang rakyatnya sehat memiliki produktivitas, ketahanan sosial, daya tahan ekonomi, dan kualitas hidup yang lebih baik. Sebaliknya, bangsa yang lemah secara kesehatan akan menghadapi tekanan multidimensi.

Perang kesehatan dapat berbentuk banyak hal, seperti lemahnya sistem kesehatan, ketimpangan akses layanan, dominasi industri kesehatan tertentu, eksploitasi ketakutan publik, hingga kebijakan kesehatan yang kehilangan kepercayaan masyarakat.

Kita telah menyaksikan dalam sejarah modern bagaimana isu kesehatan dapat menjadi arena konflik global, sosial, ekonomi, dan narasi publik yang sangat intens. Pandemi menjadi

contoh nyata bagaimana kesehatan bukan sekadar isu medis, tetapi juga isu geostrategi, ekonomi, kebijakan publik, komunikasi massa, hingga kebebasan sipil.

Dalam konteks vaksin, penting untuk bersikap jernih dan proporsional. Vaksin secara ilmiah merupakan salah satu instrumen kesehatan publik yang telah digunakan luas untuk pencegahan penyakit tertentu. Namun pada saat yang sama, kebijakan kesehatan publik yang menyangkut vaksinasi massal, distribusi global, transparansi data, komunikasi risiko, hubungan antara negara dan industri farmasi, serta kepercayaan publik terhadap institusi kesehatan memang layak dibahas secara kritis dan terbuka.

Masalah dalam kebijakan kesehatan muncul bukan ketika ilmu digunakan untuk melindungi masyarakat, tetapi ketika komunikasi buruk, transparansi lemah, atau kebijakan kehilangan legitimasi sosial. Di titik itu, kesehatan berubah dari sekadar urusan medis menjadi medan konflik kepercayaan. Bangsa yang tidak memiliki kemandirian strategis di sektor kesehatan akan rentan terhadap tekanan besar ketika krisis datang.

5. Perang Demografi



Jumlah penduduk bukan sekadar statistik. Komposisi usia, kualitas generasi, distribusi penduduk, urbanisasi, angka kelahiran, migrasi, dan perubahan struktur keluarga semuanya memiliki implikasi strategis. Perang demografi terjadi ketika struktur penduduk bangsa berubah dengan cara yang melemahkan masa depan bangsa tersebut.

Generasi muda yang lemah kualitasnya adalah ancaman bagi keberlangsungan bangsa. Ketimpangan demografis yang ekstrem juga merupakan ancaman. Urbanisasi tanpa kesiapan menciptakan tekanan sosial. Struktur keluarga yang rapuh memengaruhi kualitas pembentukan manusia. Bahkan migrasi dan mobilitas penduduk bisa menjadi isu strategis dalam konteks tertentu. Bangsa besar membutuhkan strategi demografi yang sehat. Karena manusia adalah aset utama peradaban.

6. Perang Identitas



Bangsa tidak hanya hidup dari tanah dan ekonomi tetapi juga dari kesadaran tentang siapa dirinya. Identitas adalah perekat sosial yang membuat manusia merasa menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar. Namun identitas juga bisa menjadi medan konflik yang sangat destruktif jika dipolitisasi secara tidak sehat. Perang identitas terjadi ketika perbedaan agama, suku, budaya, kelas sosial, ideologi, atau orientasi kekuasaan terus-menerus dijadikan bahan polarisasi. Bangsa yang terlalu sibuk bertengkar tentang identitas akan kehilangan energi untuk membangun masa depan bersama.

Pluralitas Indonesia adalah kekayaan bangsa. Tetapi jika pluralitas tidak dikelola dengan kedewasaan, pluralitas juga bisa menjadi titik rawan kehancuran bangsa. Perang identitas tidak harus menghancurkan secara fisik karena perang identitas cukup membuat rakyat saling mencurigai, saling membenci, dan kehilangan

rasa kebangsaan bersama. Itu saja sudah cukup untuk melemahkan bangsa.

Jika kita melihat keseluruhan delapan belas bentuk perang ini, pola besarnya menjadi sangat jelas bahwa ini bukan kumpulan persoalan acak, ini bukan sekadar daftar isu sosial, melainkan sebuah gambaran tentang bagaimana sebuah bangsa dapat dilemahkan dari segala arah. Pikiran bangsa diserang. Budaya bangsa digeser. Spiritualitas bangsa dibelokkan. Ekonomi bangsa ditekan. Regulasi bangsa dikunci. Data bangsa dikuasai. Elite bangsa dikooptasi. Lingkungan bangsa dirusak. Generasi bangsa dibentuk. Pangan bangsa dibuat rentan. Kesehatan bangsa menjadi titik tekanan. Identitas bangsa dipolarisasi.

Dalam kondisi seperti ini, bangsa tidak sedang menghadapi satu perang melainkan sedang menghadapi perang multidimensi. Dan jika perang datang dari begitu banyak arah sekaligus, maka tidak mengherankan jika banyak rakyat merasa lelah, bingung, takut, atau kehilangan kemampuan untuk melihat gambaran besarnya. Karena itulah syair "Ranjau-ranjau sepanjang jalan" terasa begitu relevan. Ranjau-ranjau itu tidak hanya satu, tidak hanya dua, tetapi banyak. Dan semua ranjau itu ditempatkan di sepanjang perjalanan bangsa.

BAGIAN II – EMPAT PILAR YANG DISERANG

BAB 4
Ketika Otak Bangsa Dijajah, Serangan terhadap Kecerdasan Nasional (Intelektual)



Dalam sejarah panjang peradaban manusia, penaklukan terhadap sebuah bangsa hampir selalu dimulai dari satu hal yang sangat mendasar, yaitu melemahkan kemampuan berpikir bangsa tersebut. Sebab bangsa yang masih mampu berpikir jernih akan sulit ditipu, sulit diarahkan secara diam-diam, dan sulit menerima ketidakadilan sebagai sesuatu yang normal. Sebaliknya, bangsa yang kemampuan berpikirnya telah dilemahkan, meskipun secara fisik tampak bebas, akan jauh lebih mudah dikendalikan.

Karena itu, ketika kita berbicara tentang penjajahan modern, kita tidak bisa lagi membayangkan penjajahan modern hanya dalam bentuk perebutan wilayah atau tekanan ekonomi semata. Penjajahan modern bekerja jauh lebih halus. Salah satu target utama penjajahan modern adalah kecerdasan nasional, yaitu

kapasitas kolektif sebuah bangsa untuk memahami realitas, membaca arah sejarah, membedakan antara informasi dan manipulasi, mengenali struktur kekuasaan, serta merumuskan jalan keluarnya sendiri.

Kecerdasan nasional bukan sekadar soal banyaknya orang bergelar sarjana, jumlah universitas, atau tingkat literasi formal. Sebuah bangsa bisa memiliki banyak lembaga pendidikan, banyak ahli, banyak data, bahkan terlihat sangat modern, tetapi tetap mengalami kemunduran dalam kualitas berpikir kolektifnya. Karena kecerdasan nasional pada dasarnya adalah kemampuan sebuah masyarakat untuk berpikir secara merdeka, kritis, strategis, dan berakar pada kepentingan jangka panjang bangsanya.

Di sinilah kita harus memahami bahwa serangan terhadap kecerdasan nasional adalah salah satu bentuk perang paling strategis. Jika otak bangsa dapat dibuat bingung, sibuk, terpecah, atau terlatih untuk berpikir secara dangkal, maka langkah-langkah berikutnya dari pihak penyerang akan menjadi jauh lebih mudah. Bangsa seperti itu tidak perlu lagi dipaksa dengan kekerasan. Bangsa tersebut akan menyesuaikan diri dengan sendirinya.

Salah satu bentuk paling nyata dari serangan terhadap kecerdasan nasional adalah pembodohan sistemik. Istilah pembodohan sistemik tidak dimaksudkan sebagai penghinaan terhadap rakyat, melainkan sebagai kritik terhadap struktur yang secara perlahan membentuk masyarakat agar kehilangan kemampuan berpikir mendalam. Pembodohan sistemik tidak berarti masyarakat dibuat sama sekali tidak tahu.

Justru dalam banyak kasus, masyarakat diberi begitu banyak informasi, begitu banyak isu, begitu banyak distraksi, hingga masyarakat kehilangan kemampuan untuk memilah mana yang penting dan mana yang sekadar kebisingan.



Pembodohan modern tidak bekerja dengan menghapus pengetahuan. Pembodohan modern bekerja dengan membanjiri manusia dengan potongan-potongan pengetahuan yang terfragmentasi. Akibatnya, masyarakat mengetahui banyak hal secara parsial tetapi gagal melihat gambaran utuhnya. Masyarakat tahu berita hari ini, tetapi tidak memahami struktur yang melatarbelakangi berita tersebut. Masyarakat aktif berkomentar, tetapi tidak cukup waktu untuk merenung. Masyarakat merasa terhubung dengan banyak informasi, tetapi justru hidup dalam kebingungan.

Dalam kondisi seperti ini, kecerdasan kolektif bangsa perlahan berubah dari kemampuan berpikir mendalam menjadi kebiasaan bereaksi cepat. Yang dominan dalam masyarakat bukan refleksi, melainkan

respons spontan. Yang berkembang bukan analisis, melainkan opini instan. Kondisi ini sangat berbahaya, karena bangsa yang kehilangan kedalaman berpikir akan mudah diarahkan oleh siapa pun yang mampu menguasai arus perhatian publik.

Pembodohan sistemik juga sangat erat kaitannya dengan bagaimana pendidikan dirancang. Pendidikan pada dasarnya adalah instrumen pembentukan manusia. Pertanyaannya adalah manusia seperti apa yang sedang dibentuk oleh sistem pendidikan?

Dalam idealisme tertinggi, pendidikan seharusnya membebaskan manusia. Pendidikan yang sehat melatih akal, membangun karakter, menumbuhkan rasa ingin tahu, mengajarkan tanggung jawab moral, dan membentuk warga negara yang mampu berpikir mandiri. Pendidikan yang sehat tidak hanya mengajarkan cara menjawab pertanyaan, tetapi juga keberanian untuk mengajukan pertanyaan yang benar.

Namun dalam banyak sistem modern, pendidikan perlahan bergeser menjadi mesin produksi tenaga kerja. Fokus pendidikan semakin pragmatis, yaitu mencetak manusia yang mampu masuk ke pasar kerja, mengikuti instruksi, memenuhi target, dan menyesuaikan diri dengan kebutuhan ekonomi. Tentu tidak ada yang salah dengan menyiapkan generasi produktif. Masalah dari pergeseran pendidikan muncul ketika pendidikan kehilangan fungsi pembebasannya dan hanya menyisakan fungsi teknis.

Kemudian lahirlah apa yang dapat disebut sebagai pendidikan operator yaitu pendidikan yang

membentuk manusia untuk menjalankan sistem, tetapi tidak cukup melatih mereka untuk memahami, mengkritisi, atau merancang sistem itu sendiri. Anak-anak diajarkan menghafal tetapi tidak cukup diajarkan mempertanyakan.

Mereka dilatih menyelesaikan soal tetapi tidak cukup diajak membaca realitas. Mereka mengejar nilai tetapi tidak selalu dibimbing memahami makna. Mereka dipersiapkan menjadi bagian dari mesin ekonomi tetapi belum tentu dipersiapkan menjadi penjaga peradaban.

Dalam jangka panjang, pendidikan operator ini menciptakan masalah serius karena bangsa yang dipenuhi operator yang cakap tetapi minim kesadaran strategis akan sangat efektif menjalankan sistem yang ada, tetapi bangsa tersebut lemah dalam memperbaiki sistem yang rusak.

Selain pendidikan, serangan terhadap kecerdasan nasional juga berlangsung melalui media. Di era modern, media bukan sekadar saluran informasi melainkan arsitek persepsi. Apa yang dipilih oleh media untuk ditampilkan, bagaimana media membingkai sesuatu, isu apa yang diangkat oleh media, dan emosi apa yang dibangun oleh media, semuanya memengaruhi cara masyarakat berpikir. Dalam situasi ideal, media membantu publik memahami realitas.

Namun ketika logika pasar, kepentingan individu dan golongan, algoritma perhatian, dan kompetisi sensasi mendominasi media, media dapat berubah menjadi instrumen yang justru mempersempit kualitas berpikir publik. Masyarakat hidup dalam banjir

informasi tetapi masyarakat tidak selalu hidup dalam kejernihan informasi. Isu strategis kalah oleh sensasi di media. Diskursus mendalam kalah oleh potongan video singkat. Argumentasi kalah oleh slogan. Verifikasi kalah oleh kecepatan.



Dalam kondisi penguasaan media seperti ini, publik bukan hanya berisiko salah informasi tetapi juga kehilangan kebiasaan berpikir mendalam. Publik terbiasa mengonsumsi realitas dalam bentuk potongan-potongan pendek yang emosional. Kondisi ini membentuk pola pikir yang reaktif, bukan reflektif. Padahal bangsa yang besar membutuhkan rakyat yang mampu berpikir reflektif. Serangan terhadap kecerdasan nasional juga dapat datang dari sesuatu yang tampaknya tidak berhubungan langsung dengan intelektualitas yaitu tekanan ekonomi. Banyak orang tidak menyadari bahwa ekonomi memiliki dampak besar terhadap kualitas berpikir kolektif.

Manusia yang hidup dalam tekanan ekonomi berat tidak selalu memiliki ruang psikologis untuk berpikir strategis. Ketika perhatian sehari-hari manusia dipenuhi oleh kebutuhan dasar, biaya pendidikan, cicilan, pekerjaan yang tidak stabil, atau ketidakpastian masa depan, energi mental manusia menyempit. Ini bukan soal moralitas manusia melainkan realitas psikologis manusia. Seseorang yang terus-menerus berada dalam tekanan ekonomi akan cenderung fokus pada jangka pendek.

Horizon berpikir orang tersebut memendek, bukan karena orang itu tidak peduli, tetapi karena kapasitas mentalnya habis untuk bertahan hidup. Jika kondisi tekanan ekonomi ini terjadi secara luas, maka bangsa menghadapi persoalan besar karena rakyat yang terus lelah secara ekonomi akan sulit membangun kesadaran strategis. Dengan kata lain, perang ekonomi tidak hanya menyerang kesejahteraan rakyat tetapi juga menyerang kemampuan berpikir rakyat.

Bentuk serangan lain yang sangat halus terhadap kecerdasan nasional adalah melalui regulasi. Dalam teori, regulasi adalah instrumen keteraturan yang dibutuhkan agar kehidupan bersama berjalan adil dan tertib. Namun dalam praktik, regulasi yang terlalu rumit, tidak transparan, tumpang tindih, atau terasa jauh dari logika rakyat dapat menciptakan efek psikologis yang melemahkan nalar kritis. Masyarakat mulai merasa bahwa sistem regulasi terlalu kompleks untuk dipahami, terlalu besar untuk dipertanyakan, dan terlalu rumit untuk diubah. Akibatnya muncul dua

respons umum dari masyarakat yaitu kepatuhan pasif atau apatisme.

Dalam kedua kondisi itu, nalar kritis rakyat melemah. Rakyat berhenti mencoba memahami sistem regulasi karena merasa percuma. Rakyat menjalani sistem regulasi tanpa keterlibatan intelektual yang sehat. Inilah salah satu bentuk penjajahan modern yang sangat efektif yaitu bukan melarang berpikir, tetapi menciptakan struktur yang membuat berpikir terasa tidak berguna.

Pada era digital, ancaman baru terhadap kecerdasan nasional muncul melalui data. Ancaman melalui data mungkin merupakan salah satu bentuk paling canggih dari serangan terhadap kecerdasan nasional. Di masa lalu, pengendalian opini membutuhkan media yang terpusat. Kini, perilaku manusia dapat dipelajari secara detail melalui data.

Apa yang diklik oleh seseorang, apa yang dibeli, apa yang ditonton, apa yang dicari, siapa yang diikuti, kapan seseorang aktif, emosi seperti apa yang memicu respons, semuanya dapat dipetakan melalui data. Ketika data ini digabungkan dengan algoritma, terbentuk kemampuan untuk memengaruhi perilaku manusia secara sangat halus. Orang merasa memilih secara bebas padahal ruang pilihan orang tersebut telah dibentuk oleh algoritma. Orang merasa sedang mengikuti minat pribadinya padahal minat orang itu perlahan dibentuk oleh sistem rekomendasi.

Dalam konteks ini, kebebasan berpikir menghadapi tantangan yang belum pernah ada sebelumnya karena pengaruh terhadap kebebasan

berpikir tidak lagi selalu datang dalam bentuk propaganda kasar melainkan datang dalam bentuk personalisasi yang nyaman. Masyarakat bahkan bisa merasa bahwa sistem digital memahami diri mereka padahal justru di situlah kekuatan sistem digital tersebut.

Jika seluruh pola serangan terhadap kecerdasan nasional ini dibaca secara utuh, maka kita melihat bahwa penjajahan terhadap otak bangsa tidak bekerja melalui satu jalur tunggal melainkan bekerja melalui pendidikan yang terlalu teknokratis, media yang membentuk persepsi, tekanan ekonomi yang menyempitkan ruang berpikir, regulasi yang melelahkan, dan data yang mempelajari perilaku manusia.

Hasil akhir dari penjajahan terhadap otak bangsa bukanlah masyarakat yang sepenuhnya bodoh karena justru lebih berbahaya dari itu. Hasil akhirnya adalah masyarakat yang merasa tahu tetapi tidak benar-benar memahami, masyarakat yang aktif tetapi tidak strategis, masyarakat yang terhubung tetapi kehilangan kedalaman, dan masyarakat yang modern tetapi mudah diarahkan.

Padahal sejarah menunjukkan bahwa kebebasan sejati tidak dimulai dari kemerdekaan wilayah semata melainkan dari kemerdekaan berpikir. Karena bangsa yang otaknya telah dijajah akan kesulitan bahkan untuk menyadari bahwa bangsa tersebut sedang kehilangan arah.

BAB 5
Ketika Hati Bangsa Dibius, Serangan terhadap Spiritualitas (Rohaniawan)



Jika pada bab sebelumnya kita membahas bagaimana sebuah bangsa dapat dilemahkan melalui serangan terhadap kecerdasannya, maka pada bab ini kita memasuki wilayah yang jauh lebih halus, lebih sensitif, dan dalam banyak hal jauh lebih menentukan yaitu spiritualitas. Sebab manusia tidak hidup hanya dengan akal. Akal memberi kemampuan untuk memahami, menganalisis, dan merumuskan jalan keluar. Namun akal saja tidak cukup untuk membuat manusia berani. Ada banyak orang cerdas yang memahami ketidakadilan tetapi memilih diam. Ada banyak orang terdidik yang mampu membaca persoalan tetapi tidak memiliki keberanian moral untuk bertindak. Di titik itulah spiritualitas memainkan perannya.

Spiritualitas adalah wilayah tempat manusia membangun makna hidup, menemukan sumber keberanian, memahami tanggung jawab moral, menimbang benar dan salah, serta menjaga keteguhan ketika menghadapi tekanan. Jika akal adalah pusat analisis, maka hati adalah pusat orientasi. Dan jika orientasi hati itu dibelokkan, maka seseorang yang memiliki kecerdasan sekalipun bisa kehilangan arah.

Karena itu sepanjang sejarah, spiritualitas selalu menjadi arena perebutan yang sangat penting. Agama dan keyakinan spiritual telah melahirkan peradaban besar, menggerakkan perjuangan melawan penindasan, membentuk karakter manusia, serta memberi kekuatan luar biasa kepada mereka yang tertindas untuk tetap tegak. Namun justru karena kekuatan spiritualitas itulah spiritualitas juga rentan dimanfaatkan.



Yang perlu dipahami sejak awal adalah bahwa pembahasan ini bukan kritik terhadap agama karena justru sebaliknya, kritik ini ditujukan pada

penyalahgunaan agama atau pembelokan spiritualitas yang menjauhkan manusia dari fungsi moral spiritualitas yang sejati. Sebab agama yang sehat membangun manusia yang kuat, jernih, dan bertanggung jawab. Yang berbahaya adalah ketika agama atau spiritualitas justru dipersempit sedemikian rupa sehingga kehilangan daya transformasinya.

Salah satu bentuk paling nyata dari persoalan ini adalah manipulasi agama. Sejarah manusia menunjukkan bahwa simbol, bahasa, dan otoritas keagamaan dapat digunakan untuk berbagai tujuan. Ada kalanya agama benar-benar menjadi kekuatan pembebasan. Namun ada pula masa ketika tafsir keagamaan dipakai untuk membenarkan status quo, melindungi kepentingan tertentu, atau membungkam pertanyaan-pertanyaan moral yang seharusnya justru dihadirkan oleh agama.

Manipulasi agama tidak selalu hadir dalam bentuk yang kasar karena justru dalam bentuk yang paling efektif, manipulasi agama bekerja secara halus. Manipulasi agama tidak mengajak manusia meninggalkan agama melainkan justru mengajak manusia merasa sangat religius, tetapi dengan orientasi yang telah digeser.

Agama dipersempit menjadi ritual formal tanpa kesadaran sosial. Kesalehan diukur dari simbol, bukan dari kualitas moral. Ketaatan dipahami sebagai kepasifan, bukan tanggung jawab. Keberagamaan menjadi sangat personal tetapi kehilangan keberpihakan terhadap keadilan sosial. Dalam kondisi manipulasi agama seperti ini, agama tidak lagi menjadi

energi transformasi karena agama berubah menjadi identitas emosional yang nyaman tetapi minim daya korektif terhadap realitas.

Di sinilah muncul apa yang dapat disebut sebagai teologi pasif yaitu sebuah gambaran tentang cara berpikir keagamaan yang membuat manusia merasa bahwa tanggung jawab utamanya hanyalah menerima keadaan, bukan memperbaiki keadaan. Dalam teologi semacam ini, kehidupan sosial yang rusak sering diperlakukan seolah-olah sesuatu yang tidak perlu terlalu dipersoalkan. Ketidakadilan dianggap bagian dari takdir. Kerusakan sistem dianggap terlalu besar untuk disentuh.



Kritik sosial dipandang sebagai gangguan terhadap ketenangan spiritual. Teologi pasif melahirkan berbagai bentuk cara berpikir yang tampaknya religius tetapi sesungguhnya melumpuhkan keberanian moral. Masyarakat diajak fokus pada keselamatan personal

tetapi tidak cukup didorong memikirkan tanggung jawab sosial. Masyarakat didorong menjaga ibadah individual tetapi tidak selalu diajak memahami bahwa spiritualitas sejati juga menuntut keberpihakan terhadap keadilan.

Padahal dalam sejarah agama-agama besar, dimensi moral dan sosial justru sangat kuat. Para nabi tidak hanya berbicara tentang ritual tetapi juga tentang keadilan, amanah, tanggung jawab, kejujuran, perlindungan terhadap yang lemah, dan koreksi terhadap penyimpangan kekuasaan. Artinya spiritualitas sejati tidak identik dengan pasif. Namun ketika spiritualitas direduksi menjadi ketenangan individual tanpa kesadaran sosial, maka lahirlah masyarakat yang religius secara simbolik tetapi tidak cukup tangguh secara moral.

Salah satu nilai spiritual yang paling sering mengalami penyempitan makna adalah sabar. Dalam banyak tradisi keagamaan, sabar adalah nilai yang sangat luhur karena sabar menggambarkan keteguhan hati, daya tahan, konsistensi, dan kemampuan menjaga arah di tengah kesulitan. Sabar bukan kelemahan karena justru sabar adalah kekuatan. Namun dalam praktik sosial, makna sabar sering kali bergeser. Ada situasi ketika sabar tidak lagi dipahami sebagai keteguhan dalam perjuangan melainkan sebagai diam terhadap ketidakadilan. Ada konteks ketika sabar seolah berarti menerima segala keadaan tanpa ikhtiar memperbaiki.

Dalam bentuk penyempitan makna seperti itu, nilai sabar yang seharusnya menguatkan justru berubah

menjadi instrumen pelumpuhan. Ini bukan kesalahan konsep sabar itu sendiri karena yang bermasalah adalah penyempitan makna sabar. Sabar sejati tidak identik dengan menyerah. Sabar sejati tidak berarti membiarkan kerusakan terus berlangsung tanpa respons moral. Sabar sejati adalah kemampuan untuk tetap teguh dalam perjuangan yang benar, meskipun proses perjuangan itu berat dan panjang. Ketika masyarakat terus-menerus diajarkan sabar tanpa diajarkan tanggung jawab, keberanian, dan ikhtiar, maka nilai luhur sabar itu kehilangan keseimbangannya.

Hal serupa terjadi pada konsep syukur. Syukur adalah fondasi spiritual yang sangat penting karena syukur menjaga manusia dari keluhan yang destruktif, menumbuhkan keseimbangan jiwa, dan mengingatkan manusia pada nikmat yang dimilikinya. Namun seperti sabar, syukur juga bisa mengalami pembonsaian makna. Ada situasi ketika syukur seolah dimaknai sebagai larangan untuk mengkritik keadaan. Seakan-akan mempertanyakan ketidakadilan berarti tidak bersyukur. Seakan-akan menerima kondisi yang buruk tanpa upaya perbaikan adalah bentuk spiritualitas yang lebih tinggi.

Padahal syukur dan perjuangan tidak saling bertentangan. Seseorang bisa bersyukur atas hidup yang diberikan Tuhan sambil tetap bekerja keras memperbaiki lingkungan yang rusak. Seseorang bisa menerima nikmat hidup dengan penuh rasa terima kasih sambil tetap memiliki keberanian moral untuk menolak kezaliman. Ketika syukur direduksi menjadi

sekadar penerimaan pasif, maka spiritualitas kehilangan dimensi dinamisnya.

Jika manipulasi agama, teologi pasif, penyempitan sabar, dan pembonsaian syukur dibaca bersama, kita sampai pada sebuah konsep penting yang dapat disebut sebagai spiritual sedation atau pembiusan spiritual yaitu kondisi ketika spiritualitas yang seharusnya membangunkan manusia justru digunakan untuk menenangkan manusia secara berlebihan agar manusia kehilangan energi korektifnya.

Pembiusan spiritual tidak dilakukan melalui kekerasan karena tidak ada larangan beribadah dalam pembiusan spiritual, tidak ada serangan terbuka terhadap agama dalam pembiusan spiritual, dan justru sebaliknya segala sesuatu dalam pembiusan spiritual bisa tampak sangat religius. Orang tetap beribadah dalam kondisi pembiusan spiritual. Orang tetap menghadiri forum keagamaan dalam kondisi pembiusan spiritual. Orang tetap berbicara tentang nilai-nilai spiritual dalam kondisi pembiusan spiritual. Namun pada saat yang sama, sensitivitas moral terhadap ketidakadilan bisa melemah.

Inilah yang membuat fenomena pembiusan spiritual sangat halus karena manusia tidak merasa dirinya sedang dilemahkan. Manusia dalam kondisi pembiusan spiritual merasa sedang berada dalam kondisi spiritual yang baik padahal yang mungkin terjadi pada manusia tersebut adalah pengurangan keberanian moral. Spiritualitas yang sehat semestinya membuat manusia semakin jernih membaca realitas, semakin kuat menjaga integritas, semakin peduli pada

penderitaan sesama, dan semakin berani menegakkan kebenaran. Jika hasil akhir spiritualitas justru kepasifan, maka ada sesuatu yang perlu dikaji secara serius. Ini bukan berarti setiap sikap tenang adalah bentuk pembiusan spiritual atau setiap pendekatan spiritual yang menekankan kesabaran adalah keliru karena yang penting adalah keseimbangan. Spiritualitas membutuhkan kedalaman, bukan simplifikasi.

Bangsa yang spiritualitasnya sehat memiliki benteng moral yang sangat kuat karena bangsa tersebut tidak mudah dibeli, tidak mudah diintimidasi, dan tidak mudah kehilangan arah. Namun bangsa yang spiritualitasnya dibelokkan akan menghadapi persoalan yang lebih rumit daripada sekadar tekanan kekuasaan atau ekonomi. Karena ketika hati sebuah bangsa kehilangan keberanian moralnya, maka banyak hal lain ikut melemah.

Akal bangsa mungkin masih mampu membaca persoalan. Tetapi tanpa kekuatan hati, pemahaman tidak selalu berubah menjadi tindakan. Dan pada akhirnya, salah satu bentuk penjajahan paling halus bukanlah menghancurkan keyakinan manusia melainkan membelokkan keyakinan manusia cukup jauh sehingga keyakinan itu tidak lagi melahirkan tanggung jawab terhadap kehidupan bersama.

BAB 6
Ketika Jiwa Budaya Dilumpuhkan: Serangan terhadap Etika, Seni, dan Peradaban (Budayawan)



Jika pada bab-bab sebelumnya kita telah membahas bagaimana sebuah bangsa dapat dilemahkan melalui serangan terhadap kecerdasan dan spiritualitasnya, maka pada bab ini kita memasuki satu wilayah yang jauh lebih halus, tetapi justru sangat menentukan arah sebuah peradaban, yaitu budaya. Sebab sebuah bangsa tidak hanya hidup melalui sistem pemerintahan, kekuatan ekonomi, atau struktur pertahanannya. Semua unsur itu memang penting, tetapi tidak ada satu pun dari unsur tersebut yang mampu bertahan lama jika manusianya kehilangan karakter, kehilangan rasa hormat, kehilangan etika, kehilangan rasa malu, dan kehilangan kesadaran tentang siapa dirinya. Semua unsur itu tidak dibentuk

pertama-tama oleh undang-undang, melainkan oleh budaya.

Budaya adalah salah satu unsur yang paling sering disalahpahami. Banyak orang membayangkan budaya hanya sebagai kesenian tradisional, pakaian adat, upacara daerah, atau festival tahunan yang menampilkan kekayaan folklor sebuah bangsa. Pemahaman semacam ini terlalu dangkal. Budaya sesungguhnya jauh lebih dalam daripada simbol-simbol visual. Budaya adalah cara hidup. Budaya adalah sistem nilai yang bekerja diam-diam dalam membentuk manusia sehari-hari. Budaya menentukan bagaimana seseorang berbicara kepada orang tua, bagaimana seseorang menghormati ilmu, bagaimana seseorang memperlakukan perempuan, bagaimana seseorang memahami keluarga, bagaimana seseorang menyikapi perbedaan, bagaimana seseorang menempatkan kehormatan, bahkan bagaimana seseorang memaknai kesuksesan.

Dalam pengertian inilah budaya menjadi jiwa sosial sebuah bangsa. Jika akal adalah kemampuan berpikir bangsa, dan spiritualitas adalah orientasi batin bangsa, maka budaya adalah ekspresi hidup bangsa yang konkret. Budaya menentukan kualitas manusia yang dihasilkan oleh sebuah peradaban. Karena itu, ketika sebuah bangsa ingin dilemahkan secara mendalam, serangan terhadap budaya menjadi sangat strategis.

Bangsa yang budayanya rusak mungkin masih tampak berdiri secara administratif. Pemerintahan bangsa tersebut masih berjalan, ekonomi bangsa

tersebut mungkin masih bergerak, bahkan simbol-simbol kebangsaannya tetap terlihat. Namun secara perlahan, kualitas manusia dalam bangsa tersebut berubah. Dan ketika kualitas manusia berubah secara kolektif, yang sesungguhnya sedang bergeser adalah arah peradaban bangsa itu sendiri.



Di era modern, serangan terhadap budaya tidak datang dalam bentuk penghancuran terbuka. Tidak ada pasukan yang datang membakar panggung seni atau melarang bahasa tertentu secara frontal. Serangan budaya justru bekerja jauh lebih halus. Serangan budaya masuk melalui sesuatu yang tampak biasa, bahkan tampak menyenangkan yaitu melalui hiburan, tren, media sosial, figur publik, estetika visual, bahasa populer, simbol status, dan pola konsumsi. Karena serangan budaya tidak terasa seperti ancaman, justru itulah kekuatan serangan budaya.

Salah satu instrumen paling kuat dalam proses serangan budaya adalah budaya populer. Pada dasarnya, budaya populer adalah bagian alami dari kehidupan masyarakat modern. Musik, film, komedi, mode, konten digital, dan berbagai bentuk hiburan adalah ekspresi kreatif yang wajar. Peradaban besar pun selalu memiliki ekspresi budaya yang hidup. Persoalan serangan budaya bukan pada keberadaan budaya populer itu sendiri, melainkan pada dominasi nilai yang dibawa oleh budaya populer.

Dalam dunia digital, budaya populer tidak lagi sekadar hiburan. Budaya populer telah menjadi mesin pembentuk kesadaran sosial. Apa yang dilihat masyarakat setiap hari perlahan membentuk persepsi masyarakat tentang kehidupan. Apa yang terus-menerus dianggap menarik oleh budaya populer akan menjadi standar. Apa yang dipromosikan oleh budaya populer sebagai simbol kesuksesan akan menjadi cita-cita. Apa yang diberi panggung oleh algoritma budaya populer akan dianggap relevan. Dalam kondisi seperti ini, budaya populer tidak lagi sekadar mencerminkan masyarakat, tetapi mulai membentuk masyarakat.

Masalah serangan budaya muncul ketika budaya populer sepenuhnya dikendalikan oleh logika perhatian, sensasi, dan komersialisasi. Ketika sesuatu dihargai dalam budaya populer bukan karena kualitasnya, melainkan karena viralitasnya, maka orientasi masyarakat ikut berubah. Kedalaman mulai kalah oleh kecepatan. Substansi kalah oleh visual. Integritas kalah oleh pencitraan. Ketenaran mulai dianggap lebih penting daripada kualitas karakter.

Dalam jangka panjang, masyarakat terbiasa hidup dalam permukaan akibat dominasi budaya populer yang demikian. Masyarakat mengonsumsi realitas dalam bentuk potongan-potongan pendek, simbol visual, dan stimulasi cepat, tetapi kehilangan kemampuan untuk membangun kedalaman.

Dari situ muncul persoalan yang lebih besar, yaitu kaburnya identitas budaya. Setiap bangsa membutuhkan jangkar identitas. Kebutuhan akan jangkar identitas ini bukan berarti menolak perubahan atau menutup diri dari dunia luar. Bangsa yang sehat justru mampu belajar dari peradaban lain. Namun belajar berbeda dengan kehilangan diri. Bangsa yang memiliki identitas kuat mampu menyerap pengaruh luar tanpa tercerabut dari fondasi nilainya sendiri. Sebaliknya, bangsa yang identitasnya melemah cenderung meniru tanpa refleksi.



Ketika generasi muda lebih mengenal simbol budaya global daripada warisan peradabannya sendiri,

sesungguhnya sedang terjadi perubahan yang lebih besar daripada sekadar selera hiburan. Ketika standar keberhasilan semakin ditentukan oleh ukuran luar, ketika gaya hidup menjadi bentuk imitasi tanpa kesadaran, ketika cara berbahasa, cara berinteraksi, dan cara memandang kehidupan berubah tanpa refleksi, maka identitas budaya mulai mengalami erosi.

Bahaya dari identitas budaya yang kabur bukan hanya soal hilangnya nostalgia budaya. Bahaya identitas yang kabur jauh lebih serius, yaitu bangsa kehilangan fondasi psikologisnya. Sebuah bangsa yang tidak lagi memahami siapa dirinya akan mudah terombang-ambing oleh arus perubahan. Bangsa tersebut tidak lagi memiliki pusat gravitasi budaya yang cukup kuat untuk menilai mana pengaruh yang memperkaya dan mana pengaruh yang justru merusak. Akibatnya, modernitas tidak lagi menjadi proses pembelajaran bagi bangsa tersebut, melainkan proses imitasi.

Di tengah situasi kaburnya identitas budaya seperti itu, tumbuh subur salah satu orientasi budaya yang sangat problematik, yaitu hedonisme. Hedonisme bukan sekadar menikmati kenyamanan hidup. Menikmati hasil kerja keras adalah hal yang manusiawi. Persoalan hedonisme muncul ketika kenyamanan, kesenangan, kepuasan instan, dan validasi sosial menjadi pusat orientasi hidup. Dalam budaya hedonistik, ukuran kehidupan bergeser. Kesuksesan tidak lagi diukur dari kontribusi atau kualitas karakter, melainkan dari tampilan. Harga diri diukur dari konsumsi. Popularitas menjadi pengganti kehormatan.

Kepuasan jangka pendek menjadi standar utama pengambilan keputusan.

Budaya hedonistik seperti ini sangat melemahkan daya tahan bangsa. Sebab bangsa tidak dibangun oleh manusia yang hanya mengejar kenyamanan. Bangsa dibangun oleh manusia yang mampu menunda kenikmatan demi tujuan yang lebih besar, yang sanggup menjalani proses panjang, yang memiliki disiplin, kesederhanaan, dan kemampuan berkorban. Hedonisme justru mengikis seluruh kualitas itu. Hedonisme membentuk manusia yang cepat bosan, tidak tahan terhadap kesulitan, mudah dialihkan perhatiannya, dan lebih sibuk membangun citra daripada membangun substansi.

Namun kerusakan budaya tidak berhenti pada gaya hidup hedonistik. Ada persoalan yang jauh lebih mendalam, yaitu degradasi adab. Jika budaya adalah jiwa sosial sebuah bangsa, maka adab adalah struktur etika dari jiwa sosial tersebut. Adab bukan sekadar formalitas sopan santun, tetapi cara manusia menempatkan dirinya secara benar dalam kehidupan bersama. Adab menentukan bagaimana seseorang menghormati orang tua, bagaimana seseorang memperlakukan guru, bagaimana seseorang menyampaikan kritik, bagaimana seseorang menggunakan kekuasaan, bagaimana seseorang menahan diri, dan bagaimana seseorang menjaga martabat dirinya.

Ketika adab melemah, kerusakan budaya tidak selalu datang dalam bentuk yang spektakuler. Kerusakan adab hadir melalui perubahan-perubahan

kecil yang perlahan dianggap normal. Cara masyarakat berdiskusi menjadi lebih kasar. Perbedaan pendapat lebih mudah berubah menjadi permusuhan. Humor semakin sering dibangun di atas penghinaan. Ketidaksopanan mulai dipasarkan sebagai keberanian. Kebisingan dianggap sebagai kecerdasan. Agresivitas dianggap sebagai kejujuran.

Padahal peradaban tidak diukur dari seberapa keras orang berbicara, tetapi dari kualitas etika sebuah peradaban. Manusia yang cerdas tetapi tanpa adab dapat menjadi sangat berbahaya. Manusia yang religius tetapi kehilangan adab dapat berubah menjadi fanatik tanpa kebijaksanaan. Manusia yang memiliki kekuasaan tetapi tanpa adab dapat menjelma menjadi penindas. Karena itu, degradasi adab bukan persoalan etika sosial biasa. Degradasi adab adalah indikator bahwa jiwa budaya bangsa sedang melemah.

Jika seluruh gejala serangan terhadap budaya ini dibaca secara utuh, kita sampai pada konsep yang lebih besar, yaitu kolonisasi budaya. Kolonisasi budaya bukan berarti setiap unsur budaya luar adalah ancaman. Dunia memang saling terhubung, dan pertukaran budaya adalah bagian alami dari sejarah manusia. Yang menjadi persoalan dalam kolonisasi budaya adalah ketidakseimbangan, yaitu ketika budaya sendiri hanya dipelihara sebagai simbol seremonial, sementara kehidupan nyata dibentuk hampir sepenuhnya oleh nilai-nilai luar yang diterima tanpa proses refleksi.

Kolonisasi budaya terjadi ketika masyarakat lebih bangga meniru daripada mencipta. Ketika modernitas diartikan sebagai meninggalkan akar

budaya sendiri. Ketika identitas lokal dianggap sebagai hambatan, bukan sumber kekuatan. Ketika masyarakat tidak lagi memilih secara sadar, tetapi hanya mengikuti arus yang paling dominan.

Bentuk penjajahan kolonisasi budaya ini jauh lebih halus daripada kolonialisme klasik. Tidak ada ancaman militer dalam kolonisasi budaya. Tidak ada paksaan formal. Justru masyarakat merasa sedang menikmati kebebasan. Masyarakat merasa sedang mengikuti perkembangan zaman. Masyarakat merasa sedang menjadi bagian dari dunia modern. Padahal bisa jadi yang sedang terjadi pada masyarakat adalah pelepasan perlahan dari fondasi peradaban mereka sendiri.

Kolonisasi budaya bekerja seperti erosi. Kolonisasi budaya tidak menghancurkan sekaligus, tetapi mengikis sedikit demi sedikit. Rasa malu berkurang akibat kolonisasi budaya. Standar kehormatan bergeser. Orientasi hidup berubah. Karakter generasi menyesuaikan diri tanpa banyak kesadaran. Dan ketika proses kolonisasi budaya berlangsung cukup lama, bangsa bisa mengalami kemunduran peradaban tanpa pernah merasa sedang dijajah.

Karena pada akhirnya, sebuah bangsa tidak runtuh pertama-tama ketika gedung-gedungnya hancur atau ketika ekonominya terguncang. Bangsa mulai runtuh ketika manusianya kehilangan karakter, ketika etika dianggap kuno, ketika kehormatan kehilangan makna, ketika identitas menjadi kabur, dan ketika budaya tidak lagi membentuk manusia merdeka,

melainkan sekadar konsumen global. Dan ketika kemunduran budaya itu terjadi, yang sesungguhnya sedang hilang bukan sekadar budaya, melainkan jiwa bangsa itu sendiri.

SEKOLAH NEGARAWAN
SHIKSHAYATI RAJANITIVIDAM

BAB 7
Ketika Tulang Bangsa Dilemahkan: Serangan terhadap Jiwa Militer, Disiplin, dan Ketegasan (TNI/Polri)



Jika pada bab-bab sebelumnya kita telah membahas bagaimana sebuah bangsa dapat dilemahkan melalui serangan terhadap kecerdasan, spiritualitas, dan budayanya, maka pada bab ini kita memasuki unsur lain yang tidak kalah penting dalam menjaga keberlangsungan sebuah bangsa, yaitu daya tegak bangsa. Dalam analogi tubuh, unsur daya tegak ini adalah tulang. Tulang bukan bagian tubuh yang paling sering dibicarakan, tetapi tanpa tulang, tubuh tidak mampu berdiri. Tubuh kehilangan struktur, kehilangan daya topang, kehilangan ketegasan bentuk, dan pada akhirnya kehilangan kemampuan untuk bergerak dengan kokoh.

Dalam kehidupan berbangsa, fungsi semacam ini dijalankan oleh sesuatu yang dapat disebut sebagai jiwa pertahanan bangsa. Jiwa pertahanan bangsa bukan semata-mata tentang institusi militer atau kepolisian dalam pengertian administratif, melainkan tentang kualitas psikologis dan karakter kolektif yang menopang keberadaan sebuah bangsa, yaitu patriotisme, disiplin, keberanian, ketegasan, kesiapsiagaan, daya tahan menghadapi tekanan, dan naluri untuk mempertahankan martabat bersama.

Karena itu, ketika bab ini menggunakan istilah jiwa militer, yang dimaksud oleh bab ini bukanlah dominasi militerisme dalam kehidupan sipil, melainkan semangat dasar yang membuat sebuah bangsa mampu menjaga dirinya sendiri. Dalam pengertian ideal, semangat jiwa militer ini dekat dengan nilai-nilai keberanian, kedisiplinan, loyalitas terhadap kepentingan yang lebih besar, keteguhan dalam menghadapi ancaman, dan kesediaan untuk berkorban demi sesuatu yang melampaui kepentingan pribadi.

Bangsa yang cerdas tetapi kehilangan keberanian akan mudah ditekan. Bangsa yang religius tetapi kehilangan ketegasan akan mudah dipasifkan. Bangsa yang berbudaya tetapi kehilangan disiplin akan mudah terombang-ambing. Karena itu, serangan terhadap unsur jiwa pertahanan ini sangat strategis. Jika tulang bangsa berhasil dilemahkan, maka seluruh tubuh bangsa akan kehilangan daya tegaknya.

Salah satu tanda paling awal dari pelemahan jiwa pertahanan ini adalah melemahnya patriotisme. Patriotisme sering disalahpahami sebagai sekadar

simbolisme, slogan, atau ekspresi emosional terhadap bendera dan lagu kebangsaan. Padahal patriotisme dalam makna yang lebih mendalam adalah rasa keterikatan psikologis terhadap nasib bangsa, kesediaan menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dalam situasi-situasi tertentu, serta kesadaran bahwa kemerdekaan bukan sesuatu yang hadir begitu saja, melainkan sesuatu yang harus dijaga.



Bangsa yang memiliki patriotisme sehat tidak berarti hidup dalam nasionalisme sempit yang menutup diri dari dunia luar. Justru patriotisme yang matang adalah kesadaran dewasa tentang tanggung jawab kolektif terhadap tanah air. Patriotisme yang matang membuat masyarakat memiliki kepedulian terhadap masa depan bangsanya, tidak mudah acuh terhadap ancaman, dan tidak mudah menyerahkan ruang hidup bersama kepada kekuatan-kekuatan yang merugikan.

Namun dalam masyarakat modern, patriotisme dapat melemah secara perlahan. Pelemahan patriotisme

tidak selalu terjadi karena ada larangan mencintai bangsa, tetapi karena orientasi hidup masyarakat bergeser. Ketika manusia semakin dibentuk menjadi individu-individu yang hidup sepenuhnya dalam horizon kepentingan pribadi, kenyamanan pribadi, karier pribadi, dan keselamatan pribadi, maka keterikatan individu-individu tersebut terhadap nasib kolektif ikut menurun.

Generasi mulai lebih mengenal identitas digital daripada identitas kebangsaannya. Solidaritas sosial melemah. Kesadaran sejarah memudar. Bangsa tidak lagi dipahami sebagai rumah bersama, tetapi sekadar sebagai ruang administratif tempat seseorang hidup selama masih menguntungkan bagi orang tersebut.

Ketika pelemahan patriotisme itu terjadi, patriotisme tidak hilang secara formal tetapi kehilangan daya hidupnya. Dari melemahnya patriotisme, lahirlah persoalan yang lebih serius yaitu ketakutan kolektif. Ketakutan adalah bagian normal dari kemanusiaan karena tidak ada manusia yang sepenuhnya bebas dari rasa takut. Namun dalam konteks sosial-ekonomi, ketakutan dapat berkembang menjadi instrumen pelumpuhan yang sangat efektif. Bangsa yang hidup dalam rasa takut berkepanjangan akan sangat sulit membangun energi kolektif.

Ketakutan kolektif tidak selalu hadir dalam bentuk ancaman fisik terbuka karena ketakutan kolektif bisa muncul melalui tekanan ekonomi, ketidakpastian sosial, stigma, pengalaman melihat orang lain diserang, atau persepsi bahwa melawan sistem akan membawa konsekuensi yang terlalu besar. Masyarakat mulai

belajar diam dalam kondisi ketakutan kolektif, bukan karena masyarakat setuju dengan keadaan tetapi karena masyarakat menilai biaya berbicara terlalu mahal. Di titik ketakutan kolektif ini, ketakutan menjadi budaya diam.

Manusia memilih aman, memilih tidak terlibat, dan memilih menjaga jarak. Ini adalah bentuk pelemahan yang sangat dalam karena bangsa tidak memerlukan penindasan fisik besar-besaran untuk menjadi lumpuh. Cukup ciptakan persepsi bahwa berbicara terlalu berisiko, maka sebagian besar orang akan mengatur dirinya sendiri untuk diam.

Ketakutan kolektif pada akhirnya melahirkan apatisme rakyat. Apatisme berbeda dari ketidaktahuan karena orang yang apatis sering kali justru tahu ada persoalan. Mereka mungkin memahami bahwa ada ketidakadilan, kerusakan sistem, atau penyimpangan. Namun orang-orang yang apatis tidak lagi percaya bahwa keterlibatan mereka akan membuat perubahan. Ini adalah tahap apatisme yang sangat berbahaya. Karena ketika rakyat tidak tahu, pendidikan masih mungkin membangunkan rakyat. Ketika rakyat takut, solidaritas masih bisa menguatkan rakyat. Tetapi ketika rakyat sudah apatis, energi kolektif bangsa hampir habis.

Apatisme lahir dari akumulasi kekecewaan, kelelahan, ketidakpercayaan, dan pengalaman berulang bahwa suara individu tidak membawa perubahan berarti. Masyarakat yang apatis mulai berkata dalam hati, untuk apa peduli, untuk apa bersuara, untuk apa terlibat, untuk apa berharap. Ketika pertanyaan-

pertanyaan semacam ini menjadi perasaan massal, bangsa sedang kehilangan salah satu fondasi paling penting dalam kehidupan demokratis maupun kehidupan kebangsaan yaitu partisipasi rakyat. Apatisme membuat rakyat tidak lagi menjadi penjaga bangsanya sendiri karena rakyat yang apatis berubah menjadi penonton. Dan bangsa yang rakyatnya hanya menjadi penonton akan sangat mudah diarahkan oleh kelompok yang lebih aktif.

Namun puncak dari seluruh proses pelemahan ini adalah hilangnya jiwa pertahanan. Setiap bangsa yang ingin bertahan membutuhkan naluri mempertahankan dirinya. Dalam sejarah klasik, naluri mempertahankan diri ini tampak jelas melalui kesiapan bangsa menghadapi invasi fisik. Namun dalam dunia modern, ancaman tidak selalu datang dalam bentuk militer konvensional karena ancaman bisa hadir melalui ekonomi, budaya, informasi, teknologi, narkoba, manipulasi psikologis, ketergantungan strategis, bahkan perang data. Karena itu jiwa pertahanan bukan lagi semata urusan barak militer melainkan kesadaran kolektif bahwa bangsa harus mampu menjaga dirinya di berbagai medan perang modern.

Ketika jiwa pertahanan melemah, masyarakat mulai melihat ancaman sebagai sesuatu yang abstrak, jauh, atau bukan urusan mereka. Masyarakat menyerahkan seluruh tanggung jawab pertahanan kepada institusi formal tanpa membangun kesadaran bahwa pertahanan bangsa juga membutuhkan karakter masyarakat yang tangguh. Padahal bangsa yang benar-benar kuat bukan hanya bangsa yang memiliki alat

pertahanan tetapi bangsa yang rakyatnya memiliki mentalitas pertahanan. Mentalitas pertahanan ini mencakup keberanian menghadapi tekanan, kemampuan menjaga disiplin, loyalitas terhadap kepentingan bersama, kesiapan menahan kenyamanan demi tujuan yang lebih besar, dan naluri untuk melindungi ruang hidup kolektifnya.

Ketika semua unsur mentalitas pertahanan ini melemah, bangsa masih bisa tampak normal dari luar. Institusi bangsa masih ada. Simbol-simbol pertahanan bangsa masih berdiri. Upacara-upacara kebangsaan masih berlangsung. Tetapi secara psikologis, daya tegak bangsa mulai rapuh. Dan inilah bentuk pelemahan jiwa pertahanan yang sangat berbahaya karena tubuh bangsa tanpa tulang tidak perlu dihancurkan dari luar karena tubuh bangsa tanpa tulang cukup dibiarkan menopang bebannya sendiri sampai perlahan roboh.



Dalam kerangka buku ini, unsur yang diasosiasikan dengan semangat TNI dan Polri bukanlah

soal struktur kekuasaan administratif melainkan tentang kualitas karakter yang menjaga bangsa tetap tegak yaitu keberanian, disiplin, loyalitas, kesiapsiagaan, dan daya tahan. Jika unsur karakter ini melemah, maka bangsa tidak hanya kehilangan kemampuan melawan ancaman luar tetapi juga kehilangan keberanian menghadapi kerusakan dari dalam. Dan ketika sebuah bangsa kehilangan keberanian untuk menjaga dirinya sendiri, maka bentuk penjajahan paling efektif tidak lagi membutuhkan penaklukan terbuka karena bangsa yang kehilangan keberanian itu akan melumpuhkan dirinya sendiri.

BAGIAN III — MENGAPA RAKYAT LUMPUH

BAB 8
Delapan Tahap Pelumpuhan Bangsa

Setelah memahami bagaimana sebuah bangsa dapat dilemahkan melalui serangan terhadap kecerdasannya, spiritualitasnya, budayanya, hingga daya tegak pertahanannya, kita sampai pada pertanyaan yang paling mendasar sekaligus paling menyakitkan adalah mengapa rakyat yang jumlahnya begitu besar justru sering kali tampak tidak berdaya menghadapi berbagai bentuk ketidakadilan, penyimpangan, dan kerusakan sistem yang sesungguhnya merugikan rakyat sendiri?

Pertanyaan ini penting, karena tanpa menjawab pertanyaan ini secara jujur, kita akan mudah terjebak pada kesimpulan-kesimpulan dangkal. Ada yang menyebut rakyat malas. Ada yang mengatakan rakyat tidak peduli. Ada yang menuduh rakyat pengecut. Ada pula yang merasa masyarakat memang sudah terlalu nyaman sehingga masyarakat tidak lagi memiliki semangat perjuangan. Namun cara pandang semacam itu terlalu sederhana, bahkan dalam banyak hal itu tidak adil. Sebab kelumpuhan sosial tidak lahir secara spontan. Kelumpuhan sosial bukan kondisi alamiah sebuah bangsa. Kelumpuhan sosial adalah hasil dari proses panjang yang berlangsung sedikit demi sedikit, sering kali nyaris tak terlihat, tetapi sangat efektif dalam membentuk kondisi psikologis kolektif.



Sebuah bangsa tidak menjadi lumpuh dalam satu malam. Kesadaran bangsa tidak runtuh sekaligus. Keberanian bangsa tidak hilang dalam satu kejadian. Harapan bangsa tidak padam dalam satu generasi. Semua proses pelumpuhan itu biasanya terjadi melalui tahapan yang saling berkaitan, di mana setiap tahap

memperlemah kemampuan rakyat untuk bertindak, sampai pada titik ketika banyak orang yang sesungguhnya menyadari adanya persoalan, tetapi merasa tidak lagi memiliki tenaga, ruang, atau keyakinan bahwa perubahan masih mungkin diperjuangkan.

Dalam konteks itulah, pelumpuhan bangsa dapat dipahami melalui delapan tahap. Delapan tahap ini bukan model matematis yang kaku, melainkan kerangka untuk membaca bagaimana rakyat sebagai pemilik kedaulatan dapat perlahan bergeser menjadi pihak yang justru tidak mampu menggunakan kedaulatannya sendiri.

Tahap pertama adalah ketika rakyat tidak sadar bahwa dirinya sedang dirugikan. Tahap pertama ini adalah tahap paling awal sekaligus paling strategis, karena tidak ada perlawanan tanpa kesadaran. Manusia hanya akan bergerak ketika manusia itu memahami bahwa ada sesuatu yang salah. Jika seseorang tidak menyadari dirinya sebagai pihak yang dirugikan, maka orang tersebut tidak akan merasa perlu membela dirinya.

Dalam masyarakat modern, kerugian tidak selalu hadir dalam bentuk yang mudah dikenali. Kerugian tidak selalu berupa penindasan fisik yang kasat mata atau perampasan yang terang-terangan. Justru dalam banyak kasus, bentuk kerugian yang paling efektif adalah kerugian yang dibungkus sebagai kewajaran. Pelayanan publik yang buruk dianggap hal biasa. Tekanan ekonomi yang terus meningkat diterima sebagai realitas hidup yang tidak bisa diubah.

Pendidikan yang tidak membebaskan dianggap sebagai standar normal. Informasi yang manipulatif diterima sebagai hiburan. Regulasi yang merugikan dianggap terlalu rumit untuk dipahami.

Karena semua proses pembungkusan kerugian itu berlangsung perlahan, masyarakat beradaptasi dengan kerugian tersebut. Ketidakberesan tersebut mengakibatkan hilangnya efek kejut bagi masyarakat. Yang abnormal berubah menjadi normal bagi masyarakat. Yang seharusnya dipertanyakan oleh masyarakat justru diterima sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Dalam kondisi adaptasi seperti ini, pelumpuhan telah dimulai, bukan karena rakyat tidak memiliki kecerdasan, tetapi karena sensitivitas rakyat terhadap kerugian telah dikikis secara perlahan.

Tahap kedua pelumpuhan terjadi ketika rakyat mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang salah, tetapi rakyat tidak tahu bagaimana cara melawan. Kesadaran mulai tumbuh pada diri rakyat, namun kesadaran itu belum memiliki arah. Seseorang mungkin mulai memahami bahwa ada ketimpangan, bahwa ada kebijakan yang tidak berpihak, bahwa ada struktur yang terasa tidak adil, atau bahwa kehidupan sosial-ekonomi berjalan dalam cara yang merugikan kepentingan publik. Namun setelah kesadaran itu muncul, persoalan baru segera hadir pada diri orang tersebut, yaitu apa yang harus dilakukan?

Kesadaran tanpa arah sering kali justru melahirkan frustrasi pada diri seseorang. Orang mulai memahami persoalannya, tetapi tidak memiliki peta jalan untuk bertindak. Mereka tidak tahu harus

bergerak ke mana. Tidak tahu mekanisme apa yang efektif. Tidak tahu siapa yang bisa dipercaya. Tidak tahu apakah jalur formal sungguh dapat digunakan. Tidak tahu apakah perjuangan akan membawa hasil atau justru memperburuk keadaan.

Dalam situasi kebingungan seperti itu, kebingungan menjadi alat pelumpuhan yang sangat efektif. Sebab masyarakat yang bingung jarang mampu membangun tindakan strategis. Masyarakat yang bingung mungkin gelisah, tetapi kegelisahan yang tidak terarah tidak otomatis melahirkan perubahan.

Tahap ketiga pelumpuhan muncul ketika rakyat sebenarnya tahu jalannya, tetapi rakyat takut melawan. Tahap ketiga ini adalah tahap yang sangat manusiawi, karena ketakutan bukan selalu tanda kelemahan moral. Dalam banyak kasus, ketakutan justru merupakan respons rasional terhadap risiko yang nyata.

Seseorang mungkin memahami hak-haknya. Orang itu mungkin tahu jalur hukum, tahu cara membangun opini, tahu bagaimana menyampaikan kritik, bahkan tahu bahwa ada hal-hal yang secara prinsip perlu dikoreksi. Namun pengetahuan itu tidak otomatis berubah menjadi tindakan, karena di hadapan kesadaran itu muncul perhitungan lain yang jauh lebih personal bagi orang tersebut.

Bagaimana jika pekerjaan orang itu hilang, bagaimana jika keluarga orang itu terkena dampak, bagaimana jika orang itu dikucilkan, bagaimana jika orang itu menghadapi tekanan dari kekuatan yang jauh lebih besar, dan bagaimana jika perjuangan orang itu justru membawa kerugian yang tidak mampu

ditanggung. Dalam titik inilah ketakutan menjadi penghambat yang sangat nyata. Banyak orang memilih diam bukan karena mereka setuju dengan keadaan tetapi karena mereka menilai harga dari perlawanan terlalu mahal. Dan ketika ketakutan menjadi perasaan kolektif masyarakat, pelumpuhan bergerak ke tahap yang lebih dalam.

Tahap keempat pelumpuhan terjadi ketika keberanian mulai muncul pada sebagian rakyat tetapi keberanian itu berdiri sendirian. Tahap keempat ini adalah salah satu fase paling berat dalam setiap perjuangan sosial. Ada orang-orang yang sadar, ada orang-orang yang memahami persoalan, dan ada orang-orang yang memiliki keberanian moral. Namun mereka merasa terisolasi karena tidak ada jaringan pendukung yang cukup kuat bagi mereka, tidak ada perlindungan, tidak ada solidaritas yang nyata, dan tidak ada kepastian bahwa langkah mereka tidak akan berakhir sia-sia.

Padahal manusia, seberani apa pun, tetap memiliki batas. Keberanian individual sangat penting tetapi keberanian yang terus-menerus terisolasi akan mudah berubah menjadi kelelahan. Banyak orang yang sebenarnya memiliki keberanian tetapi mundur karena merasa sendirian menghadapi sistem yang terlalu besar. Di titik isolasi ini, persoalannya bukan kekurangan orang baik melainkan ketiadaan struktur yang menopang keberanian orang-orang baik tersebut.

Tahap kelima pelumpuhan adalah ketika struktur perlawanan mulai terbentuk tetapi regulasi telah mengunci ruang gerak. Tahap kelima ini adalah

salah satu bentuk pelumpuhan modern yang paling canggih karena berbeda dengan penindasan kasar, pelumpuhan tahap ini bekerja melalui legitimasi formal. Kadang masyarakat berhasil membangun organisasi, forum, jaringan, atau bentuk solidaritas tertentu. Namun ketika seluruh ruang perubahan dibatasi oleh sistem regulasi yang terlalu kompleks, prosedur yang terlalu berlapis, atau struktur hukum yang sangat sempit dalam memberi ruang koreksi, energi kolektif masyarakat kembali melemah.

Secara formal semuanya tampak sah, tampak legal, dan tampak berjalan sesuai prosedur. Namun secara substantif, ruang perubahan terasa sangat kecil. Dalam situasi kebuntuan seperti itu, muncul rasa buntu pada masyarakat. Masyarakat mulai percaya bahwa seluruh jalur telah dikunci, bahwa sistem terlalu besar untuk disentuh, dan bahwa segala sesuatu telah dirancang agar perubahan hampir mustahil dilakukan. Entah persepsi masyarakat ini sepenuhnya objektif atau tidak, efek psikologis dari persepsi tersebut nyata karena ketika masyarakat kehilangan keyakinan bahwa perubahan dapat diperjuangkan secara efektif, motivasi kolektif masyarakat turun drastis.

Tahap keenam pelumpuhan terjadi ketika moral masyarakat mulai dilemahkan oleh budaya populer. Pada tahap keenam ini, persoalannya tidak lagi sekadar struktural tetapi kultural. Budaya populer yang sangat berorientasi pada kenyamanan, hiburan, sensasi, konsumsi, dan kepuasan instan perlahan mengubah orientasi hidup masyarakat. Perjuangan selalu membutuhkan disiplin, pengorbanan, kesabaran, dan

kemampuan menunda kenyamanan demi tujuan yang lebih besar. Namun budaya populer yang terus-menerus mendorong manusia mengejar kesenangan cepat justru melemahkan kualitas-kualitas perjuangan itu.

Masyarakat menjadi lebih sibuk dengan kehidupan personalnya, lebih mudah teralihkan oleh hiburan, lebih cepat lelah terhadap proses panjang perjuangan, dan lebih fokus pada kenyamanan individual. Dalam kondisi pengaruh budaya populer seperti ini, daya tahan moral masyarakat melemah bukan karena masyarakat tiba-tiba menjadi buruk tetapi karena orientasi hidup masyarakat telah digeser secara perlahan oleh budaya populer.

Tahap ketujuh pelumpuhan terjadi ketika iman mulai dibius oleh tafsir keagamaan yang pasif. Tahap ketujuh ini adalah bentuk pelumpuhan yang sangat halus karena pelumpuhan tahap ini bekerja melalui sesuatu yang seharusnya justru menjadi sumber kekuatan yaitu spiritualitas. Ketika nilai-nilai agama dipahami secara sempit, energi moral bangsa dapat melemah dari dalam. Kesabaran tidak lagi dipahami sebagai keteguhan dalam perjuangan tetapi sebagai alasan untuk diam. Syukur tidak lagi dipahami sebagai kesadaran spiritual yang sehat tetapi sebagai pembenaran untuk menerima semua keadaan tanpa koreksi. Tawakal dipersempit menjadi kepasrahan tanpa ikhtiar. Dalam situasi pembiusan tafsir seperti ini, spiritualitas kehilangan daya transformasinya karena spiritualitas tidak lagi membangunkan umat tetapi justru menenangkan umat secara berlebihan. Orang-

orang yang secara spiritual tulus tetap merasa religius tetapi kehilangan keberanian moral untuk merespons ketidakadilan sosial. Ini bukan kelemahan agama sebagai ajaran melainkan persoalan tafsir keagamaan yang menjinakkan energi perubahan.

Tahap kedelapan adalah tahap paling sempurna sekaligus paling berbahaya dalam pelumpuhan bangsa yaitu tunduk total. Tahap kedelapan ini bukan berarti seluruh rakyat menyukai keadaan karena sering kali justru banyak rakyat yang diam-diam tidak setuju dengan keadaan. Namun mereka telah sampai pada titik di mana energi perlawanan hampir habis. Mereka menyesuaikan diri dengan keadaan, menurunkan harapan, mencari keselamatan pribadi, belajar hidup di dalam sistem yang ada, menghindari risiko, dan tidak lagi percaya bahwa perubahan sungguh mungkin terjadi. Inilah bentuk pelumpuhan paling efektif karena pelumpuhan tahap tunduk total tidak memerlukan penindasan fisik terbuka. Ketika rakyat sampai pada kesimpulan bahwa tunduk adalah pilihan paling realistis, maka sistem tidak lagi membutuhkan kekerasan besar untuk mempertahankan dirinya.

Jika delapan tahap pelumpuhan ini dibaca secara utuh, kita akan memahami bahwa kelumpuhan bangsa bukan terutama lahir karena rakyat secara alami lemah melainkan kelumpuhan bangsa adalah hasil dari proses panjang yang menyerang kesadaran, arah, keberanian, solidaritas, ruang gerak, moral, spiritualitas, dan harapan secara bersamaan. Rakyat pertama-tama dibuat tidak sadar. Ketika rakyat mulai sadar, rakyat dibuat bingung. Ketika rakyat memahami jalannya,

rakyat dibuat takut. Ketika rakyat berani, rakyat dibuat sendirian. Ketika rakyat mulai membangun struktur, sistem terasa tertutup bagi rakyat.

Ketika moral rakyat masih tersisa, budaya populer melemahkan moral rakyat. Ketika iman rakyat masih hidup, tafsir pasif membius iman rakyat. Dan pada akhirnya yang tersisa pada diri rakyat adalah adaptasi terhadap keadaan. Di titik adaptasi inilah kita memahami bahwa penjajahan modern tidak selalu membutuhkan rantai di tangan atau penjara fisik karena ketika kesadaran, keberanian, dan harapan telah dilumpuhkan, manusia dapat tampak hidup bebas tetapi sesungguhnya manusia tersebut telah kehilangan kemampuan untuk bertindak sebagai pemilik kedaulatannya sendiri.

SHIKSHAYATI RAJANITIVIDAM

BAB 9
Mengapa Tidak Banyak yang Bertahan?

Setelah memahami tahapan-tahapan pelumpuhan bangsa, kita sampai pada satu pertanyaan yang sangat manusiawi sekaligus sangat penting, yaitu mengapa dalam situasi seperti itu tidak banyak orang yang mampu bertahan? Jika ancaman terhadap bangsa begitu nyata, jika berbagai bentuk ketidakadilan dapat dirasakan, jika kerusakan sistem dapat dibaca oleh sebagian masyarakat, lalu mengapa tidak muncul lebih banyak orang yang mampu menjaga kejernihan, keberanian, dan keteguhan secara konsisten?

Pertanyaan ini penting dijawab dengan jujur, karena tanpa kejujuran, kita akan mudah terjebak pada cara berpikir yang terlalu sederhana. Kita bisa tergoda menyimpulkan bahwa masyarakat tidak peduli, tidak cukup berani, atau memang tidak memiliki semangat perjuangan. Kita juga bisa membayangkan bahwa ketika sebuah persoalan sudah tampak jelas, maka orang-orang secara otomatis akan bergerak membela persoalan tersebut. Padahal realitas sosial tidak sesederhana itu. Dalam kehidupan nyata, manusia bukan makhluk yang sepenuhnya rasional, sepenuhnya konsisten, atau sepenuhnya tahan terhadap tekanan.

Justru sebaliknya, manusia adalah makhluk yang memiliki keterbatasan, kerentanan, kebutuhan, rasa takut, kelelahan, dan berbagai pertimbangan yang sering kali membuat idealisme seseorang harus berhadapan dengan realitas hidup sehari-hari.

Pada titik ini, kita perlu menerima satu kenyataan mendasar bahwa manusia pada dasarnya adalah makhluk yang rapuh. Kerentanan manusia itu bukan kelemahan moral yang harus dicemooh, melainkan bagian dari realitas kemanusiaan. Setiap manusia memiliki batas. Ada batas energi manusia, batas ekonomi manusia, batas psikologis manusia, batas keberanian manusia, batas daya tahan sosial manusia, bahkan batas spiritual manusia.

Manusia yang tampak sangat kuat sekalipun tetap hidup di dalam tubuh yang bisa lelah, di dalam lingkungan yang bisa menekan, dan di dalam sistem sosial yang bisa membuat manusia kehilangan arah. Karena itu, ketika kita berbicara tentang perjuangan bangsa, kita tidak sedang berbicara tentang makhluk ideal yang hidup di ruang steril tanpa tekanan. Kita berbicara tentang manusia nyata dengan segala kompleksitasnya.

Inilah sebabnya mengapa strategi pelumpuhan bangsa modern bekerja dengan sangat efektif. Strategi pelumpuhan modern tidak menyerang manusia hanya dari satu arah. Jika ancaman hanya datang dari satu titik pada manusia, peluang seseorang untuk bertahan masih relatif besar. Orang yang mengalami tekanan ekonomi, misalnya, mungkin masih bisa bertahan jika orang tersebut memiliki kekuatan spiritual yang matang dan lingkungan sosial yang mendukung. Orang yang menghadapi manipulasi informasi mungkin masih mampu menjaga kejernihan jika orang tersebut memiliki pendidikan yang sehat dan kebiasaan berpikir kritis. Orang yang mengalami tekanan sosial mungkin

masih berani jika orang tersebut memiliki solidaritas kolektif yang kuat.

Namun persoalannya, serangan terhadap manusia modern hampir tidak pernah datang secara tunggal. Yang terjadi justru adalah serangan simultan dari berbagai arah sekaligus. Pada saat yang sama, seseorang bisa menghadapi tekanan ekonomi yang menyempitkan ruang berpikirnya, hidup di dalam lingkungan media yang manipulatif, dibentuk oleh budaya populer yang dangkal, menghadapi regulasi yang terasa rumit dan tidak bersahabat, serta menerima narasi spiritual yang justru mengajarkan kepasifan. Dalam kondisi serangan simultan seperti ini, daya tahan manusia tidak diuji pada satu titik, melainkan di banyak titik sekaligus.

Di sinilah kita memahami bahwa kehancuran sosial tidak selalu membutuhkan kehancuran total individu. Seseorang tidak harus kalah di semua medan untuk menjadi lumpuh. Cukup jika seseorang jatuh pada satu atau dua titik strategis, maka seluruh sistem pertahanan orang tersebut dapat melemah. Seorang yang sangat cerdas secara intelektual, misalnya, belum tentu memiliki keberanian moral untuk menghadapi risiko sosial.

Seorang yang sangat berani belum tentu memiliki kejernihan strategis untuk membedakan perjuangan yang efektif dari tindakan emosional yang justru merugikan. Seorang yang sangat religius belum tentu bebas dari manipulasi tafsir yang membuat orang tersebut menerima keadaan secara pasif. Seorang yang memiliki kesadaran budaya yang baik belum tentu

cukup kuat menghadapi tekanan ekonomi yang terus-menerus menguras energi orang tersebut.

Karena itu, kita tidak boleh membangun asumsi yang terlalu romantis tentang manusia. Tidak realistis membayangkan bahwa mayoritas masyarakat secara bersamaan akan memiliki kombinasi ideal berupa kecerdasan yang matang, keberanian yang konsisten, spiritualitas yang jernih, karakter budaya yang kuat, ketahanan ekonomi yang cukup, serta daya tahan psikologis yang tinggi. Kombinasi semacam itu sangat mungkin ada pada individu tertentu, tetapi secara sosial, jumlah individu dengan kombinasi ideal tersebut memang cenderung terbatas.

Sejarah manusia justru menunjukkan bahwa mayoritas orang hidup dalam ruang kompromi. Banyak yang memiliki niat baik, tetapi energi mereka habis untuk bertahan hidup. Banyak yang memahami persoalan, tetapi tidak memiliki keberanian menghadapi risiko dari pemahaman tersebut. Banyak yang berani, tetapi cepat lelah karena merasa sendirian dalam keberaniannya. Banyak yang religius, tetapi spiritualitas mereka lebih diarahkan pada keselamatan personal daripada tanggung jawab sosial. Banyak yang cerdas, tetapi kecerdasan mereka terserap sepenuhnya untuk menyelesaikan persoalan hidup pribadi.

Dalam konteks kerapuhan manusia inilah, pertanyaan tentang mengapa tidak banyak yang bertahan menjadi jauh lebih masuk akal. Bukan karena manusia secara umum tidak memiliki kualitas baik, melainkan karena tekanan yang mereka hadapi terlalu kompleks untuk ditaklukkan hanya dengan satu

kekuatan. Perjuangan melawan satu bentuk tekanan saja sudah sulit bagi manusia. Apalagi jika seseorang harus secara bersamaan mempertahankan kejernihan berpikir, keberanian moral, stabilitas ekonomi, kesehatan spiritual, daya tahan budaya, dan kekuatan psikologis dalam lingkungan yang terus-menerus menekan dari berbagai arah.

Jika kita membacanya dari perspektif probabilitas sosial, fenomena kelangkaan manusia yang bertahan ini bahkan menjadi lebih mudah dipahami. Bayangkan kualitas-kualitas yang dibutuhkan agar seseorang mampu bertahan sepenuhnya dalam situasi tekanan multidimensi seperti ini. Seseorang harus cukup cerdas untuk mengenali manipulasi. Seseorang harus cukup mandiri secara ekonomi untuk tidak mudah dikendalikan oleh tekanan ekonomi. Seseorang harus cukup kuat secara spiritual, tetapi tidak terjebak dalam tafsir yang pasif. Seseorang harus cukup berani untuk menghadapi risiko sosial. Seseorang harus cukup disiplin untuk bertahan dalam perjuangan jangka panjang. Seseorang harus cukup sehat secara budaya untuk tidak hanyut dalam distraksi. Dan seseorang juga harus cukup terhubung secara sosial agar tidak berjuang sendirian.

Masing-masing kualitas manusia ini saja sudah sulit dibangun dan dipertahankan. Ketika semua kualitas tersebut harus hadir secara bersamaan dalam satu individu, maka secara sosial jumlah orang yang mampu mempertahankan semua kualitas tersebut memang tidak akan besar. Ini bukan bentuk pesimisme

terhadap rakyat, melainkan pengakuan realistis terhadap kompleksitas perjuangan manusia.

Karena itu, sejarah perubahan besar hampir tidak pernah dimulai dari mayoritas yang tiba-tiba tercerahkan secara serentak. Perubahan biasanya justru dimulai dari kelompok kecil yang berhasil menjaga kualitas-kualitas tersebut lebih lama daripada lingkungan sekitarnya. Kelompok kecil ini bukan selalu manusia sempurna, tetapi kelompok kecil ini memiliki kombinasi kesadaran, kejernihan, keberanian, dan daya tahan yang relatif lebih kuat dibanding mayoritas.

Bab ini bukan ditulis untuk meremehkan rakyat, melainkan untuk memahami realitas manusia dengan jujur. Sebab strategi perubahan yang dibangun di atas asumsi keliru tentang manusia akan mudah gagal. Jika kita membayangkan bahwa kebenaran yang jelas otomatis melahirkan keberanian massal, kita akan kecewa. Jika kita berasumsi bahwa kesadaran intelektual otomatis menghasilkan perjuangan kolektif, kita akan salah membaca kenyataan. Jika kita berpikir bahwa religiusitas formal otomatis melahirkan keteguhan moral, kita akan terjebak dalam simplifikasi.

Kenyataannya, mayoritas manusia memang akan jatuh pada satu atau beberapa titik tekanan. Ada manusia yang jatuh karena rasa takut. Ada manusia yang jatuh karena kelelahan ekonomi. Ada manusia yang jatuh karena distraksi budaya. Ada manusia yang jatuh karena kebingungan. Ada manusia yang jatuh karena kesendirian. Ada manusia yang jatuh karena manipulasi spiritual.

Dan kegagalan manusia untuk bertahan di semua titik itu tidak membuat mereka kehilangan martabat sebagai manusia. Kegagalan tersebut justru menunjukkan betapa seriusnya medan perjuangan yang sedang dihadapi oleh manusia.

Di titik inilah kita memahami mengapa perjuangan bangsa sering terasa seperti jalan yang sunyi. Bukan karena kebenaran tidak ada, melainkan karena kombinasi kualitas yang dibutuhkan untuk tetap tegak dalam tekanan multidimensi memang sangat sulit ditemukan dalam jumlah besar. Namun justru karena kombinasi kualitas itu langka, kehadiran sedikit orang yang mampu bertahan menjadi sangat penting. Sebab dalam banyak titik sejarah, arah sebuah bangsa tidak selalu ditentukan oleh jumlah terbesar, melainkan oleh minoritas kecil yang tetap mampu menjaga kejernihan ketika mayoritas mulai bingung, tetap mampu berdiri ketika mayoritas mulai lelah, dan tetap mampu berharap ketika mayoritas mulai menyerah.

SHIKSHAYATI RAJANITIVIDAM

BAB 10
Seribu dari Tiga Ratus Juta (Minoritas yang Menjaga Bangsa)



Setelah memahami betapa kompleksnya proses pelumpuhan sebuah bangsa, kita sampai pada satu pertanyaan yang secara emosional terasa berat, tetapi secara strategis sangat penting, yaitu jika mayoritas manusia memang rentan jatuh pada satu atau beberapa titik tekanan, lalu siapa yang akan menjaga bangsa?

Pertanyaan ini tidak ringan. Pertanyaan ini bukan sekadar pertanyaan golongan. Pertanyaan ini menyentuh lapisan terdalam dari kehidupan manusia, karena bangsa tidak hanya dijaga oleh konstitusi, aparat, partai politik, lembaga negara, atau prosedur demokrasi. Bangsa pada akhirnya dijaga oleh manusia-manusia yang masih mampu mempertahankan kejernihan akal, keberanian moral, ketahanan spiritual,

dan kesetiaan terhadap kebenaran ketika sebagian besar manusia lain mulai menyerah kepada tekanan keadaan.

Di sinilah muncul satu kenyataan yang sering kali tidak enak didengar, bahwa tidak semua orang sanggup menjaga bangsa. Tidak semua orang sanggup memikul beban sejarah. Tidak semua orang sanggup tetap jernih ketika informasi dimanipulasi. Tidak semua orang sanggup tetap berani ketika risiko menjadi terlalu mahal. Tidak semua orang sanggup tetap lurus ketika jalan hidup dibelokkan oleh kebutuhan ekonomi, ketakutan sosial, tafsir agama yang pasif, budaya populer yang melemahkan, dan sistem kekuasaan yang menekan.

Karena itu, setelah memahami delapan tahap pelumpuhan bangsa, kita perlu berani menatap satu kemungkinan yang menyakitkan, bahwa dari ratusan juta rakyat, yang benar-benar mampu bertahan sebagai penjaga bangsa mungkin jumlahnya tidak banyak. Bukan jutaan. Bukan ratusan ribu. Mungkin hanya ribuan. Bahkan secara simbolik, buku ini menyebutnya sebagai seribu dari tiga ratus juta.

Angka seribu dari tiga ratus juta tentu bukan angka statistik resmi. Angka ini bukan hasil sensus, bukan hasil survei akademik, dan bukan klaim matematis yang kaku. Angka seribu dari tiga ratus juta adalah angka simbolik untuk membantu memahami satu kenyataan sosial, bahwa manusia yang mampu lolos dari seluruh lapisan pelumpuhan bangsa memang akan menjadi minoritas yang sangat kecil.

Sebagian orang mungkin segera menolak angka ini sebagai terlalu pesimistis. Tiga ratus juta rakyat

Indonesia, lalu hanya seribu yang benar-benar mampu menjaga bangsa? Sekilas, angka itu terdengar ekstrem. Tetapi jika delapan tahap pelumpuhan bangsa dibaca kembali secara jujur, angka itu tidak lagi terasa berlebihan.



Rakyat pertama-tama dibuat tidak sadar. Ketika mulai sadar, rakyat dibuat bingung. Ketika memahami

jalannya, rakyat dibuat takut. Ketika berani, rakyat dibuat sendirian. Ketika mulai membangun struktur, ruang geraknya dikunci. Ketika moral masih tersisa, budaya populer melemahkannya. Ketika iman masih hidup, tafsir pasif membiusnya. Dan ketika harapan terakhir mulai padam, rakyat akhirnya dipaksa beradaptasi dengan keadaan.

Jika seseorang harus lolos dari seluruh tahap itu, maka syarat menjadi penjaga bangsa memang sangat berat. Seseorang harus cukup cerdas untuk mengenali manipulasi informasi. Seseorang harus cukup kuat untuk tidak larut dalam kebingungan. Seseorang harus cukup berani untuk menghadapi risiko. Seseorang harus cukup tahan menghadapi kesendirian. Seseorang harus cukup tekun membangun struktur. Seseorang harus cukup merdeka secara moral dari budaya populer yang melemahkan. Seseorang harus cukup matang secara spiritual agar agama tidak berubah menjadi obat tidur sosial. Dan seseorang harus cukup kuat menjaga harapan ketika keadaan di sekitarnya tampak gelap.

Jika satu kualitas saja sulit dipertahankan, apalagi ketika semua kualitas itu harus hadir bersamaan dalam diri manusia yang sama. Di sinilah dasar perhitungan simbolik seribu dari tiga ratus juta dapat dijelaskan. Misalnya peluang seseorang untuk lolos dari satu tahap pelumpuhan dianggap lima puluh persen. Angka lima puluh persen ini sebenarnya sudah sangat optimistis, karena dalam kenyataan sosial, peluang manusia untuk lolos dari tekanan ekonomi, tekanan kekuasaan, tekanan sosial, tekanan informasi, dan tekanan budaya bisa jauh lebih kecil daripada itu.

Namun untuk kepentingan simulasi sederhana, kita gunakan angka lima puluh persen. Jika dalam Bab 3 disebut ada delapan belas medan perang yang harus dilalui oleh manusia bangsa, maka peluang seseorang untuk lolos dari seluruh delapan belas medan perang itu adalah:

0,5 pangkat 18 = 0,0000038

Jika diubah ke dalam persen, hasilnya kira-kira: 0,00038 persen

Artinya, dari setiap satu juta orang, yang benar-benar lolos dari delapan belas lapisan penyaringan itu hanya sekitar tiga sampai empat orang. Jika angka itu diterapkan kepada tiga ratus juta penduduk, hasilnya kurang lebih:

300.000.000 × 0,0000038 = 1.140 orang

Maka angka seribu dari tiga ratus juta bukan sekadar dramatisasi. Angka itu lahir dari satu simulasi logis bahwa jika setiap medan perjuangan menyaring manusia, dan setiap tahap pelumpuhan mengurangi jumlah orang yang mampu bertahan, maka jumlah akhir penjaga bangsa memang akan menyusut sangat tajam.

Sekali lagi, perhitungan ini bukan statistik ilmiah yang dimaksudkan untuk mengukur jumlah pasti manusia penjaga bangsa. Perhitungan ini adalah cermin. Cermin untuk membantu kita memahami bahwa menjaga bangsa bukan pekerjaan ringan. Tidak semua orang yang marah mampu bertahan. Tidak semua orang yang sadar mampu bergerak. Tidak semua orang yang berani mampu konsisten. Tidak semua

orang yang religius mampu memiliki keberanian moral. Tidak semua orang yang pintar mampu merdeka dari kepentingan. Tidak semua orang yang bicara tentang bangsa benar-benar sanggup mengorbankan kenyamanan pribadi demi masa depan bangsa.



Dalam sejarah kenabian pun, pola minoritas ini bukan hal asing. Para nabi tidak memulai perjuangan dari jumlah besar. Para nabi justru sering berdiri dengan jumlah pengikut yang sedikit, bahkan sangat sedikit. Yang besar bukan jumlah awalnya, melainkan kualitas kesetiaan, keteguhan, dan keberanian moral yang dijaga oleh kelompok kecil itu.

Al-Qur'an menyebut bahwa Nabi Musa memilih tujuh puluh orang dari kaumnya untuk suatu pertemuan yang telah ditentukan. Tujuh puluh orang itu bukan seluruh bangsa, melainkan kelompok kecil yang dipilih dari komunitas besar Bani Israil. Angka tujuh puluh dalam kisah Nabi Musa menunjukkan bahwa dalam momentum tertentu, yang dibawa ke titik ujian bukan massa besar, melainkan kelompok kecil yang dianggap mewakili kualitas tertentu.

Kisah Nabi Nuh bahkan lebih menyentuh. Nabi Nuh berdakwah sangat lama, tetapi Al-Qur'an menggambarkan bahwa yang beriman bersama Nabi Nuh hanya sedikit. Al-Qur'an tidak memberikan angka pasti dalam ayat tersebut, tetapi menegaskan kualitas minoritasnya, yaitu bahwa mereka yang ikut dalam bahtera bukan mayoritas kaumnya, melainkan kelompok kecil yang tetap percaya ketika mayoritas memilih menolak.

Kisah Talut dan Jalut juga memberi pelajaran yang sangat kuat. Pasukan Talut disaring melalui ujian sungai. Banyak yang minum dan gugur secara moral dari barisan. Hanya sedikit yang tetap bertahan. Kemudian dari yang sedikit itu masih muncul ketakutan menghadapi Jalut dan pasukannya. Tetapi orang-orang yang yakin kepada perjumpaan dengan Allah berkata bahwa betapa banyak kelompok kecil dapat mengalahkan kelompok besar dengan izin Allah.

Dalam sejarah Nabi Muhammad, Perang Badar juga menjadi contoh bahwa jumlah kecil tidak selalu berarti kelemahan. Dalam hadis Sahih Muslim disebutkan bahwa pada hari Badar, jumlah pasukan musyrik sekitar seribu, sedangkan sahabat Nabi berjumlah tiga ratus sembilan belas orang. Dalam ukuran militer biasa, jumlah itu tidak seimbang. Tetapi sejarah tidak hanya ditentukan oleh jumlah. Sejarah juga ditentukan oleh kualitas keyakinan, kepemimpinan, strategi, keteguhan, dan pertolongan Allah.

Dari kisah-kisah ini kita belajar bahwa jalan kebenaran hampir tidak pernah dimulai oleh mayoritas.

Mayoritas sering datang belakangan, setelah arah mulai terlihat, setelah kemenangan mulai terasa mungkin, setelah risiko mulai tampak lebih ringan, atau setelah keberanian minoritas membuka jalan. Pada tahap awal, yang menjaga api biasanya hanya sedikit orang. Sedikit dalam jumlah, tetapi besar dalam fungsi. Sedikit dalam statistik, tetapi menentukan dalam sejarah.

Maka angka seribu dari tiga ratus juta tidak boleh dibaca sebagai penghinaan terhadap rakyat. Angka ini bukan kalimat untuk merendahkan mayoritas. Angka ini justru ajakan untuk memahami realitas perjuangan secara lebih jujur. Mayoritas rakyat tetap penting. Mayoritas adalah tubuh besar bangsa. Tetapi tubuh besar membutuhkan saraf kesadaran. Tubuh besar membutuhkan mata yang melihat arah. Tubuh besar membutuhkan jantung yang tetap memompa keberanian. Tubuh besar membutuhkan jiwa yang tidak mati. Seribu penjaga bangsa adalah simbol dari saraf, mata, jantung, dan jiwa itu.

Dalam teori sosial, kelompok seperti ini dapat disebut sebagai minoritas strategis. Minoritas strategis adalah kelompok kecil yang secara jumlah tidak dominan, tetapi memiliki kapasitas pengaruh yang jauh lebih besar daripada proporsi jumlahnya. Mereka bukan minoritas karena ingin memisahkan diri dari rakyat. Mereka menjadi minoritas karena tidak semua orang sanggup memikul disiplin yang sama, kejernihan yang sama, dan risiko yang sama.

Minoritas strategis bukan elite yang memandang rakyat dari atas. Minoritas strategis adalah penjaga api di tengah gelap. Mereka menjaga ide ketika ide sedang

ditertawakan. Mereka menjaga keberanian ketika keberanian dianggap berbahaya. Mereka menjaga arah ketika banyak orang bingung. Mereka menjaga moral ketika moral dijual murah. Mereka menjaga spiritualitas ketika agama dipersempit menjadi kepasrahan tanpa ikhtiar. Mereka menjaga harapan ketika banyak orang mulai mengatakan bahwa perubahan tidak mungkin lagi dilakukan.

Di sinilah konsep node kesadaran menjadi penting. Bangsa tidak selalu bangkit melalui ledakan kesadaran massal yang serentak. Lebih sering, kebangkitan bangsa dimulai dari titik-titik kecil yang tetap hidup ketika lingkungan sekitarnya gelap. Node kesadaran adalah individu atau kelompok yang menjaga kejernihan berpikir, integritas moral, dan orientasi perjuangan, sehingga ketika momentum sosial datang, masyarakat memiliki tempat untuk berkonsolidasi.

Tanpa node-node kesadaran, kemarahan rakyat mudah menjadi kebisingan. Kritik rakyat mudah berubah menjadi kelelahan. Gerakan rakyat mudah pecah menjadi fragmentasi. Kesadaran rakyat mudah menguap karena tidak ada struktur yang menampungnya. Tetapi ketika ada minoritas strategis yang menjaga kontinuitas gagasan, membangun jaringan, dan merawat arah perjuangan, energi sosial memiliki peluang untuk berubah menjadi gerakan yang konstruktif.

Karena itu, bangsa tidak cukup hanya memiliki rakyat yang banyak. Bangsa membutuhkan rakyat yang sadar. Bangsa tidak cukup hanya memiliki penduduk

yang besar. Bangsa membutuhkan manusia-manusia yang sanggup menjadi penjaga akal sehat publik. Bangsa tidak cukup hanya memiliki pemilih dalam pemilu. Bangsa membutuhkan pemilik kedaulatan yang mengerti bahwa kedaulatan bukan hanya hak memilih, tetapi juga tanggung jawab menjaga arah negara.

Di titik ini kita perlu membedakan antara elite kekuasaan dan elite moral. Elite kekuasaan adalah mereka yang memiliki posisi dalam struktur kekuasaan formal. Mereka memiliki jabatan, kewenangan, akses terhadap anggaran, akses terhadap institusi, dan kemampuan memengaruhi keputusan negara. Dalam sistem modern, elite kekuasaan memang diperlukan. Negara tidak bisa berjalan tanpa struktur formal, tanpa lembaga, tanpa pemerintahan, tanpa administrasi, dan tanpa mekanisme pengambilan keputusan.

Namun posisi formal tidak otomatis melahirkan kualitas moral. Jabatan tidak otomatis melahirkan kejernihan. Kekuasaan tidak otomatis melahirkan kebijaksanaan. Bahkan dalam banyak keadaan, kekuasaan yang tidak dikendalikan oleh moral justru dapat berubah menjadi alat perusak bangsa.

Sebaliknya, elite moral adalah mereka yang memiliki otoritas karena integritas, kejernihan berpikir, konsistensi perjuangan, dan kepercayaan sosial. Elite moral tidak selalu memiliki jabatan. Elite moral tidak selalu duduk di kursi kekuasaan. Elite moral bisa datang dari guru, ulama, budayawan, akademisi, petani, pengusaha, aktivis, prajurit, seniman, ibu rumah tangga, anak muda, atau siapa saja yang hidupnya memberi arah bagi orang lain.

Bangsa yang sehat membutuhkan elite kekuasaan dan elite moral sekaligus. Tetapi ketika elite kekuasaan kehilangan orientasi moral, sering kali elite moral yang harus menjaga arah bangsa. Ketika lembaga formal gagal menjadi rumah keadilan, orang-orang bermoral harus menjaga agar gagasan tentang keadilan tidak ikut mati. Ketika negara tampak berjalan tetapi kehilangan jiwa, minoritas penjaga bangsa harus memastikan bahwa jiwa bangsa masih tetap hidup.

Seribu penjaga bangsa tidak berarti seribu orang yang berkumpul dalam satu organisasi. Tidak harus begitu. Seribu penjaga bangsa bisa tersebar. Ada yang menjaga gagasan melalui tulisan. Ada yang menjaga keberanian melalui advokasi. Ada yang menjaga moral melalui pendidikan. Ada yang menjaga spiritualitas melalui tafsir yang membebaskan. Ada yang menjaga struktur melalui organisasi. Ada yang menjaga data dan pengetahuan melalui riset. Ada yang menjaga rakyat melalui pelayanan. Ada yang menjaga masa depan melalui teknologi. Ada yang menjaga kedaulatan melalui pengorbanan sunyi yang tidak pernah masuk berita.

Mereka mungkin tidak saling mengenal pada awalnya. Mereka mungkin bekerja di tempat berbeda, dengan bahasa berbeda, metode berbeda, dan jalur perjuangan berbeda. Tetapi mereka disatukan oleh satu hal, yaitu penolakan untuk menyerah kepada pelumpuhan bangsa.

Seribu penjaga bangsa adalah mereka yang tetap sadar ketika banyak orang dibuat tidak sadar. Tetap mencari arah ketika banyak orang dibuat bingung.

Tetap berani ketika banyak orang dibuat takut. Tetap membangun solidaritas ketika banyak orang dibuat sendirian. Tetap mencari celah perjuangan ketika ruang gerak dikunci. Tetap menjaga moral ketika budaya populer melemahkan daya tahan. Tetap menjadikan iman sebagai energi perubahan ketika tafsir pasif membius masyarakat. Tetap menjaga harapan ketika banyak orang mulai tunduk total kepada keadaan.

Jalan mereka hampir pasti sunyi. Tidak ramai. Tidak populer. Tidak selalu dipahami. Tidak selalu didukung. Bahkan sering kali dicurigai, disalahpahami, ditinggalkan, atau dianggap terlalu keras kepala. Tetapi sejarah sering bergerak dari kesunyian seperti itu. Sejarah tidak selalu dimulai dari panggung besar. Sejarah sering dimulai dari percakapan kecil, lingkaran kecil, tulisan kecil, keberanian kecil, keputusan kecil, dan kesetiaan kecil yang dijaga terus-menerus sampai waktunya tiba.

Karena itu, ketika buku ini menyebut seribu dari tiga ratus juta, yang sedang dibicarakan bukan angka literal. Yang sedang dibicarakan adalah harapan. Harapan bahwa dalam bangsa sebesar ini, masih ada manusia-manusia yang tidak selesai hanya sebagai penonton. Masih ada manusia-manusia yang tidak puas hanya menjadi korban. Masih ada manusia-manusia yang tidak rela kedaulatan rakyat berubah menjadi slogan kosong. Masih ada manusia-manusia yang bersedia menjaga bangsa ketika menjaga bangsa tidak memberi keuntungan langsung bagi hidupnya.

Seribu dari tiga ratus juta adalah metafora tentang minoritas yang menolak padam. Minoritas yang

tidak menunggu mayoritas sadar lebih dulu untuk mulai bergerak. Minoritas yang paham bahwa tugas menjaga bangsa tidak selalu dimulai dengan kemenangan, tetapi dimulai dengan kesetiaan. Kesetiaan kepada kebenaran. Kesetiaan kepada rakyat. Kesetiaan kepada masa depan. Kesetiaan kepada Tuhan yang menitipkan akal, nurani, dan keberanian dalam diri manusia.

Pada akhirnya, bangsa tidak hanya membutuhkan jumlah penduduk. Bangsa membutuhkan penjaga. Bangsa tidak hanya membutuhkan pemilih. Bangsa membutuhkan pemilik kedaulatan. Bangsa tidak hanya membutuhkan keramaian. Bangsa membutuhkan kejernihan. Dan jika kejernihan itu pada awalnya hanya dijaga oleh seribu orang dari tiga ratus juta, maka seribu itu tidak boleh diremehkan.

Sebab dalam sejarah, cahaya tidak harus sebesar matahari untuk mengalahkan gelap pertama kali. Kadang cukup satu nyala kecil yang tidak mau padam. Dari nyala kecil itulah api dapat dijaga. Dari api yang dijaga itulah arah dapat ditemukan. Dari arah yang ditemukan itulah bangsa dapat kembali berjalan.

BAGIAN IV – JALAN SUNYI

BAB 11
Akhirnya Kutempuh Jalan yang Sunyi



Setelah memahami bagaimana sebuah bangsa dapat dilumpuhkan secara perlahan melalui serangan terhadap kecerdasan, spiritualitas, budaya, daya tegak pertahanannya, hingga proses psikologis yang membuat rakyat kehilangan kemampuan kolektif untuk bergerak, kita sampai pada satu kenyataan yang tidak selalu nyaman untuk diterima, yaitu perjuangan yang paling mendasar sering kali tidak dimulai dari keramaian. Perjuangan mendasar tidak selalu lahir dari dukungan massal, tepuk tangan publik, atau pengakuan sosial yang cepat. Justru dalam banyak peristiwa sejarah, fase paling menentukan dari sebuah perjuangan sering kali berlangsung dalam kesunyian.

Kesunyian yang dimaksud dalam bab ini tentu bukan sekadar kesendirian fisik. Jalan sunyi bukan tentang seseorang yang benar-benar berjalan tanpa

manusia lain di sekelilingnya. Jalan sunyi adalah pengalaman eksistensial ketika seseorang atau sekelompok kecil manusia memilih tetap menjaga kesadaran, integritas, dan orientasi perjuangan di tengah lingkungan sosial yang belum memiliki sensitivitas yang sama. Jalan sunyi adalah keadaan ketika seseorang melihat persoalan yang belum dianggap persoalan oleh banyak orang, merasakan ancaman yang belum dibaca sebagai ancaman oleh masyarakat luas, atau memikul tanggung jawab yang belum dipahami sebagai sesuatu yang mendesak.

Dalam pengertian ini, kesunyian bukan pertama-tama soal jumlah manusia yang hadir di sekitar seseorang, melainkan soal kesamaan kesadaran antara seseorang dan lingkungannya. Seseorang bisa berada di tengah keramaian, dikelilingi oleh banyak orang, aktif dalam kehidupan sosial, bahkan berada di dalam struktur formal tertentu, tetapi orang tersebut tetap mengalami kesunyian karena orientasi batinnya tidak bertemu dengan kesadaran kolektif di sekitarnya. Kesunyian semacam ini jauh lebih berat daripada sekadar sepi secara fisik, karena kesunyian ini menyentuh kebutuhan mendasar manusia untuk dipahami, diterima, dan merasa bahwa apa yang dilihat oleh seseorang juga dapat dirasakan oleh orang lain.

Di titik inilah makna jalan sunyi menjadi relevan dalam pembahasan tentang perjuangan bangsa. Sebab jika kita menerima bahwa manusia pada dasarnya adalah makhluk yang rentan, bahwa mayoritas masyarakat dapat mengalami pelumpuhan di berbagai titik tekanan, dan bahwa hanya sebagian kecil populasi

yang mampu mempertahankan kejernihan serta keberanian dalam tekanan multidimensi, maka secara alami mereka yang tetap bertahan akan menempati posisi minoritas kesadaran.



Menjadi bagian dari minoritas kesadaran bukanlah sesuatu yang romantis dalam kehidupan nyata. Dalam wacana intelektual, gagasan tentang menjadi kelompok kecil yang sadar mungkin terdengar mulia. Namun dalam pengalaman manusia sehari-hari, posisi minoritas kesadaran seperti itu sering kali sangat melelahkan. Manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial. Manusia tidak hanya membutuhkan keyakinan intelektual, tetapi juga resonansi sosial. Manusia ingin tahu bahwa apa yang dilihat oleh dirinya bukan ilusi. Manusia ingin merasa bahwa kegelisahannya masuk akal. Manusia ingin menemukan orang lain yang memahami bahasa batinnya.

Ketika seseorang mulai melihat persoalan yang belum dianggap serius oleh mayoritas, tekanan

psikologis yang muncul pada diri orang tersebut tidak kecil. Orang itu bisa mulai mempertanyakan dirinya sendiri. Apakah dirinya terlalu berlebihan? Apakah kekhawatirannya tidak proporsional? Apakah yang ia lihat sungguh nyata, atau hanya hasil dari cara berpikir yang terlalu curiga? Dalam banyak kasus, yang paling melelahkan dalam jalan perjuangan bukan selalu tekanan dari lawan yang jelas, melainkan keraguan yang tumbuh akibat tidak adanya resonansi sosial yang cukup.

Karena itu, banyak orang yang sebenarnya memiliki kesadaran awal akhirnya memilih kembali ke arus utama kehidupan. Bukan karena mereka kehilangan kecerdasan atau integritas, tetapi karena manusia memiliki ambang batas terhadap keterasingan. Berjalan terlalu lama tanpa merasa dipahami adalah pengalaman yang menguras energi. Bahkan orang yang sangat idealis sekalipun membutuhkan ruang tempat keyakinan orang tersebut dapat bertemu dengan keyakinan lain yang sejenis.

Namun sejarah justru menunjukkan bahwa banyak perubahan besar memang berawal dari kondisi kesunyian semacam itu. Kesadaran kolektif hampir tidak pernah lahir secara serentak. Masyarakat tidak bangun dalam satu pagi dengan pemahaman yang sama. Perubahan sosial biasanya bergerak melalui proses bertahap, di mana sekelompok kecil orang lebih dahulu membaca arah zaman sebelum mayoritas menyadari arah tersebut. Dalam fase perubahan seperti itu, kesunyian menjadi hampir tak terhindarkan bagi kelompok kecil tersebut.



Dengan demikian, Jalan sunyi bukanlah pilihan untuk menjadi eksklusif atau merasa lebih tinggi daripada masyarakat luas. Jalan sunyi lebih merupakan konsekuensi dari posisi historis tertentu, yaitu ketika kesadaran seseorang atau sekelompok kecil manusia berjalan lebih dahulu daripada lingkungan sosialnya. Poin ini penting dipahami, karena tanpa kesadaran ini, seseorang bisa salah menafsirkan pengalaman kesendiriannya sebagai tanda bahwa perjuangannya keliru, padahal yang terjadi mungkin justru sebaliknya, yaitu masyarakat yang belum sampai pada titik kesadaran yang sama dengan orang tersebut.

Dalam masyarakat modern, tantangan jalan sunyi bahkan menjadi lebih rumit karena budaya popularitas telah membentuk psikologi manusia secara sangat kuat. Kita hidup di zaman ketika validasi sosial sering kali dianggap sebagai ukuran kebenaran. Sesuatu

yang ramai lebih mudah dianggap penting. Sesuatu yang viral lebih mudah dianggap relevan. Sesuatu yang mendapat banyak dukungan visual lebih mudah dianggap benar. Dalam situasi pengaruh budaya popularitas seperti ini, perjuangan yang tidak segera mendapat respons publik berisiko dianggap gagal bahkan oleh pelaku perjuangan itu sendiri.

Padahal sejarah manusia tidak pernah bekerja dengan logika popularitas sesaat. Banyak gagasan besar pada awalnya justru terasa asing, tidak nyaman, atau bahkan dianggap mengganggu oleh masyarakat zamannya. Ini bukan berarti semua gagasan yang tidak populer pasti benar, tentu saja. Namun ketidakpopuleran sebuah gagasan pada tahap awal tidak dapat dijadikan ukuran untuk menilai nilai sebuah perjuangan.

Justru salah satu ujian terbesar dalam jalan sunyi adalah kemampuan seseorang memisahkan antara validasi sosial dan nilai intrinsik sebuah keyakinan. Seseorang yang berjalan di jalan sunyi harus belajar menerima bahwa tidak semua hal yang penting akan segera dipahami, tidak semua kegelisahan yang valid akan langsung mendapat resonansi, dan tidak semua upaya yang bernilai akan segera menghasilkan dukungan.

Di titik inilah muncul pengalaman yang sangat khas dalam sejarah perjuangan bangsa yaitu pejuang yang tidak dipahami oleh zamannya sendiri. Fenomena pejuang yang tidak dipahami zamannya bukanlah sesuatu yang aneh karena hampir setiap periode sejarah memiliki figur-figur yang lebih dahulu melihat

ancaman, membaca arah kerusakan, atau menawarkan koreksi ketika mayoritas masih merasa nyaman dengan keadaan. Figur-figur ini belum tentu selalu benar dalam segala hal tetapi pengalaman dasar mereka sering serupa yaitu keterasingan. Mereka dianggap terlalu serius ketika masyarakat menginginkan hiburan. Mereka dianggap terlalu keras ketika masyarakat menginginkan kenyamanan. Mereka dianggap terlalu idealis ketika masyarakat telah terbiasa dengan kompromi. Mereka dianggap merepotkan ketika lingkungan sosial memilih stabilitas semu.

Semua penilaian negatif terhadap pejuang yang tidak dipahami ini bukan karena masyarakat selalu salah, melainkan karena kesadaran sosial memang bergerak dengan kecepatan yang berbeda-beda pada setiap orang. Tidak semua orang mengalami proses pembacaan realitas dalam waktu yang sama.

Karena itu, pejuang yang tidak dipahami oleh zamannya sering kali menghadapi beban ganda. Mereka tidak hanya harus menghadapi persoalan objektif yang sedang diperjuangkan, tetapi juga harus menanggung beban psikologis akibat ketidakpahaman dari lingkungan sendiri. Dalam banyak kasus, beban ganda ini justru lebih berat daripada menghadapi oposisi yang terbuka. Permusuhan yang jelas kadang lebih mudah dihadapi daripada kesalahpahaman dari orang-orang yang secara emosional dekat dengan pejuang.

Namun jika kita membaca sejarah secara lebih tenang, kita akan menemukan bahwa fase kesunyian seperti ini sering kali merupakan bagian alami dari

proses perubahan. Setiap gagasan membutuhkan masa inkubasi. Kesadaran membutuhkan waktu untuk menyebar. Struktur perjuangan membutuhkan waktu untuk tumbuh. Tidak semua perubahan lahir melalui ledakan besar. Banyak perubahan justru dimulai dari nyala kecil yang dijaga cukup lama hingga akhirnya nyala kecil itu mampu menyalakan ruang yang lebih luas.

Dalam konteks itulah jalan sunyi tidak harus dipahami sebagai kegagalan, melainkan sebagai salah satu fase yang mungkin harus dilalui dalam perjuangan jangka panjang. Bukan karena kesunyian itu indah secara inheren, tetapi karena realitas perubahan memang tidak selalu memberikan dukungan cepat kepada mereka yang berjalan lebih awal.

Jika pada bab sebelumnya kita membahas tentang minoritas strategis yang menjaga kesadaran bangsa, maka bab ini adalah sisi psikologis dari kenyataan tersebut. Menjadi minoritas strategis berarti menerima kemungkinan bahwa pada fase tertentu, perjuangan tidak akan terlihat heroik di mata publik. Perjuangan minoritas strategis mungkin justru tampak sepi, lambat, melelahkan, dan penuh ketidakpastian.

Namun hampir semua jalan besar dalam sejarah memang pada suatu titik pernah tampak seperti jalan kecil yang tidak menjanjikan. Dan justru karena itulah, mereka yang tetap memilih berjalan ketika jalan itu masih sunyi memegang peran yang sangat penting. Sebab ketika masyarakat yang lebih luas akhirnya mulai mencari arah, masyarakat tersebut membutuhkan jejak

langkah yang telah lebih dahulu membuka kemungkinan perjalanan.

SEKOLAH NEGARAWAN X
SHIKSHAYATI RAJANITIVIDAM

BAB 12
Mendengarkan Lagu Bisu

Jika jalan sunyi adalah pengalaman berjalan dalam kesadaran yang belum menjadi kesadaran bersama, maka fase berikutnya yang hampir tak terhindarkan adalah pengalaman berbicara tanpa benar-benar didengar. Inilah salah satu pengalaman paling khas dalam sejarah perjuangan intelektual, moral, maupun peradaban. Seseorang melihat sesuatu yang menurut keyakinan orang tersebut penting, mencoba menyampaikannya, mencoba menerjemahkan kegelisahan batinnya ke dalam kata-kata, tetapi dunia di sekitarnya seolah tidak memiliki frekuensi yang sama untuk menangkap makna dari apa yang orang itu suarakan. Inilah yang dapat disebut sebagai mendendangkan lagu bisu.

Istilah mendendangkan lagu bisu bukan sekadar metafora puitik tentang kesedihan atau kesepian personal. Dalam konteks perjuangan bangsa, istilah mendendangkan lagu bisu menggambarkan pengalaman ketika suara yang sesungguhnya lahir dari kepedulian mendalam justru tidak menemukan ruang resonansi sosial yang memadai. Seseorang berbicara, tetapi orang itu tidak sungguh didengar. Seseorang menjelaskan, tetapi tidak dipahami. Seseorang memperingatkan, tetapi peringatannya dianggap berlebihan. Seseorang menawarkan pembacaan yang lebih dalam, tetapi lingkungan di sekitarnya lebih tertarik pada kebisingan yang lebih sederhana dan lebih

mudah dicerna. Pengalaman mendendangkan lagu bisu adalah pengalaman yang sangat manusiawi sekaligus sangat melelahkan.

Dalam masyarakat modern, berbicara tampaknya tidak pernah semudah sekarang karena teknologi memberi hampir semua orang ruang untuk menyampaikan pendapat. Media sosial membuka kanal komunikasi yang belum pernah ada sebelumnya. Informasi bergerak cepat. Komentar mengalir deras. Setiap orang dapat menjadi penyampai pesan. Namun justru di tengah kelimpahan saluran komunikasi seperti ini, paradoks yang muncul sangat menarik yaitu semakin banyak orang berbicara, semakin sulit suara yang sungguh penting benar-benar didengar. Kebisingan tidak sama dengan komunikasi. Keramaian tidak identik dengan percakapan. Dan keterpaparan informasi tidak selalu berarti pemahaman.



Dalam ruang yang penuh distraksi, pesan yang membutuhkan perenungan sering kalah oleh pesan

yang memicu emosi cepat. Gagasan yang menuntut kedalaman sering tenggelam oleh slogan yang sederhana. Analisis yang membutuhkan waktu kalah oleh hiburan yang menawarkan kepuasan instan. Dalam kondisi ruang komunikasi seperti ini, seseorang yang mencoba berbicara tentang persoalan bangsa dengan keseriusan intelektual sering kali mengalami pengalaman yang ganjil yaitu orang tersebut tidak dibungkam secara formal tetapi juga tidak benar-benar didengar.

Inilah bentuk modern dari lagu bisu yaitu suara itu ada tetapi suara tersebut tidak masuk ke ruang kesadaran kolektif, kata-kata dari suara itu terdengar tetapi makna kata-katanya tidak bertemu dengan kesiapan pendengarnya. Dan pada titik tertentu, kondisi mendendangkan lagu bisu ini dapat menciptakan kelelahan yang sangat khas yaitu kelelahan karena merasa terus berbicara ke ruang yang tidak merespons secara substantif.

Namun pengalaman mendendangkan lagu bisu ini sesungguhnya jauh lebih tua daripada era digital. Sepanjang sejarah, banyak suara penting justru terlebih dahulu hadir sebagai suara yang tidak populer, suara yang tidak nyaman, atau suara yang dianggap terlalu jauh dari kebutuhan masyarakat sehari-hari. Sebab masyarakat, sebagaimana manusia secara umum, cenderung lebih responsif terhadap hal-hal yang dekat dengan kebutuhan langsung, emosi cepat, atau kepentingan yang terasa konkret.

Sebaliknya, suara yang berbicara tentang arah jangka panjang, ancaman yang belum tampak jelas,

kerusakan yang sedang tumbuh perlahan, atau perubahan struktur yang membutuhkan pembacaan mendalam sering kali membutuhkan waktu lebih lama untuk dipahami oleh masyarakat.

Di sinilah lagu bisu menjadi bukan sekadar pengalaman pribadi tetapi pengalaman historis karena lagu bisu adalah suara hati bangsa yang belum menemukan telinga kolektifnya. Sebab dalam setiap masyarakat, selalu ada kegelisahan yang sebenarnya hidup di bawah permukaan tetapi kegelisahan tersebut belum mampu menemukan bahasa bersama untuk diartikulasikan. Ada rasa tidak nyaman yang dirasakan banyak orang tetapi rasa tidak nyaman itu belum tersusun menjadi kesadaran yang jelas. Ada intuisi bahwa sesuatu sedang tidak baik-baik saja tetapi intuisi itu belum ada keberanian atau kejernihan untuk menerjemahkannya ke dalam struktur pemikiran yang utuh.



Dalam konteks masyarakat seperti itu, orang-orang yang lebih dahulu mampu memberi bahasa terhadap kegelisahan zaman sering kali tampak seperti

berbicara sendirian. Padahal yang mereka lakukan sesungguhnya bukan menciptakan kegelisahan baru melainkan memberi bentuk terhadap kegelisahan yang belum mampu diucapkan oleh masyarakat luas. Ini adalah fungsi penting dari pengingat zaman yaitu setiap zaman membutuhkan orang-orang yang bersedia membaca tanda-tanda zamannya dengan lebih jernih daripada kebanyakan orang.

Bukan karena para pengingat zaman ini lebih mulia secara inheren, tetapi karena dalam dinamika sosial memang selalu ada sebagian kecil manusia yang lebih dahulu sensitif terhadap perubahan arah, ancaman tersembunyi, atau kerusakan yang sedang tumbuh di balik normalitas sehari-hari.

Pengingat zaman sering tidak nyaman bagi lingkungannya sebab fungsi pengingat zaman bukan terutama memberi hiburan melainkan menghadirkan kesadaran. Dan kesadaran hampir selalu menuntut sesuatu dari manusia yaitu menuntut kejujuran, menuntut perubahan, dan menuntut keberanian untuk melihat hal-hal yang selama ini ingin dihindari oleh manusia. Karena itu tidak mengherankan jika pengingat zaman sering kali mengalami resistensi dari masyarakat karena masyarakat tidak selalu menolak pengingat zaman karena membenci kebenaran tetapi karena kebenaran yang datang terlalu cepat dari pengingat zaman bisa terasa mengganggu kenyamanan psikologis masyarakat.

Seseorang yang mengingatkan tentang bahaya ketika mayoritas masih merasa aman akan tampak berlebihan. Seseorang yang berbicara tentang

perubahan struktur ketika mayoritas masih sibuk beradaptasi dengan keadaan akan tampak tidak realistis. Seseorang yang mengkritik kebiasaan yang sudah dianggap normal akan tampak seperti pembuat kegaduhan. Padahal dalam banyak kasus, persoalan resistensi terhadap pengingat zaman bukan terletak pada salahnya pesan yang disampaikan melainkan pada belum siapnya ruang sosial untuk menerima pesan tersebut. Inilah yang membuat pengalaman intelektual sering begitu sunyi.

Kesepian intelektual bukan berarti seseorang tidak memiliki teman diskusi sama sekali. Kesepian intelektual adalah pengalaman ketika seseorang memiliki kesadaran tertentu yang belum menemukan cukup resonansi di lingkungan sekitarnya. Seseorang yang mengalami kesepian intelektual bisa berada di tengah komunitas, di tengah institusi, bahkan di tengah percakapan publik, tetapi tetap merasakan keterasingan karena kedalaman kegelisahannya tidak benar-benar bertemu dengan kedalaman respons yang diharapkannya.

Kesepian intelektual semacam ini memiliki bobot psikologis yang sangat nyata. Sebab manusia bukan hanya membutuhkan kemampuan berpikir, tetapi juga kebutuhan untuk merasa bahwa pikirannya dapat bertemu dengan kesadaran lain yang setara. Ketika pertemuan kesadaran itu tidak terjadi dalam waktu lama, seseorang bisa mengalami kelelahan intelektual. Orang itu mulai bertanya apakah apa yang dilihatnya sungguh penting. Orang itu mulai meragukan urgensi

suaranya. Orang itu mulai mempertanyakan apakah berbicara masih memiliki makna.

Banyak orang berhenti dari perjuangan intelektual bukan karena mereka kehilangan kecerdasan tetapi karena mereka lelah berbicara tanpa resonansi. Banyak gagasan mati bukan karena gagasan itu salah tetapi karena gagasan itu terlalu lama hidup tanpa ekosistem yang mampu memeliharanya. Karena itu lagu bisu bukan hanya tentang suara yang tidak didengar tetapi juga tentang ujian ketahanan bagi mereka yang merasa harus terus berbicara meskipun respons yang datang belum sebanding dengan urgensi pesan yang mereka bawa.

Namun di sinilah ironi sejarah bekerja yaitu banyak suara yang pada satu masa terdengar seperti lagu bisu, pada masa berikutnya justru menjadi referensi penting ketika masyarakat akhirnya sampai pada titik kesadaran yang lebih matang. Banyak gagasan yang awalnya terasa terlalu jauh, terlalu berat, atau terlalu tidak nyaman justru kemudian dipahami sebagai suara-suara yang sebenarnya sedang berusaha menjaga arah bangsa. Karena masyarakat tidak selalu gagal mendengar untuk selamanya karena kadang masyarakat hanya belum siap mendengar sekarang.

Dan justru karena ketidaksiapan masyarakat itulah, mereka yang memilih tetap mendendangkan lagu bisu sesungguhnya sedang menjaga sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekadar pendapat pribadi. Mereka sedang menjaga kemungkinan bahwa ketika masyarakat akhirnya siap mendengar, masih ada suara yang telah lebih dahulu menyalakan makna.

Di titik inilah kita memahami bahwa mendendangkan lagu bisu bukan tindakan yang sia-sia. Mendendangkan lagu bisu memang melelahkan, sering kali sunyi, dan tidak selalu memberi kepuasan emosional. Tetapi dalam sejarah perjuangan bangsa, suara-suara seperti inilah yang sering menjadi jembatan antara kegelisahan yang belum terucapkan dan kesadaran kolektif yang suatu hari mungkin akan lahir.

SHIKSHAYATI RAJANITIVIDAM

BAB 13
Mengetuk Pintu Rumah Bangsa



Setelah melalui jalan sunyi dan mendendangkan lagu yang belum sepenuhnya didengar, pertanyaan berikutnya yang muncul adalah lalu apa yang harus dilakukan? Jika kesadaran belum menjadi milik bersama, jika mayoritas masyarakat masih berada dalam berbagai tahapan pelumpuhan, dan jika suara-suara yang memperingatkan belum sepenuhnya menemukan resonansi sosial yang cukup, apakah perjuangan harus berhenti pada kegelisahan? Apakah cukup bagi mereka yang telah lebih dahulu memahami persoalan untuk sekadar menjaga kesadaran di dalam lingkaran kecilnya sendiri?

Jawaban atas pertanyaan itu tentu tidak. Kesadaran yang hanya disimpan untuk dirinya sendiri pada akhirnya tidak akan mengubah keadaan. Jika perjuangan bangsa hanya berhenti pada kemampuan

membaca persoalan tanpa keberanian untuk membangun kesadaran publik, maka perjuangan tersebut akan berubah menjadi kontemplasi yang steril. Karena itu, setelah fase memahami, menjaga, dan bertahan, perjuangan harus bergerak menuju fase berikutnya yaitu mengetuk pintu rumah bangsa.

Metafora mengetuk pintu rumah bangsa ini penting. Mengetuk pintu berarti datang dengan niat membangunkan, bukan mendobrak dengan kemarahan. Tindakan mengetuk pintu menunjukkan adanya kesabaran, penghormatan, dan pengakuan bahwa yang sedang dihadapi bukan musuh, melainkan sesama anak bangsa yang mungkin masih tertidur oleh berbagai bentuk pelumpuhan yang telah dibahas sebelumnya. Mengetuk pintu juga berarti memahami bahwa kesadaran tidak bisa dipaksakan secara kasar. Orang bisa dipaksa diam, tetapi tidak bisa dipaksa sadar. Kesadaran manusia harus dibangunkan melalui proses yang menghormati akal, hati, pengalaman, dan martabat manusia.

Dalam konteks inilah perjuangan kebangsaan tidak bisa hanya dipahami sebagai perlawanan terhadap sesuatu yang dianggap salah, tetapi juga sebagai proses pendidikan sosial. Bangsa yang sedang mengalami pelumpuhan membutuhkan lebih dari sekadar kritik, bangsa yang lumpuh membutuhkan edukasi. Sebab banyak masyarakat tidak bergerak bukan karena mereka secara moral menolak perubahan, melainkan karena mereka tidak memiliki kerangka berpikir yang cukup untuk membaca persoalan secara utuh.



Edukasi rakyat dalam konteks bab ini tidak boleh dipahami secara sempit sebagai transfer informasi. Memberi informasi saja tidak otomatis membangun kesadaran. Masyarakat modern justru sudah hidup dalam limpahan informasi, tetapi tetap bisa mengalami kebingungan kolektif. Yang dibutuhkan oleh masyarakat bukan sekadar lebih banyak data, melainkan kemampuan memahami hubungan antara data, pengalaman hidup, struktur kekuasaan, dan masa depan bangsa.

Karena itu, edukasi rakyat adalah proses membangun kejernihan berpikir. Edukasi rakyat berarti membantu masyarakat memahami mengapa kondisi tertentu terjadi, bagaimana sebuah sistem bekerja, siapa yang diuntungkan, siapa yang dirugikan, serta pilihan-pilihan apa yang tersedia untuk memperbaiki kondisi tersebut. Edukasi yang sehat tidak menciptakan ketergantungan masyarakat pada figur tertentu, tetapi justru menumbuhkan kemampuan masyarakat untuk berpikir secara mandiri.

Di titik inilah perjuangan kebangsaan bertemu dengan tanggung jawab intelektual. Mereka yang telah lebih dahulu memahami persoalan memiliki kewajiban moral untuk menerjemahkan gagasan-gagasan yang kompleks ke dalam bahasa yang dapat dipahami publik tanpa merendahkan kecerdasan publik itu sendiri. Sebab salah satu kesalahan yang sering terjadi dalam perjuangan intelektual adalah kegagalan menjembatani antara kompleksitas pemikiran dan realitas masyarakat.

Terlalu banyak gagasan yang benar tetapi tidak pernah menjadi gerakan sosial karena bahasa yang digunakan oleh gagasan tersebut terlalu jauh dari pengalaman rakyat. Sebaliknya, terlalu banyak slogan yang mudah diterima oleh masyarakat tetapi miskin substansi sehingga slogan-slogan itu tidak benar-benar membangun kesadaran. Mengetuk pintu rumah bangsa berarti mencari jalan tengah antara kedalaman dan keterjangkauan antara ketepatan intelektual dan keterhubungan sosial.

Namun edukasi saja tidak cukup. Kesadaran bukan sekadar persoalan pengetahuan, tetapi juga persoalan kebangkitan batin. Banyak orang sebenarnya telah memiliki informasi yang cukup, tetapi belum mengalami titik batin di mana informasi itu berubah menjadi kesadaran. Karena itu, perjuangan membangunkan bangsa juga merupakan perjuangan membangunkan kepekaan batin masyarakat.

Membangunkan kesadaran berarti membantu masyarakat melihat bahwa persoalan yang selama ini mereka anggap sebagai beban individual sesungguhnya sering kali memiliki dimensi struktural yang lebih besar.

Ketika seseorang merasa hidupnya semakin sulit, misalnya, orang itu mungkin menganggap kesulitan tersebut sekadar persoalan nasib pribadi. Ketika pelayanan publik buruk, seseorang mungkin menerima keburukan itu sebagai kewajaran. Ketika ruang sosial dipenuhi distraksi budaya, seseorang mungkin menganggap distraksi itu hanya bagian dari perubahan zaman.

Padahal dalam banyak kasus, pengalaman-pengalaman individual itu terhubung dengan struktur sosial yang lebih besar. Kesadaran lahir ketika seseorang mulai melihat keterhubungan itu. Ketika seseorang menyadari bahwa persoalan hidupnya bukan semata kegagalan personal, tetapi bagian dari dinamika sosial yang lebih luas. Ketika masyarakat mulai mampu membaca pola, bukan hanya gejala. Ketika masyarakat mulai memahami akar persoalan, bukan hanya permukaan persoalan. Namun proses membangunkan kesadaran hampir tidak pernah berlangsung cepat. Di sinilah salah satu ujian terbesar dalam perjuangan kebangsaan yaitu kesabaran.

Kita hidup di zaman yang sangat terbiasa dengan kecepatan. Informasi bergerak cepat, opini terbentuk cepat, tren berubah cepat, dan manusia modern semakin terbiasa mengharapkan hasil yang instan. Namun perubahan kesadaran sosial tidak mengikuti logika kecepatan itu. Kesadaran manusia tumbuh melalui pengalaman, dialog, benturan realitas, refleksi, dan proses internal yang sering kali memerlukan waktu jauh lebih panjang daripada yang diinginkan oleh para pejuang perubahan.

Karena itu, perjuangan kebangsaan membutuhkan kesabaran yang matang. Bukan kesabaran pasif yang menyerah pada keadaan, tetapi kesabaran strategis yang memahami bahwa perubahan sosial adalah proses jangka panjang. Mengetuk pintu rumah bangsa berarti siap menghadapi kenyataan bahwa tidak semua orang akan langsung membuka pintunya. Ada warga yang tidak mendengar ketukan. Ada warga yang mendengar ketukan tetapi belum peduli. Ada warga yang peduli tetapi belum siap berubah. Ada warga yang justru menolak karena merasa terusik oleh ketukan. Semua variasi respons warga itu adalah bagian dari dinamika kesadaran manusia.

Di sinilah perjuangan kebangsaan memiliki kemiripan dengan apa yang dalam tradisi spiritual dikenal sebagai dakwah. Bukan dakwah dalam pengertian sektarian yang sempit, tetapi dakwah dalam pengertian yang lebih luas sebagai upaya mengajak manusia menuju kesadaran yang lebih baik. Karena itu, perjuangan membangunkan bangsa dapat dipahami sebagai bentuk dakwah kebangsaan.

Istilah dakwah kebangsaan ini penting karena istilah ini mengandung dimensi moral yang lebih dalam daripada sekadar aktivisme pejabat. Dakwah kebangsaan bukan perjuangan untuk merebut popularitas, bukan pula sekadar mobilisasi kemarahan. Dakwah kebangsaan adalah ikhtiar moral untuk mengajak sesama warga bangsa memahami dirinya, memahami bangsanya, dan memahami tanggung jawab historisnya.



Sebagaimana dakwah dalam makna yang sehat, perjuangan dakwah kebangsaan seperti ini menuntut kesabaran, kejernihan, empati, dan konsistensi. Dakwah kebangsaan tidak dibangun di atas penghinaan terhadap masyarakat yang belum sadar, melainkan di atas kasih sayang terhadap sesama yang sedang mengalami pelumpuhan kesadaran. Dakwah kebangsaan tidak memosisikan rakyat sebagai objek yang bodoh, tetapi sebagai subjek yang perlu dibantu untuk bangkit.

Ini adalah perbedaan mendasar antara perjuangan yang lahir dari kemarahan murni dan perjuangan yang lahir dari tanggung jawab peradaban. Kemarahan bisa menjadi energi awal perjuangan, tetapi kemarahan tidak cukup untuk membangun kesadaran jangka panjang. Kesadaran yang matang membutuhkan pendekatan yang lebih sabar, lebih manusiawi, dan lebih menghormati proses.

Pada akhirnya, mengetuk pintu rumah bangsa adalah pilihan untuk tetap percaya bahwa masyarakat

dapat dibangunkan. Bahwa di balik berbagai bentuk pelumpuhan, manusia tetap memiliki potensi untuk sadar. Bahwa di balik kebisingan zaman, hati nurani kolektif bangsa belum sepenuhnya mati. Bahwa di balik ketidakpedulian yang tampak di permukaan, masih ada kemungkinan bagi kebangkitan bangsa.

Karena itu, perjuangan tidak berhenti pada membaca persoalan atau menjaga kesadaran dalam kelompok kecil. Perjuangan harus bergerak menuju ikhtiar yang lebih besar, yaitu menyampaikan, menjelaskan, mendidik, membangunkan, dan dengan sabar terus mengetuk pintu rumah bangsa, sampai suatu hari cukup banyak orang terbangun untuk berjalan bersama.

SHIKSHAYATI RAJANITIVIDAM

BAB 14
Para Kekasih Rahasia Allah



Setelah membahas jalan sunyi, lagu bisu, dan kesabaran dalam mengetuk pintu rumah bangsa, kita sampai pada satu dimensi perjuangan yang tidak selalu dapat dijelaskan sepenuhnya melalui logika sosial, ekonomi, atau psikologi semata. Ada satu pertanyaan yang sering muncul dalam perjalanan sejarah manusia, yaitu mengapa sebagian orang mampu bertahan melewati tekanan yang seharusnya melumpuhkan banyak orang lain? Mengapa ada manusia yang tetap jernih ketika lingkungan di sekitarnya dipenuhi kebingungan, tetap tenang ketika keadaan tampak gelap, tetap memiliki keberanian ketika risiko begitu nyata, dan tetap menjaga harapan ketika mayoritas mulai menyerah?

Tentu sebagian dari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu dapat dijelaskan melalui faktor

pendidikan, pengalaman hidup, kualitas karakter, lingkungan sosial, atau latihan intelektual. Namun ada kalanya penjelasan-penjelasan itu terasa belum cukup. Sebab dalam kehidupan nyata, kita juga menemukan orang-orang yang secara kasat mata tidak memiliki semua modal yang ideal, tetapi justru menunjukkan keteguhan yang luar biasa. Sebaliknya, ada pula orang-orang yang secara intelektual sangat mumpuni, secara sosial memiliki posisi yang kuat, secara ekonomi relatif aman, tetapi justru mudah goyah ketika menghadapi tekanan.

Di titik inilah dimensi spiritual menjadi penting untuk dibicarakan. Buku ini sejak awal tidak dibangun semata-mata di atas pembacaan kekuasaan atau sosial, tetapi juga di atas kesadaran bahwa manusia bukan hanya makhluk biologis, psikologis, dan sosial. Manusia juga makhluk spiritual. Ada ruang batin dalam diri manusia yang tidak seluruhnya tunduk pada kalkulasi rasional. Ada kekuatan yang kadang tidak lahir dari kemampuan pribadi manusia, tetapi dari sesuatu yang dirasakan sebagai pertolongan yang datang dari luar diri manusia itu sendiri.

Dalam tradisi keimanan, ruang batin inilah yang sering dipahami sebagai wilayah hidayah, penjagaan Ilahi, atau pertolongan Allah. Karena itu, ketika dalam lirik yang menjadi salah satu inspirasi buku ini muncul ungkapan tentang “para kekasih rahasia Allah”, frasa para kekasih rahasia Allah itu dapat dibaca sebagai metafora spiritual tentang manusia-manusia yang tetap dijaga dalam kesadaran, dijaga dalam keteguhan, dan

dijaga dari berbagai bentuk pelumpuhan yang menghancurkan banyak orang lain.

Tentu istilah para kekasih rahasia Allah tidak boleh dipahami secara sembarangan sebagai klaim eksklusif bahwa kelompok tertentu pasti merupakan manusia pilihan Tuhan dalam pengertian yang arogan. Pemahaman yang arogan seperti itu justru bertentangan dengan kerendahan hati spiritual. Namun sebagai gagasan reflektif, istilah para kekasih rahasia Allah tersebut membantu kita memahami bahwa dalam sejarah manusia, selalu ada individu-individu yang tampak memiliki daya tahan yang melampaui ekspektasi biasa.

Dalam bahasa keimanan, manusia semacam ini sering dipahami sebagai mereka yang mendapatkan penjagaan. Penjagaan ini tidak berarti mereka bebas dari kesulitan karena justru sering kali sebaliknya yaitu mereka tetap mengalami tekanan, kebingungan, kesepian, kegagalan, bahkan fitnah. Namun ada sesuatu dalam diri mereka yang membuat mereka tidak sepenuhnya runtuh. Ketika orang lain kehilangan arah, mereka masih mampu menjaga orientasi.

Ketika orang lain kehilangan harapan, mereka masih memiliki keyakinan. Ketika lingkungan di sekitarnya tenggelam dalam kompromi, mereka masih mampu mempertahankan garis batin tertentu. Dalam perspektif spiritual, kemampuan seperti ini tidak selalu dapat dijelaskan hanya sebagai hasil kekuatan personal manusia semata karena ada dimensi hidayah di dalam kemampuan tersebut.



Hidayah sering dipahami secara terlalu sempit hanya sebagai momen seseorang menemukan agama atau menjadi lebih religius secara formal. Padahal makna hidayah jauh lebih luas. Hidayah adalah bentuk petunjuk, penerangan, atau pembukaan jalan batin yang membuat seseorang mampu melihat sesuatu dengan kejernihan yang tidak selalu dapat dihasilkan semata-mata oleh proses intelektual biasa.

Dalam konteks perjuangan bangsa, hidayah dapat dipahami sebagai kemampuan untuk tetap membaca realitas dengan jernih ketika kebisingan sosial mengaburkan banyak hal. Hidayah adalah kemampuan untuk membedakan antara kesabaran dan kepasifan, antara kompromi strategis dan pengkhianatan nilai, antara optimisme yang matang dan ilusi kosong.

Tidak semua manusia yang cerdas otomatis memiliki kejernihan semacam ini. Sebab kecerdasan intelektual dan kejernihan batin adalah dua hal yang tidak selalu berjalan bersamaan. Ada orang yang sangat pandai secara akademik, tetapi kehilangan kompas moral. Ada orang yang sangat terlatih secara teknis,

tetapi bingung menghadapi persoalan etis. Sebaliknya, ada manusia yang secara formal tidak tampak menonjol, tetapi memiliki intuisi moral dan kejernihan spiritual yang sangat kuat.

Inilah salah satu bentuk kerja hidayah yang sulit diukur dengan instrumen sosial biasa. Namun hidayah saja tidak berarti perjuangan menjadi mudah. Mereka yang memilih jalan sunyi tetaplah manusia yang memiliki tubuh yang bisa lelah, emosi yang bisa goyah, dan pikiran yang bisa mengalami keletihan. Karena itu, dimensi berikutnya yang penting adalah kekuatan spiritual pejuang.

Perjuangan jangka panjang tidak dapat bertumpu hanya pada kemarahan. Kemarahan bisa menjadi pemantik perjuangan, tetapi kemarahan bukan bahan bakar yang cukup untuk perjalanan panjang. Kemarahan cepat membakar, tetapi kemarahan juga cepat menghabiskan energi. Banyak gerakan sosial gagal bukan karena gagasan gerakannya salah, tetapi karena energi psikologis pelaku gerakan habis sebelum perubahan sempat matang.

Di titik inilah spiritualitas memberi fondasi yang berbeda. Spiritualitas yang sehat tidak membuat seseorang lari dari realitas, tetapi justru memberi seseorang daya tahan untuk menghadapi realitas dengan lebih utuh. Spiritualitas yang sehat memberi kemampuan untuk melihat perjuangan bukan sekadar sebagai proyek ego personal, tetapi sebagai bagian dari tanggung jawab moral yang lebih besar.



Seseorang yang bertumpu hanya pada dirinya sendiri akan sangat mudah kelelahan, karena seluruh beban perjuangan terasa harus ditanggung oleh kapasitas pribadinya. Namun seseorang yang memiliki fondasi spiritual sering kali mampu memaknai perjuangan secara berbeda. Orang tersebut tetap bekerja keras, tetap berpikir, tetap berstrategi, tetapi tidak memosisikan dirinya sebagai pusat dari segala sesuatu.

Ada ketenangan tertentu yang lahir ketika manusia memahami bahwa tugas manusia adalah berikhtiar, bukan mengendalikan seluruh hasil. Ada kekuatan tertentu yang lahir ketika seseorang menyadari bahwa kegagalan jangka pendek tidak selalu berarti kekalahan final. Ada daya tahan tertentu yang lahir ketika perjuangan dipahami sebagai amanah, bukan sekadar ambisi pribadi. Kekuatan spiritual seperti inilah yang sering membuat pejuang mampu bertahan jauh lebih lama daripada yang secara psikologis tampak mungkin. Dan dari sinilah pembicaraan tentang pertolongan Ilahi menjadi relevan.

Dalam dunia modern yang sangat rasional, pembicaraan tentang pertolongan Tuhan sering dianggap terlalu abstrak atau terlalu subjektif. Namun dalam pengalaman sejarah banyak manusia, keyakinan tentang pertolongan Ilahi bukanlah gagasan kosong karena keyakinan tentang pertolongan Ilahi adalah pengalaman eksistensial yang sangat nyata, meskipun pengalaman itu sulit diukur secara empiris.

Pertolongan Ilahi tentu tidak boleh dipahami secara magis sebagai alasan untuk tidak berpikir, tidak berstrategi, atau tidak bekerja karena pemahaman magis seperti itu justru bentuk spiritualitas yang keliru. Dalam tradisi keimanan yang sehat, pertolongan Tuhan bukan pengganti ikhtiar manusia melainkan sesuatu yang hadir dalam dan melalui ikhtiar manusia itu sendiri.

Seseorang tetap harus belajar. Seseorang tetap harus berpikir. Seseorang tetap harus membangun struktur perjuangan. Seseorang tetap harus mendidik masyarakat. Seseorang tetap harus bertahan dalam proses perjuangan. Namun di balik semua ikhtiar itu, ada kesadaran bahwa hasil akhir tidak sepenuhnya berada dalam genggaman manusia. Kesadaran ini bukan bentuk kelemahan melainkan bentuk kerendahan hati ontologis karena kesadaran ini mengingatkan manusia bahwa tidak semua dinamika sejarah dapat dipetakan sepenuhnya oleh kalkulasi manusia.

Kadang jalan terbuka dari arah yang tidak diduga oleh manusia. Kadang pertolongan datang melalui orang-orang yang tidak diperhitungkan oleh

manusia. Kadang momentum lahir ketika situasi tampak paling tertutup bagi manusia. Kadang kekuatan justru muncul ketika manusia merasa dirinya paling lemah. Inilah dimensi misteri dalam sejarah perjuangan. Bukan misteri dalam arti irasional, tetapi pengakuan bahwa kehidupan manusia selalu memiliki ruang yang melampaui kendali perencanaan manusia itu sendiri.

Karena itu pembicaraan tentang para kekasih rahasia Allah bukan tentang menciptakan elitisme spiritual melainkan tentang pengakuan bahwa ada manusia-manusia yang tetap dijaga kesadarannya, dijaga orientasinya, dan diberi kekuatan untuk tetap bertahan ketika secara manusiawi seharusnya mereka sudah runtuh. Mereka bukan manusia tanpa rasa takut, bukan manusia tanpa kelelahan, dan bukan manusia tanpa luka. Tetapi mereka memiliki sumber daya batin yang membuat mereka tidak berhenti. Dan bagi banyak tradisi spiritual, sumber daya batin semacam itu bukan semata hasil kekuatan pribadi manusia melainkan bagian dari rahmat Ilahi.

Pada akhirnya, setiap perjuangan bangsa yang ingin bertahan dalam jangka panjang memerlukan lebih dari sekadar strategi sosial dan desain kelembagaan karena semua unsur strategi dan desain itu penting tetapi manusia yang menjalankannya tetap membutuhkan sumber energi yang lebih dalam. Sebab sejarah tidak hanya digerakkan oleh kalkulasi manusia tetapi juga oleh keyakinan, keteguhan batin, dan kemampuan untuk terus berjalan bahkan ketika hasil belum tampak.

Di titik itulah sebagian pejuang mungkin akan menyebut sumber energi itu sebagai daya tahan psikologis. Sebagian lain menyebutnya sebagai integritas moral. Sebagian menyebutnya sebagai keteguhan karakter. Dan sebagian yang lain, dengan kerendahan hati spiritual, mungkin hanya menyebutnya sebagai pertolongan Allah.

SEKOLAH NEGARAWAN X SHIKSHAYATI RAJANITIVIDAM

BAGIAN V - PENGORBANAN

BAB 15
Mungkin Engkau Memerlukan Darahku



Setelah menempuh jalan sunyi, mendendangkan lagu yang belum tentu didengar, mengetuk pintu kesadaran bangsa dengan kesabaran, dan menyadari bahwa dalam setiap perjuangan selalu ada dimensi spiritual yang menopang manusia melampaui batas kekuatan normalnya, kita sampai pada satu kenyataan yang tidak dapat dihindari dalam setiap upaya perubahan yang sungguh-sungguh, yaitu perubahan selalu memiliki harga.

Tidak ada perubahan besar dalam sejarah manusia yang benar-benar lahir tanpa pengorbanan. Bahkan perubahan-perubahan kecil dalam kehidupan personal seseorang saja hampir selalu menuntut pelepasan terhadap sesuatu. Apalagi ketika yang dibicarakan bukan sekadar perubahan kebiasaan pribadi, melainkan perubahan arah sebuah bangsa.

Semakin besar skala perubahan yang diinginkan oleh seseorang atau sekelompok orang, semakin besar pula kemungkinan bahwa harga yang harus dibayar untuk perubahan tersebut tidak kecil.

Inilah kenyataan tentang harga perubahan yang sering kali dihindari dalam banyak wacana perubahan modern. Kita hidup di zaman yang sangat terbiasa dengan logika efisiensi, kenyamanan, dan hasil cepat. Banyak orang ingin perubahan, tetapi tanpa gangguan terhadap rutinitas hidupnya. Banyak orang yang menginginkan bangsa yang lebih baik, tetapi tanpa konsekuensi personal yang berarti bagi dirinya. Banyak orang yang berharap hadirnya sistem yang lebih adil, tetapi tetap ingin menjaga seluruh zona nyaman yang telah mereka bangun. Padahal sejarah tidak bekerja seperti itu.

Setiap perubahan yang sungguh menggeser struktur, kesadaran, atau arah peradaban hampir selalu menuntut pengorbanan dari mereka yang memilih terlibat di dalamnya. Pandangan ini bukan romantisasi penderitaan, melainkan pengakuan realistis terhadap sifat dasar perubahan sosial. Sistem yang mapan, betapapun bermasalahnya sistem tersebut, selalu memiliki mekanisme pertahanan. Sistem yang mapan tidak begitu saja memberi ruang bagi perubahan yang dapat mengganggu stabilitas kepentingannya. Karena itu, siapa pun yang sungguh-sungguh ingin mendorong perubahan harus bersiap menghadapi gesekan dengan sistem yang mapan.

Dalam konteks inilah ungkapan "mungkin engkau memerlukan darahku" tidak harus dipahami

secara literal sebagai kematian fisik, meskipun sejarah tentu mengenal banyak peristiwa di mana perjuangan memang menuntut pengorbanan nyawa. Dalam konteks buku ini, ungkapan "mungkin engkau memerlukan darahku" lebih tepat dipahami sebagai metafora tentang kesiapan membayar harga personal demi sesuatu yang dianggap lebih besar daripada diri sendiri.



Pengorbanan pertama yang hampir selalu muncul dalam perjuangan adalah pengorbanan terhadap kenyamanan. Kenyamanan adalah salah satu kekuatan paling halus yang dapat menahan manusia dari perubahan, tidak selalu karena kenyamanan itu salah tetapi karena manusia secara alami cenderung mempertahankan stabilitas yang membuat hidupnya terasa aman. Ketika seseorang telah memiliki ritme hidup tertentu, pekerjaan yang relatif stabil, lingkungan sosial yang nyaman, atau pola hidup yang dapat diprediksi, keinginan orang tersebut untuk

mempertahankan semua elemen kenyamanan itu adalah hal yang sangat manusiawi.

Masalah dari kenyamanan muncul ketika kenyamanan berubah menjadi penjara psikologis bagi seseorang. Pada titik itu, seseorang mulai menolak segala sesuatu yang berpotensi mengguncang kestabilannya, bahkan jika perubahan yang ditawarkan itu diperlukan secara moral. Orang tersebut mulai menimbang bukan berdasarkan benar atau salah tetapi berdasarkan aman atau tidak aman bagi dirinya. Orang tersebut mulai menilai keterlibatan sosial bukan dari urgensi persoalan tetapi dari potensi gangguan terhadap kehidupannya. Dalam situasi seperti ini, kenyamanan tidak lagi sekadar kondisi hidup yang menyenangkan melainkan kenyamanan berubah menjadi mekanisme pelumpuhan bagi jiwa seseorang.

Karena itu, siapa pun yang ingin terlibat dalam perjuangan perubahan harus memahami bahwa kenyamanan sering menjadi hal pertama yang perlu dikorbankan. Waktu yang sebelumnya digunakan untuk kepentingan pribadi mungkin harus dialihkan untuk berpikir, berdiskusi, membangun, atau mendidik. Energi yang sebelumnya habis untuk rutinitas personal mungkin harus digunakan untuk proses yang tidak langsung memberi hasil. Bahkan ketenangan emosional yang sebelumnya relatif stabil bisa terganggu oleh kegelisahan terhadap keadaan bangsa.

Semua bentuk pelepasan kenyamanan ini bukanlah heroisme kosong karena semua ini hanyalah konsekuensi logis dari keterlibatan yang serius dalam

perjuangan. Pengorbanan kedua dalam perjuangan adalah pengorbanan reputasi. Dalam masyarakat modern, reputasi memiliki nilai yang sangat besar. Bagi banyak orang, nama baik, citra publik, penerimaan sosial, dan persepsi lingkungan merupakan aset yang dijaga dengan sangat hati-hati. Sikap menjaga reputasi ini dapat dipahami karena manusia hidup dalam jaringan sosial yang sering kali memengaruhi peluang ekonomi, relasi profesional, dan kehidupan personal seseorang. Namun justru karena reputasi memiliki nilai tinggi, reputasi sering menjadi titik tekanan yang efektif dalam setiap perjuangan.

Seseorang yang mulai menyuarakan hal-hal yang tidak populer dapat dengan cepat diberi label tertentu oleh lingkungannya. Orang tersebut bisa dianggap terlalu keras, terlalu idealis, terlalu emosional, terlalu kritis, terlalu tidak realistis, atau bahkan dicurigai memiliki motif tersembunyi. Dalam iklim sosial yang sangat dipengaruhi oleh persepsi, stigma dapat bekerja lebih cepat daripada argumentasi rasional. Tidak semua orang siap menghadapi risiko stigma ini. Banyak manusia yang sebenarnya memahami persoalan tetapi memilih diam karena tidak ingin reputasinya terganggu. Mereka takut dianggap aneh oleh lingkungan, takut dipandang bermasalah, takut relasi sosialnya berubah, dan takut kehilangan posisi sosial yang selama ini dibangun dengan susah payah. Semua ketakutan akan reputasi ini adalah ketakutan yang sangat manusiawi.

Karena itu pengorbanan reputasi bukan sesuatu yang kecil karena dalam banyak situasi justru

pengorbanan reputasi inilah harga yang paling sulit dibayar oleh kelompok terdidik atau mereka yang memiliki posisi sosial tertentu. Sebab semakin besar seseorang berinvestasi pada citra sosialnya, semakin besar pula resistensi orang tersebut terhadap langkah-langkah yang dapat mengguncang citra tersebut. Namun sejarah sering menunjukkan bahwa perubahan besar tidak selalu digerakkan oleh mereka yang paling nyaman menjaga reputasi karena kadang perubahan besar justru digerakkan oleh mereka yang rela dipahami secara keliru oleh publik untuk sementara waktu demi sesuatu yang mereka anggap lebih penting daripada reputasi pribadi.



Pengorbanan berikutnya dalam perjuangan adalah pengorbanan sosial. Pengorbanan sosial mungkin merupakan salah satu bentuk pengorbanan yang paling menyakitkan karena manusia bukan hanya makhluk rasional tetapi juga makhluk relasional. Kita hidup melalui jaringan keluarga, pertemanan,

komunitas, kolega, dan berbagai bentuk keterhubungan sosial lainnya. Dukungan sosial memberi rasa aman, identitas, dan stabilitas emosional bagi seseorang. Karena itu ancaman terhadap hubungan sosial seseorang sering kali terasa jauh lebih berat daripada ancaman material.

Seseorang yang memilih jalan perjuangan tertentu kadang harus menerima bahwa tidak semua orang di sekitarnya akan memahami pilihan orang tersebut. Bahkan mereka yang secara emosional dekat dengan pejuang belum tentu memiliki pembacaan yang sama terhadap persoalan. Dalam banyak kasus, justru kesalahpahaman paling menyakitkan datang dari lingkungan terdekat pejuang. Ada anggota keluarga atau teman yang mulai menjaga jarak, ada yang merasa tidak nyaman dengan pilihan perjuangan, ada yang menganggap langkah perjuangan tersebut berlebihan, ada yang khawatir terhadap risiko yang dihadapi pejuang, dan ada yang menilai bahwa keterlibatan dalam persoalan bangsa hanya akan membawa masalah bagi pejuang.

Dalam kondisi tekanan sosial seperti ini, seseorang dapat mengalami bentuk keterasingan sosial yang nyata. Pejuang tidak sepenuhnya kehilangan relasi tetapi kualitas keterhubungannya dengan lingkungan berubah karena percakapan menjadi canggung, dukungan berkurang, dan keakraban tertentu memudar. Ini adalah harga emosional dari pengorbanan sosial yang tidak kecil karena manusia bisa menghadapi banyak tekanan eksternal selama ia masih merasa memiliki rumah sosial untuk kembali.

Tetapi ketika rumah sosial itu sendiri mulai terasa menjauh dari pejuang, daya tahan psikologis pejuang diuji dengan cara yang jauh lebih mendalam. Di sinilah kita memahami bahwa pengorbanan dalam perjuangan tidak selalu berbentuk hal-hal dramatis yang terlihat dari luar karena banyak pengorbanan justru berlangsung diam-diam di dalam kehidupan personal manusia seperti waktu yang hilang, energi yang terkuras, relasi yang berubah, nama baik yang terguncang, dan kenyamanan yang lenyap.

Semua bentuk kehilangan ini adalah bentuk-bentuk darah dalam pengertian metaforis. Namun penting untuk dipahami bahwa buku ini tidak sedang mempromosikan pengorbanan secara sembrono atau romantisasi penderitaan karena tidak setiap pengorbanan otomatis bernilai, tidak setiap kesulitan adalah tanda perjuangan yang benar, dan tidak setiap konflik sosial adalah bukti moralitas seseorang.

Pengorbanan hanya bermakna ketika pengorbanan itu terkait dengan tujuan yang memang layak diperjuangkan. Karena itu pembicaraan tentang pengorbanan harus selalu ditempatkan dalam kerangka kebijaksanaan, bukan impuls emosional, karena perjuangan yang matang bukan perjuangan yang mencari penderitaan melainkan perjuangan yang memahami bahwa penderitaan tertentu mungkin menjadi konsekuensi yang tidak dapat sepenuhnya dihindari dalam proses perubahan.

BAB 16
Mungkin Engkau Butuh Kematianku



Jika pada bab sebelumnya kita membahas tentang harga perubahan dalam bentuk pengorbanan kenyamanan, reputasi, dan relasi sosial, maka pada bab ini kita memasuki wilayah yang jauh lebih dalam, yaitu pengorbanan dalam makna tertingginya. Sebab dalam sejarah manusia, selalu ada titik ketika perjuangan tidak lagi sekadar menuntut waktu, tenaga, atau stabilitas hidup, tetapi menuntut sesuatu yang jauh lebih mendasar, yaitu kesediaan untuk mempertaruhkan diri.

Ungkapan "mungkin engkau butuh kematianku" tentu tidak harus dibaca secara sempit sebagai hasrat terhadap kematian fisik. Dalam konteks refleksi perjuangan, ungkapan "mungkin engkau butuh kematianku" lebih tepat dipahami sebagai simbol dari pengorbanan tertinggi, yaitu kesediaan melepaskan sesuatu yang paling berharga demi sesuatu yang

diyakini memiliki nilai yang lebih besar daripada kepentingan diri sendiri. Dalam beberapa konteks sejarah, pengorbanan tertinggi itu memang berarti kematian secara literal. Dalam konteks lain, pengorbanan tertinggi dapat berarti kematian simbolik dari kenyamanan, ambisi personal, identitas lama, bahkan kehidupan yang sebelumnya aman dan terprediksi.

Namun bagaimanapun bentuknya, makna dasar dari "mungkin engkau butuh kematianku" tetap sama, yakni pada titik tertentu, perjuangan yang sungguh-sungguh selalu bertanya kepada manusia tentang batas pengorbanannya.

Ini adalah pertanyaan tentang batas pengorbanan yang tidak romantis. Pertanyaan ini tidak nyaman. Bahkan bagi banyak orang, pertanyaan ini terasa terlalu berat untuk dipikirkan. Kita hidup di zaman yang secara naluriah menempatkan keselamatan diri sebagai prioritas utama, dan prioritas keselamatan diri ini adalah sesuatu yang manusiawi. Naluri untuk bertahan hidup adalah bagian mendasar dari kemanusiaan. Karena itu, kesediaan untuk mempertaruhkan diri demi sesuatu yang lebih besar tidak pernah boleh dipandang sebagai sesuatu yang biasa. Justru karena kesediaan ini tidak biasa, kesediaan mempertaruhkan diri menjadi bentuk pengorbanan tertinggi.

Sejarah manusia penuh dengan contoh-contoh di mana perubahan besar tidak lahir hanya dari gagasan yang cerdas, tetapi juga dari keberanian manusia yang bersedia membayar harga yang sangat mahal untuk

keyakinannya. Tidak semua pejuang harus mati. Bahkan idealnya, perubahan dapat dicapai tanpa pengorbanan yang ekstrem. Namun sejarah juga menunjukkan bahwa sistem yang sangat mapan, terutama sistem yang menyangkut kekuasaan, kepentingan, dan dominasi, tidak selalu memberi ruang perubahan tanpa resistensi yang keras.

Dalam konteks resistensi sistem seperti itulah, kita mengenal tokoh-tokoh yang dalam berbagai zaman memilih tetap berdiri meskipun memahami risiko yang mungkin harus mereka hadapi. Sebagian tokoh menghadapi pembuangan. Sebagian tokoh kehilangan kebebasan. Sebagian tokoh kehilangan nama baik. Sebagian tokoh dipisahkan dari lingkungan sosialnya. Dan sebagian tokoh, dalam bentuk paling ekstrem, benar-benar kehilangan nyawanya.



Yang menarik, keberanian seperti ini hampir tidak pernah lahir dari sekadar keberanian emosional sesaat. Keberanian mempertaruhkan diri bukan hasil

dari adrenalin, kemarahan, atau romantisme perjuangan. Jika hanya bertumpu pada emosi, keberanian semacam itu biasanya cepat padam. Pengorbanan tertinggi justru lebih sering lahir dari sesuatu yang jauh lebih tenang dan lebih dalam, yakni keyakinan moral.

Keberanian moral berbeda dari keberanian fisik biasa. Banyak orang mampu menunjukkan keberanian dalam situasi spontan, tetapi tidak semua orang mampu mempertahankan keberanian ketika risiko yang dihadapi benar-benar menyentuh hidupnya secara nyata. Keberanian moral adalah kemampuan untuk tetap berdiri pada sesuatu yang diyakini benar meskipun konsekuensinya berat, bahkan ketika tidak ada jaminan kemenangan, tidak ada kepastian dukungan, dan tidak ada pengakuan yang menenangkan ego. Di sinilah letak perbedaan mendasar antara keberanian impulsif dan keberanian yang matang.

Keberanian impulsif sering muncul karena emosi seseorang yang memuncak. Keberanian impulsif bisa tampak heroik, tetapi belum tentu tahan lama. Sebaliknya, keberanian moral sering justru tampak tenang. Keberanian moral tidak selalu keras secara visual. Kadang keberanian moral hadir dalam bentuk keteguhan yang diam tetapi tidak bergeser. Keberanian moral lahir dari kesimpulan batin bahwa ada nilai tertentu yang tidak boleh dikorbankan, meskipun harga untuk mempertahankan nilai tersebut sangat tinggi.

Dalam sejarah perjuangan bangsa-bangsa, kualitas keberanian moral inilah yang sering menjadi

pembeda antara mereka yang sekadar bereaksi terhadap keadaan dan mereka yang benar-benar mengubah arah sejarah. Sebab perubahan besar jarang lahir dari manusia yang hanya berani ketika situasi aman. Perubahan besar lebih sering lahir dari manusia yang tetap memegang prinsip ketika situasi justru menekan mereka untuk menyerah.

Namun pembicaraan tentang pengorbanan tertinggi harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Buku ini tidak sedang mendorong glorifikasi kematian, romantisasi penderitaan, atau pemujaan terhadap pengorbanan ekstrem sebagai ukuran utama kebenaran. Sikap glorifikasi semacam itu akan menjadi penyederhanaan yang berbahaya. Tidak semua perjuangan menuntut pengorbanan nyawa. Tidak semua keberanian harus diwujudkan dalam bentuk konfrontasi dramatis. Bahkan dalam banyak situasi, strategi perjuangan yang matang justru bertujuan menghindari pengorbanan yang tidak perlu.

Karena itu, inti dari bab ini bukanlah ajakan untuk mencari kematian, melainkan refleksi tentang kesiapan moral menghadapi kemungkinan bahwa perjuangan sejati kadang menuntut pelepasan yang sangat besar.

Dalam makna yang lebih luas, "kematian" di sini juga dapat dipahami sebagai kematian dari diri lama seseorang. Ada orang yang tidak kehilangan nyawa, tetapi kehilangan seluruh identitas sosial yang sebelumnya memberi rasa aman. Ada pejuang yang tidak mati secara fisik, tetapi harus melepaskan ambisi pribadi yang selama ini menjadi pusat hidupnya. Ada

pejuang yang tidak kehilangan tubuhnya, tetapi kehilangan kehidupan yang nyaman dan stabil demi jalan perjuangan yang lebih berat.



Semua bentuk kehilangan itu dalam pengertian simbolik adalah bentuk kematian tertentu. Sebab setiap kali manusia melepaskan sesuatu yang sangat melekat pada dirinya demi nilai yang lebih besar, ada bagian dari diri manusia tersebut yang memang harus berakhir. Dan sering kali justru di situlah kelahiran baru dari diri manusia itu dimulai. Sejarah perjuangan tidak hanya berbicara tentang orang-orang yang secara harfiah gugur tetapi juga tentang manusia-manusia yang rela membiarkan versi lama dari dirinya mati agar sesuatu yang lebih besar dapat hidup.

Mereka melepaskan kenyamanan agar kesadaran bisa tumbuh. Mereka melepaskan reputasi agar kebenaran tetap memiliki suara. Mereka melepaskan stabilitas agar perubahan memiliki kemungkinan untuk terjadi. Dalam pengertian ini, pengorbanan tertinggi

bukan selalu tentang akhir biologis seseorang melainkan tentang keputusan eksistensial seseorang untuk menempatkan nilai di atas kepentingan diri.

Keputusan eksistensial semacam itu tidak pernah mudah karena keputusan ini menuntut kejernihan berpikir, sebab tanpa kejernihan manusia bisa terjebak dalam pengorbanan yang salah arah. Keputusan ini menuntut kebijaksanaan karena tanpa kebijaksanaan keberanian bisa berubah menjadi kenekatan. Keputusan ini menuntut spiritualitas karena tanpa fondasi batin yang sehat manusia mudah lelah sebelum sampai pada makna pengorbanannya. Dan keputusan ini menuntut keberanian moral karena pada akhirnya manusia harus menjawab sendiri pertanyaan tentang apa yang benar-benar ia anggap layak untuk dipertahankan.

Dalam kehidupan kebangsaan, pertanyaan tentang batas pengorbanan ini sangat relevan. Sebab setiap generasi, pada caranya masing-masing, akan berhadapan dengan ujian yang memaksa mereka menentukan batas pengorbanannya. Tidak semua generasi menghadapi bentuk ancaman yang sama. Tidak semua perjuangan memiliki wajah yang identik. Namun pertanyaan dasarnya tetap serupa, yaitu sejauh mana seseorang bersedia melampaui kepentingan pribadinya demi sesuatu yang lebih besar dari dirinya?

Mayoritas manusia mungkin tidak sampai pada bentuk pengorbanan yang ekstrem, dan sikap mayoritas ini dapat dipahami. Namun sejarah hampir selalu memiliki sebagian kecil manusia yang pada titik tertentu menjawab pertanyaan tentang batas pengorbanan itu dengan sangat tegas.

Bukan karena mereka tidak mencintai hidup karena justru sering kali mereka sangat memahami nilai kehidupan sehingga mereka menolak membiarkan kehidupan hanya dipakai untuk mempertahankan kenyamanan yang kosong.

Pada akhirnya, ungkapan bahwa mungkin engkau butuh kematianku bukan pertama-tama tentang kematian melainkan tentang ukuran kesungguhan manusia terhadap sesuatu yang diyakininya benar. Sebab selama perjuangan hanya menuntut hal-hal yang nyaman dari seseorang, orang tersebut belum benar-benar mengetahui batas keyakinannya karena batas keyakinan seseorang baru terlihat ketika harga yang diminta oleh perjuangan mulai menyentuh sesuatu yang paling berharga dalam dirinya. Dan sejarah menunjukkan bahwa di titik-titik semacam itulah watak sejati seorang pejuang biasanya terlihat.

SHIKSHAYATI RAJANITIVIDAM

BAB 17
Akan Kumintakan Izin kepada Allah

Setelah membahas tentang pengorbanan, tentang harga perubahan, dan tentang kemungkinan bahwa perjuangan yang sungguh-sungguh dapat menuntut pelepasan yang sangat besar, kita sampai pada satu dimensi yang menjadi inti terdalam dari seluruh perjalanan ini, yaitu kepada siapa pada akhirnya perjuangan itu bersandar?



Pertanyaan tentang sandaran akhir perjuangan ini sangat penting, karena dalam sejarah manusia, banyak perjuangan gagal bukan semata-mata karena lawannya terlalu kuat, melainkan karena pusat orientasi batin para pejuangnya tidak cukup kokoh. Ada perjuangan yang dimulai dengan idealisme, tetapi runtuh ketika tekanan datang. Ada gerakan yang lahir dari semangat perubahan, tetapi kehilangan arah ketika

harapan tidak segera menjadi kenyataan. Ada manusia yang pada awalnya tampak sangat berani, tetapi perlahan kelelahan karena seluruh beban perjuangan dipikul oleh orang tersebut seolah-olah semuanya harus selesai oleh kekuatan dirinya sendiri.

Di titik inilah pertanyaan tentang fondasi spiritual menjadi sangat mendasar. Sebab manusia, sekuat apa pun manusia secara intelektual, sosial, atau psikologis, tetap memiliki keterbatasan. Manusia tidak mampu mengendalikan seluruh variabel sejarah. Manusia tidak mampu memastikan bagaimana orang lain akan merespons perjuangannya. Manusia tidak mampu menjamin kapan perubahan akan datang. Manusia bahkan tidak mampu memastikan apakah usaha perjuangannya akan berbuah pada masa hidupnya sendiri.

Jika seluruh perjuangan hanya bertumpu pada kapasitas manusia, maka kelelahan hanyalah persoalan waktu bagi manusia tersebut. Karena itu bab ini membawa kita pada inti yang lebih dalam yaitu tauhid perjuangan. Tauhid dalam pengertian paling mendasar adalah pengesaan kepada Allah. Namun dalam konteks perjuangan, tauhid bukan sekadar pengakuan teologis formal bahwa Tuhan itu satu karena tauhid perjuangan berarti menempatkan Allah sebagai pusat orientasi tertinggi dari seluruh gerak perjuangan manusia. Artinya perjuangan tidak lagi semata-mata didorong oleh ego personal, ambisi historis, keinginan untuk dikenang, atau bahkan semata-mata kemarahan terhadap keadaan. Semua unsur manusiawi itu mungkin tetap ada dalam diri pejuang tetapi unsur-

unsur tersebut tidak menjadi pusat perjuangan karena pusat perjuangan adalah penghambaan kepada Allah.

Ini adalah perbedaan orientasi yang sangat penting. Seseorang yang berjuang karena ego akan sangat tergantung pada hasil yang terlihat. Jika hasil cepat datang, orang tersebut bersemangat. Jika hasil lambat, orang tersebut frustrasi. Jika mendapat dukungan, orang tersebut merasa kuat. Jika ditolak, orang tersebut mulai goyah. Jika dipuji, orang tersebut semakin berapi-api. Jika dicela, orang tersebut kehilangan tenaga. Namun seseorang yang berjuang dalam kerangka tauhid memiliki orientasi yang berbeda. Pejuang yang bertauhid tetap berpikir strategis, tetap bekerja keras, tetap membangun struktur perjuangan, dan tetap menggunakan akal sehat serta perencanaan yang matang. Tetapi pusat energi pejuang yang bertauhid bukan pada respons manusia melainkan pada kesadaran bahwa perjuangan adalah bagian dari tanggung jawab penghambaan kepada Allah.

Orientasi tauhid ini tidak membuat perjuangan menjadi pasif karena justru sebaliknya yaitu tauhid yang sehat melahirkan kemerdekaan batin yang sangat besar pada diri pejuang, sebab pejuang tidak lagi sepenuhnya diperbudak oleh opini publik, rasa takut terhadap penilaian manusia, atau obsesi terhadap hasil yang instan.

Dalam sejarah spiritual, inilah salah satu bentuk kebebasan terdalam manusia. Manusia yang hanya takut kehilangan posisi sosial akan mudah dikendalikan. Manusia yang hanya mengejar pengakuan dari orang lain akan mudah dimanipulasi.

Manusia yang menggantungkan seluruh harapannya pada manusia lain akan mudah kecewa. Tetapi manusia yang pusat orientasinya tertanam pada Allah memiliki fondasi batin yang berbeda dari semua itu. Bukan berarti manusia yang bertauhid tidak pernah takut, bukan berarti manusia yang bertauhid tidak pernah sedih, dan bukan berarti manusia yang bertauhid kebal terhadap kelelahan. Tetapi manusia yang bertauhid memiliki pusat gravitasi batin yang tidak mudah diguncang oleh perubahan suasana sosial. Di sinilah kita masuk pada konsep tawakal aktif.



Salah satu kesalahpahaman terbesar dalam kehidupan spiritual adalah memahami tawakal sebagai bentuk kepasrahan yang pasif. Dalam pembacaan yang dangkal, tawakal sering diartikan sebagai menyerahkan semuanya kepada Tuhan tanpa upaya yang memadai. Cara pandang pasif seperti ini bukan hanya tidak produktif tetapi juga berbahaya karena cara pandang ini menjadikan spiritualitas sebagai pembenaran bagi

kemalasan atau ketidakberanian. Padahal dalam tradisi Islam yang sehat, tawakal justru lahir setelah ikhtiar yang sungguh-sungguh. Tawakal bukan pengganti usaha manusia, bukan alasan untuk tidak berpikir, bukan pembenaran untuk tidak membangun strategi, dan bukan cara halus untuk lari dari tanggung jawab.

Sebaliknya, tawakal adalah kondisi batin ketika manusia telah menggunakan akal, tenaga, ilmu, waktu, strategi, dan seluruh kemampuan yang Allah titipkan kepada manusia, lalu manusia menyadari dengan penuh kerendahan hati bahwa hasil akhir dari semua usaha tersebut tetap tidak sepenuhnya berada dalam kendali manusia. Inilah yang dapat disebut sebagai tawakal aktif yaitu tawakal yang menuntut ikhtiar maksimal dari manusia karena tawakal aktif ini tidak menjadikan ego manusia sebagai pusat kendali absolut.

Dalam perjuangan bangsa, konsep tawakal aktif ini sangat penting karena medan perubahan sosial hampir selalu penuh ketidakpastian. Tidak ada rumus sederhana yang menjamin bahwa strategi tertentu pasti berhasil. Tidak ada kepastian bahwa masyarakat akan merespons perjuangan sesuai harapan. Tidak ada jaminan bahwa jalan yang ditempuh oleh pejuang akan menghasilkan buah dalam waktu yang diinginkan oleh pejuang. Jika manusia memikul seluruh ketidakpastian medan perjuangan ini sendirian, manusia tersebut akan cepat habis energi batinnya. Namun jika manusia memahami bahwa tugasnya adalah berikhtiar sebaik mungkin sementara hasil akhir adalah wilayah yang lebih besar daripada kapasitas manusia, maka manusia tersebut memperoleh ketenangan batin yang berbeda.

Ketenangan dari tawakal aktif ini bukan ketenangan orang yang menyerah melainkan ketenangan orang yang memahami batas ontologis dirinya sebagai makhluk.

Pejuang yang bertawakal aktif tahu bahwa dirinya wajib berjuang tetapi juga tahu bahwa dirinya bukan Tuhan. Pejuang itu wajib menanam benih perubahan tetapi tidak berkuasa mutlak atas musim panen. Pejuang itu wajib mengetuk pintu kesadaran bangsa tetapi tidak mampu memaksa hati manusia lain untuk terbuka. Pejuang itu wajib menjaga api perjuangan tetapi tidak dapat mengatur kapan cahaya api itu akan menjadi fajar. Kesadaran batas ontologis semacam ini justru membuat manusia lebih tahan lama dalam perjuangan.

Sebab salah satu penyebab terbesar kelelahan dalam aktivisme, perjuangan sosial, bahkan gerakan moral adalah ilusi bahwa semuanya harus berhasil sesuai dengan timeline ego manusia. Ketika harapan sesuai timeline itu tidak terjadi, frustrasi datang pada diri pejuang. Keputusasaan tumbuh dalam hati pejuang. Kemarahan pejuang menyebabkan mereka kehilangan arah. Dan perlahan energi perjuangan habis.

Tawakal aktif memutus siklus frustrasi ini dengan cara yang sangat mendalam yaitu tawakal aktif mengajarkan manusia untuk bekerja dengan kesungguhan penuh tanpa diperbudak oleh obsesi terhadap kontrol total atas hasil.

Di titik paling dalam, semua pembahasan tentang tawakal aktif ini membawa kita pada konsep penyerahan total kepada Allah.



Istilah penyerahan total ini mudah disalahpahami jika dibaca secara dangkal karena penyerahan total bukan berarti manusia berhenti berpikir, berhenti bertindak, atau menanggalkan tanggung jawab sosialnya. Penyerahan total justru terjadi setelah manusia memberikan dirinya secara maksimal dalam ikhtiar. Penyerahan total adalah kondisi ketika manusia berkata di dalam batinnya bahwa aku telah menggunakan seluruh kemampuan yang Engkau titipkan, aku telah berjalan sejauh yang aku mampu, aku telah menjaga niat sebaik yang aku bisa, dan kini aku menyerahkan apa yang berada di luar kendaliku kepada-Mu. Ini adalah bentuk kedewasaan spiritual yang sangat tinggi.

Karena manusia secara alami ingin mengendalikan segalanya, hal itulah yang disebut ego. Ego manusia selalu ingin kepastian, ingin hasil, ingin validasi dari lingkungan, dan ingin kemenangan yang bisa dilihat oleh mata. Namun penyerahan total memanggil manusia untuk melampaui dorongan-

dorongan ego itu karena penyerahan total mengajak manusia menerima bahwa dalam kehidupan ini tidak semua buah perjuangan harus dipetik oleh tangan yang menanamnya, tidak semua jawaban dari doa datang sesuai waktu yang diinginkan oleh manusia, tidak semua pengorbanan langsung memperlihatkan maknanya di dunia, dan tidak semua sejarah perubahan selesai dalam satu generasi. Dalam perspektif tauhid, ketidakpastian dan ketidaksempurnaan ini bukan tragedi karena ini adalah bagian dari penghambaan manusia kepada Allah.

Karena manusia memang tidak diciptakan untuk menjadi pengendali sejarah sepenuhnya. Manusia diciptakan untuk berikhtiar dengan amanah, dengan ilmu, dengan keberanian, dan dengan keikhlasan, lalu menyerahkan hasil akhir perjuangannya kepada Allah.

Di sinilah makna terdalam dari kalimat "akan kumintakan izin kepada Allah" menjadi begitu kuat. Kalimat itu bukan ungkapan fatalistik, melainkan bentuk kesadaran spiritual tertinggi bahwa bahkan pengorbanan terbesar sekalipun tidak diposisikan sebagai ekspresi ego heroik, tetapi sebagai tindakan seorang hamba yang tetap menempatkan Tuhannya sebagai pusat dari segala sesuatu.

Karena perjuangan tanpa tauhid bisa berubah menjadi ambisi pribadi, perjuangan tanpa tawakal bisa berubah menjadi kelelahan batin, dan perjuangan tanpa penyerahan total bisa berubah menjadi keputusasaan. Tetapi perjuangan yang berakar pada tauhid memiliki daya tahan yang berbeda. Perjuangan yang bertauhid mungkin tetap sunyi, mungkin tetap berat, dan

mungkin tetap panjang. Namun perjuangan yang bertauhid tidak kehilangan makna karena pusat perjuangan yang bertauhid bukan pada keberhasilan manusia semata melainkan pada kesetiaan seorang hamba kepada Tuhannya.

SEKOLAH NEGARAWAN
SHIKSHAYATI RAJANITIVIDAM

BAGIAN VI – JALAN SEKOLAH NEGARAWAN

BAB 18
Negara Salah Desain



Setelah menempuh perjalanan panjang dalam buku ini, membaca bentuk-bentuk penjajahan modern,

memahami bagaimana rakyat dapat dilumpuhkan secara sistematis, menelaah mengapa hanya sedikit yang mampu bertahan, hingga memasuki wilayah spiritual tentang perjuangan, pengorbanan, dan penyerahan total kepada Allah, kita akhirnya sampai pada pertanyaan yang paling konkret yaitu jika seluruh persoalan ini begitu sistemik, di manakah akar desain kerusakannya?

Pertanyaan tentang akar desain kerusakan ini penting, karena tanpa keberanian menelusuri akar masalah, seluruh pembahasan sebelumnya hanya akan berhenti pada diagnosis sosial tanpa arah solusi struktural. Sebuah bangsa tidak bisa terus-menerus hanya mengeluhkan gejala jika bangsa tersebut tidak berani menguji arsitektur yang membentuk gejala tersebut. Jika kecerdasan bangsa melemah, spiritualitas bangsa mengalami distorsi, budaya bangsa kehilangan orientasi, dan rakyat kehilangan daya koreksi terhadap kekuasaan, maka kita perlu bertanya dengan jujur, apakah semua ini semata-mata persoalan moral individu, atau ada desain ketatanegaraan yang ikut memproduksi kondisi tersebut?

Dalam kerangka pemikiran buku ini, jawaban terhadap pertanyaan itu mengarah pada satu tesis mendasar yaitu bahwa Indonesia bukan hanya mengalami masalah orang tetapi juga masalah desain negara. Ini adalah perbedaan orientasi analisis yang sangat penting.

Banyak diskusi publik terjebak pada personalisasi persoalan. Ketika ada korupsi di negeri ini, yang disalahkan adalah pejabat tertentu. Ketika

kebijakan buruk muncul, fokus diskusi diarahkan pada figur tertentu. Ketika demokrasi terasa mahal dan melelahkan, perhatian publik tertuju pada perilaku elite tertentu. Semua penjelasan personal itu tentu memiliki dasar, karena individu memang memiliki tanggung jawab moral. Namun jika pola kerusakan terus berulang lintas generasi, lintas pemerintahan, lintas figur, maka analisis yang jujur harus berani melangkah lebih jauh dari sekadar personalisasi. Persoalannya mungkin bukan hanya siapa yang duduk di dalam sistem, tetapi bagaimana sistem itu sendiri didesain.

Sebuah struktur yang salah desain dapat terus-menerus menghasilkan perilaku yang bermasalah bahkan ketika struktur tersebut diisi oleh orang-orang yang secara individual mungkin memiliki niat baik. Sebaliknya, struktur yang sehat dapat membatasi kerusakan bahkan ketika manusia yang mengisi struktur tersebut tidak sepenuhnya ideal.

Karena itu, pertanyaan tentang desain negara bukanlah isu teknis yang hanya relevan bagi ahli hukum tata negara. Pertanyaan tentang desain negara adalah pertanyaan mendasar tentang bagaimana kekuasaan diatur, bagaimana kedaulatan rakyat diwujudkan, dan bagaimana negara menjaga dirinya agar tidak berubah menjadi instrumen kepentingan yang menjauh dari rakyat.

Dalam konteks Indonesia, salah satu titik paling kontroversial dalam pembacaan buku ini adalah perubahan konstitusional pasca-amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945).



Dalam wacana arus utama, amandemen UUD NRI Tahun 1945 sering dibaca sebagai bagian dari reformasi demokratis yang bertujuan memperbaiki sistem lama, membatasi konsentrasi kekuasaan, dan membuka ruang partisipasi yang lebih luas bagi rakyat. Pembacaan arus utama ini tentu memiliki argumen historisnya sendiri.

Namun dalam perspektif yang sedang dibangun dalam buku ini, pertanyaan kritisnya bukan semata apakah amandemen UUD NRI Tahun 1945 dilakukan dengan niat baik, melainkan apakah hasil akhir dari amandemen tersebut benar-benar menghasilkan desain negara yang lebih sehat bagi kedaulatan rakyat. Di titik inilah muncul kritik mendasar bahwa perubahan konstitusional pasca-reformasi justru melahirkan persoalan baru yang sangat serius.

Salah satu perubahan terbesar dalam amandemen UUD NRI Tahun 1945 adalah bergesernya struktur relasi antar lembaga negara dan pusat kedaulatan kekuasaan. Dalam konstruksi lama, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) ditempatkan sebagai lembaga tertinggi negara yang secara teoritis menjadi manifestasi kedaulatan rakyat. Dalam praktik historisnya, tentu ada banyak kritik terhadap implementasi model tersebut, tetapi secara desain, gagasan MPR sebagai lembaga tertinggi negara menempatkan kedaulatan rakyat dalam satu struktur permusyawaratan yang memiliki posisi fundamental dalam sistem ketatanegaraan.

Pasca-amandemen, arsitektur ketatanegaraan ini berubah secara drastis. MPR tidak lagi menempati posisi yang sama seperti sebelumnya. Relasi kekuasaan antar lembaga negara bergeser. Pemilihan langsung menjadi instrumen utama legitimasi kekuasaan. Partai politik menjadi gerbang yang semakin dominan dalam sirkulasi kekuasaan formal.

Secara normatif, perubahan arsitektur ketatanegaraan pasca-amandemen ini dipresentasikan sebagai demokratisasi. Namun pertanyaan kritisnya adalah demokratisasi untuk siapa dan dengan desain seperti apa. Sebab dalam praktiknya, ketika partai politik menjadi pintu utama menuju hampir seluruh jabatan strategis dalam sistem formal, muncul risiko besar bahwa kedaulatan rakyat secara substantif berubah menjadi kompetisi antar mesin partai politik yang sangat bergantung pada sumber daya, jaringan elite, dan logika elektoral yang mahal. Di sinilah

pembahasan tentang oligarki partai menjadi relevan yaitu bahwa partai politik dalam teori demokrasi memiliki fungsi penting karena partai politik adalah kanal representasi, pendidikan politik, agregasi kepentingan, dan mekanisme kaderisasi kepemimpinan. Dalam desain ideal, partai politik adalah jembatan antara rakyat dan negara.

Namun ketika partai-partai politik berkembang dalam pola yang sangat oligarkis, fungsi ideal partai politik itu mengalami distorsi. Keputusan strategis dalam partai sering semakin terkonsentrasi pada elite tertentu. Proses pencalonan dalam partai menjadi sangat bergantung pada konfigurasi internal yang tidak selalu transparan. Biaya kampanye untuk berpartisipasi meningkat. Loyalitas struktural kader lebih sering diarahkan ke mekanisme partai daripada hubungan substantif dengan rakyat.

Akibat dari pola partai yang oligarkis ini, rakyat secara formal tetap memilih dalam pemilu tetapi pilihan yang tersedia bagi rakyat sudah melalui proses penyaringan yang sangat ditentukan oleh struktur elite partai. Di titik ini, demokrasi elektoral dapat tetap berjalan secara prosedural tetapi kedaulatan substantif rakyat menjadi lebih problematik. Pembahasan tentang desain negara ini membawa kita pada persoalan konseptual yang lebih dalam yaitu perbedaan antara negara dan pemerintah.

Dalam diskursus publik sehari-hari, dua istilah ini sering digunakan seolah-olah identik padahal secara teoritis negara dan pemerintah tidak sama.



Negara adalah konstruksi yang lebih besar, lebih mendasar, dan lebih permanen karena negara mencakup konstitusi, kedaulatan, wilayah, rakyat, institusi dasar, dan prinsip-prinsip fundamental yang menopang kehidupan bersama. Pemerintah sebaliknya adalah pengelola kekuasaan eksekutif dalam periode

tertentu. Pemerintah datang dan pergi dalam siklus kekuasaan sedangkan negara seharusnya lebih permanen daripada pemerintah. Pemerintah adalah pelaksana roda pemerintahan dan negara adalah rumah konstitusional bagi seluruh warga.

Masalah muncul ketika dalam praktik bernegara, batas psikologis dan struktural antara negara dan pemerintah menjadi kabur. Ketika loyalitas aparatur, institusi, bahkan persepsi publik terlalu terpusat pada pemerintah sebagai pengelola kekuasaan jangka pendek, maka fungsi negara sebagai kerangka yang lebih tinggi dapat melemah.

Di titik inilah kritik tentang "negara yang salah desain" menemukan konteksnya. Sebab jika struktur ketatanegaraan menghasilkan konsentrasi kekuasaan yang terlalu bergantung pada mekanisme partisan, jika relasi antar lembaga negara tidak cukup menciptakan keseimbangan yang sehat, dan jika kedaulatan rakyat lebih banyak hadir sebagai prosedur elektoral daripada substansi permusyawaratan yang matang, maka persoalannya bukan hanya perilaku elite, tetapi arsitektur sistem ketatanegaraan itu sendiri.

Kerusakan struktur ketatanegaraan tidak selalu tampak dalam bentuk keruntuhan dramatis. Sering kali kerusakan struktur ketatanegaraan justru bekerja secara perlahan. Masyarakat tetap melihat pemilu berlangsung. Lembaga-lembaga negara tetap berjalan. Pemerintahan tetap berganti secara periodik. Aktivitas pejabat tetap ramai di permukaan. Dari luar, sistem ketatanegaraan tampak hidup dan berfungsi.

Namun jika desain dasar sistem ketatanegaraan tidak sehat, maka energi bangsa dapat terserap habis untuk kompetisi prosedural tanpa menghasilkan koreksi substantif yang memadai. Biaya demokrasi menjadi mahal bagi rakyat. Kekuasaan menjadi sangat transaksional. Rakyat semakin jauh dari proses pengambilan keputusan yang sesungguhnya. Dan institusi-institusi negara perlahan kehilangan kualitas sebagai penjaga kepentingan jangka panjang bangsa. Tentu pembacaan kritis terhadap desain negara seperti ini bukan tanpa perdebatan karena banyak ahli tata negara akan memiliki argumentasi yang berbeda.

Perbedaan pendapat itu wajar dalam ruang intelektual yang sehat. Namun buku ini sedang membangun satu garis pemikiran tertentu yaitu bahwa jika kita sungguh ingin memahami mengapa berbagai bentuk pelumpuhan bangsa terus berulang, maka keberanian untuk menguji desain ketatanegaraan adalah sesuatu yang tidak dapat dihindari. Sebab bangsa yang terus-menerus hanya mengganti aktor kekuasaan tanpa pernah menguji arsitektur panggung ketatanegaraannya mungkin akan terus memainkan drama yang sama dengan pemeran yang berbeda.

Dan jika tesis ini benar, maka perjuangan membangunkan bangsa tidak cukup berhenti pada perubahan moral individual atau koreksi kebijakan parsial. Perjuangan membangunkan bangsa harus berani memasuki pertanyaan yang lebih mendasar, yaitu apakah rumah besar bernama negara ini masih didesain dengan cara yang benar untuk menjaga kedaulatan rakyat, atau justru telah bergerak terlalu

jauh dari fondasi yang seharusnya menopang kedaulatan rakyat tersebut?

BAB 19
Mengembalikan Kedaulatan Rakyat



Jika pada bab sebelumnya kita membahas kemungkinan bahwa persoalan bangsa ini tidak hanya terletak pada kualitas para aktornya, tetapi juga pada desain struktur ketatanegaraan yang dianggap telah mengalami distorsi, maka pertanyaan berikutnya menjadi sangat mendasar adalah jika desain struktur ketatanegaraan itu memang bermasalah, ke mana bangsa ini harus kembali?

Pertanyaan tentang arah kembali ini penting, karena kritik tanpa arah hanya akan melahirkan frustrasi. Membongkar persoalan tanpa menawarkan horizon perbaikan akan membuat pembacaan kritis kehilangan makna praktisnya. Karena itu, jika tesis bahwa negara ini mengalami persoalan desain ingin dipertahankan, maka harus ada gagasan yang jelas

tentang bagaimana kedaulatan rakyat dapat dipulihkan secara lebih sehat.

Dalam inti pemikiran bab ini terdapat satu prinsip yang sesungguhnya sangat mendasar dalam teori negara modern maupun dalam semangat konstitusional Indonesia sendiri, yaitu rakyat adalah pemilik kedaulatan.

Prinsip bahwa rakyat adalah pemilik kedaulatan ini terdengar sederhana, bahkan terlalu sering diulang dalam retorika kekuasaan sehingga prinsip ini kehilangan daya reflektifnya. Namun justru karena prinsip ini terlalu sering diucapkan, kita perlu berhenti sejenak untuk bertanya apa sebenarnya makna dari pernyataan bahwa rakyat adalah pemilik kedaulatan. Apakah prinsip kedaulatan rakyat sekadar berarti rakyat datang ke tempat pemungutan suara setiap beberapa tahun sekali, apakah prinsip kedaulatan rakyat berarti rakyat diberi kesempatan memilih di antara kandidat yang telah disaring oleh mekanisme tertentu, apakah prinsip kedaulatan rakyat berarti kedaulatan rakyat telah terpenuhi hanya karena prosedur demokrasi berjalan, ataukah kedaulatan rakyat seharusnya memiliki makna yang jauh lebih substantif.

Secara filosofis, kedaulatan rakyat berarti bahwa legitimasi tertinggi dalam kehidupan bernegara berasal dari rakyat, bukan dari kelompok elite, bukan dari kekuatan ekonomi, bukan dari struktur birokrasi, dan bukan dari penguasa sementara. Negara ada karena rakyat. Kekuasaan memperoleh legitimasi karena

rakyat. Konstitusi hidup untuk melindungi kepentingan rakyat.

Namun dalam praktik ketatanegaraan, selalu ada jarak antara prinsip normatif kedaulatan rakyat dan realitas institusional yang ada. Banyak negara secara formal mengakui kedaulatan rakyat dalam konstitusinya tetapi desain kelembagaan negara-negara tersebut membuat rakyat hanya hadir sebagai simbol legitimasi prosedural, sementara proses substantif pengambilan arah bangsa sangat ditentukan oleh struktur yang lebih tertutup.

Di sinilah kritik terhadap demokrasi prosedural menjadi relevan yaitu apakah rakyat memilih dalam pemilu tetapi rakyat sungguh menentukan arah negara, apakah rakyat memberi suara tetapi suara rakyat itu benar-benar menjadi pengarah desain negara, dan apakah rakyat disebut sebagai pemilik kedaulatan tetapi rakyat memiliki mekanisme koreksi yang memadai ketika desain negara justru menjauh dari kepentingan rakyat.

Pertanyaan-pertanyaan kritis ini tidak dimaksudkan untuk menolak demokrasi, melainkan untuk menuntut pembacaan yang lebih jujur tentang kualitas demokrasi itu sendiri. Dalam konteks inilah gagasan tentang mengembalikan kedaulatan rakyat memperoleh maknanya. Yang dimaksud dengan mengembalikan kedaulatan rakyat bukan sekadar memperbanyak pemilu, bukan pula sekadar memperkeras retorika populis tentang rakyat. Yang dimaksud dengan mengembalikan kedaulatan rakyat adalah memikirkan ulang bagaimana desain negara

dapat lebih sungguh-sungguh menempatkan rakyat sebagai sumber legitimasi substantif, bukan sekadar simbol prosedural.

Salah satu gagasan yang muncul dalam kerangka pemikiran ini adalah peninjauan kembali posisi Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai representasi dari mandat kedaulatan rakyat.



Dalam konstruksi awal ketatanegaraan Indonesia, MPR diposisikan sebagai manifestasi dari kedaulatan rakyat yang bekerja melalui sistem permusyawaratan. Tentu implementasi historis model MPR ini memiliki persoalan yang tidak sedikit, dan pembacaan kritis terhadap masa lalu tetap diperlukan. Namun secara konseptual, terdapat satu gagasan penting yang patut diperhatikan dari konstruksi awal MPR, yaitu bahwa kedaulatan rakyat tidak semata-mata diwujudkan melalui kompetisi elektoral individual, tetapi melalui struktur permusyawaratan yang dirancang untuk menjadi penjaga arah negara.

Di sinilah gagasan tentang MPR sebagai mandataris rakyat muncul kembali. Istilah mandataris mengandung makna yang sangat penting. Mandataris bukan pemilik kekuasaan. Mandataris adalah penerima amanah. Dalam pengertian ini, mandat yang diemban oleh MPR bukan berasal dari diri MPR sendiri, tetapi dari pihak yang memberi amanah, yaitu rakyat.

Jika rakyat adalah pemilik kedaulatan, maka secara teoritis, institusi tertentu seperti MPR dapat dirancang sebagai penerima amanah rakyat untuk menjaga arah dasar negara, memastikan desain ketatanegaraan tetap sehat, dan menjadi mekanisme koreksi ketika struktur kekuasaan menyimpang terlalu jauh dari kepentingan rakyat.

Tentu, gagasan penguatan peran MPR ini segera memunculkan pertanyaan kritis yang sangat wajar, yaitu bagaimana memastikan struktur MPR seperti itu tidak justru berubah menjadi pusat oligarki baru? Pertanyaan kritis ini sangat sah, karena sejarah

menunjukkan bahwa lembaga yang secara teoritis dirancang untuk mewakili rakyat pun dapat mengalami distorsi jika lembaga tersebut tidak memiliki mekanisme akuntabilitas yang sehat.

Karena itu, pembahasan tentang mengembalikan posisi strategis MPR tidak bisa sekadar berarti mengulang bentuk lama MPR secara mekanis. Yang dibutuhkan bukan nostalgia kelembagaan, melainkan desain baru MPR yang belajar dari kelemahan historis sekaligus menjawab tantangan zaman modern. Pembahasan tentang MPR ini membawa kita pada instrumen lain yang sering dibicarakan dalam diskursus kedaulatan rakyat modern, yaitu referendum.

Referendum pada dasarnya adalah mekanisme yang memungkinkan rakyat secara langsung memberikan keputusan terhadap isu-isu fundamental tertentu dalam kehidupan bernegara. Dalam banyak negara, referendum digunakan untuk pertanyaan-pertanyaan yang dianggap terlalu mendasar untuk diserahkan sepenuhnya kepada elite biasa, seperti perubahan konstitusi, arah integrasi nasional, atau keputusan-keputusan besar yang menyangkut struktur negara.

Gagasan referendum menarik karena referendum mencoba memperpendek jarak antara prinsip kedaulatan rakyat dan praktik pengambilan keputusan kenegaraan. Namun referendum juga bukan instrumen yang sempurna. Referendum dapat menjadi alat demokratis yang sehat, tetapi referendum juga dapat menjadi instrumen manipulasi opini publik jika masyarakat tidak memiliki kualitas literasi ilmu politik

yang memadai atau jika proses referendum dibentuk secara tidak adil.



Karena itu referendum bukanlah mantra ajaib dalam demokrasi karena referendum hanyalah sebuah alat. Nilai referendum sangat bergantung pada desain

pelaksanaannya, integritas proses referendum, kualitas pendidikan politik masyarakat, dan struktur pengaman institusional yang menyertai pelaksanaan referendum. Namun sebagai konsep politik, referendum mengingatkan kita pada satu hal penting yaitu bahwa kedaulatan rakyat tidak harus selalu dimediasi sepenuhnya oleh struktur elite kekuasaan.

Dalam konteks pemikiran yang sedang dibangun di buku ini, referendum dapat dibaca sebagai salah satu mekanisme korektif ketika persoalan yang dihadapi bangsa bukan lagi sekadar kebijakan teknis tetapi menyangkut pertanyaan mendasar tentang desain negara itu sendiri.

Di titik inilah pembicaraan kita sampai pada konsep koreksi desain negara. Setiap bangsa memiliki hak historis untuk mengevaluasi arsitektur ketatanegaraannya karena tidak ada desain konstitusional yang secara otomatis kebal dari kritik dan tidak ada sistem pemerintah yang begitu sakral sehingga tidak boleh diuji oleh realitas. Justru sistem pemerintah yang sehat adalah sistem yang memiliki keberanian untuk dikoreksi ketika sistem tersebut terbukti menghasilkan distorsi yang serius terhadap kedaulatan rakyat. Namun koreksi desain negara tentu bukan agenda yang sederhana karena koreksi desain negara tidak bisa didorong hanya oleh kemarahan sesaat, tidak bisa dibangun di atas nostalgia yang tidak kritis, tidak boleh menjadi proyek perebutan kekuasaan yang dibungkus dengan bahasa idealisme, dan harus lahir dari pembacaan mendalam atas kelemahan sistem, kejujuran historis terhadap masa lalu, kedewasaan para

aktor, dan visi jangka panjang tentang bentuk negara yang sungguh ingin dibangun oleh bangsa.

Karena pada akhirnya, pertanyaan dalam bab ini bukanlah apakah bangsa Indonesia ingin kembali ke masa lalu atau sepenuhnya menolak masa kini melainkan pertanyaan yang jauh lebih mendasar yaitu bagaimana memastikan bahwa rakyat benar-benar menjadi pemilik kedaulatan, bukan hanya secara retoris di atas kertas tetapi secara substantif dalam praktik bernegara.

Jika sebuah bangsa merasa bahwa desain ketatanegaraan yang ada tidak lagi cukup menjawab pertanyaan mendasar itu, maka diskusi tentang perubahan desain bukanlah bentuk pengkhianatan terhadap cita-cita negara. Justru bisa jadi, diskusi perubahan desain itulah bentuk kesetiaan yang paling mendalam terhadap cita-cita negara itu sendiri.

SHIKSHAYATI RAJANITIVIDAM

BAB 20
Empat Kaum Penjaga Bangsa



Setelah membahas persoalan desain negara, kedaulatan rakyat, dan kebutuhan untuk melakukan koreksi struktural terhadap arah ketatanegaraan, kita sampai pada pertanyaan yang sangat praktis sekaligus mendasar, yakni siapa yang akan menjaga bangsa ini?

Pertanyaan tentang siapa penjaga bangsa ini penting karena negara, sebaik apa pun desain konstitusionalnya, pada akhirnya tetap bergantung pada kualitas manusia yang menghidupkan negara tersebut. Struktur ketatanegaraan dapat dirancang dengan sangat baik, tetapi tanpa manusia yang memiliki kesadaran, integritas, dan orientasi

pengabdian yang benar, struktur itu akan mengalami pembusukan dari dalam.

Sebaliknya, manusia yang memiliki kualitas moral tinggi sekalipun akan kesulitan bekerja optimal jika manusia tersebut ditempatkan dalam desain negara yang sepenuhnya rusak. Karena itu, pembaruan bangsa selalu membutuhkan dua hal sekaligus, yaitu koreksi sistem dan hadirnya manusia-manusia penjaga.

Dalam kerangka pemikiran buku ini, penjaga bangsa bukanlah konsep formal tentang jabatan tertentu karena penjaga bangsa bukan sekadar nomenklatur birokrasi atau kategori administratif melainkan manusia atau kelompok sosial yang karena kualitas, posisi, pengalaman, dan tanggung jawab moralnya memiliki kemampuan untuk menjaga arah bangsa ketika struktur formal negara mengalami distorsi. Tidak semua manusia memiliki fungsi historis yang sama dalam sebuah bangsa dan tidak semua kelompok sosial memiliki kapasitas yang identik dalam menjaga peradaban. Dalam setiap bangsa, selalu ada unsur-unsur tertentu yang jika tetap sehat maka bangsa memiliki peluang untuk bertahan, tetapi jika unsur-unsur penjaga itu ikut runtuh maka kerusakan bangsa menjadi jauh lebih sulit dipulihkan.

Dalam pembacaan buku ini, terdapat empat kelompok yang secara strategis memiliki posisi sangat penting dalam menjaga bangsa yaitu kaum intelektual, kaum spiritual, kaum budaya, dan unsur patriotik yang dalam konteks Indonesia salah satunya dapat direpresentasikan oleh pengalaman TNI dan Polri,

khususnya para purnawirawan yang telah melewati fase keterikatan struktural formal.



Mengapa empat kelompok ini yang menjadi penjaga bangsa? Karena jika kita kembali pada pembahasan sebelumnya tentang empat unsur yang

menjadi target pelumpuhan bangsa yaitu akal, hati, jiwa budaya, dan daya tegak pertahanan, maka penjagaan terhadap bangsa juga harus menyentuh keempat titik fundamental tersebut. Bangsa tidak hanya runtuh ketika ekonomi bangsa bermasalah tetapi juga runtuh ketika akal bangsa rusak. Bangsa tidak hanya lemah ketika militer bangsa lemah tetapi juga lemah ketika hati nurani bangsa mati. Bangsa tidak hanya hancur ketika wilayah bangsa direbut tetapi juga hancur ketika budaya bangsa kehilangan arah. Karena itu penjagaan bangsa harus dipahami secara lebih luas daripada sekadar pertahanan fisik. Kelompok pertama penjaga bangsa adalah kaum intelektual.

Dalam pengertian ideal, kaum intelektual bukan sekadar orang yang berpendidikan tinggi atau memiliki gelar akademik. Pendidikan formal penting bagi kaum intelektual, tetapi intelektualitas jauh lebih dalam daripada sekadar kredensial administratif. Kaum intelektual adalah mereka yang memiliki kemampuan berpikir struktural, membaca persoalan secara mendalam, membedakan gejala dari akar masalah, serta menyusun gagasan yang dapat menjadi arah bagi masyarakat.

Setiap bangsa membutuhkan kaum intelektual yang sehat karena masyarakat tidak selalu memiliki waktu, ruang, atau kapasitas untuk membaca seluruh kompleksitas persoalan kebangsaan secara utuh. Kehidupan sehari-hari masyarakat menuntut banyak energi. Karena itu, salah satu fungsi kaum intelektual adalah membantu masyarakat memahami dunia yang lebih kompleks daripada yang tampak di permukaan.

Namun sejarah juga menunjukkan bahwa kaum intelektual dapat mengalami distorsi fungsi. Ketika intelektualitas berubah menjadi sekadar alat legitimasi kekuasaan, kaum intelektual kehilangan fungsi moralnya. Ketika ilmu hanya dipakai untuk membenarkan sistem yang salah, kecerdasan kaum intelektual berubah menjadi instrumen kolonisasi modern. Ketika akademisi kehilangan keberanian moral, universitas bisa tetap hidup secara administratif tetapi mati secara peradaban. Karena itu bangsa membutuhkan kaum intelektual yang tidak hanya cerdas tetapi juga merdeka secara batin yaitu kaum intelektual harus mampu berpikir tanpa diperbudak oleh kepentingan jangka pendek, mampu mengkritik tanpa kehilangan tanggung jawab, dan mampu menawarkan jalan keluar bukan sekadar menghasilkan kebisingan analitis.

Kelompok kedua penjaga bangsa adalah kaum spiritual. Bangsa tidak hidup hanya dengan logika teknokratis karena manusia bukan mesin kekuasaan yang hanya bergerak berdasarkan kalkulasi rasional. Dalam setiap masyarakat, dimensi spiritual memainkan peran yang sangat besar dalam membentuk moralitas, daya tahan batin, orientasi hidup, bahkan legitimasi sosial. Karena itu kaum spiritual memiliki posisi strategis yang sangat penting dalam menjaga bangsa. Yang dimaksud dengan kaum spiritual di sini bukan semata figur agama formal melainkan manusia-manusia yang memiliki kapasitas menjaga kesehatan hati nurani kolektif bangsa. Kaum spiritual adalah para penjaga nilai, penjaga makna, dan penjaga etika

transenden yang mengingatkan manusia bahwa kehidupan bersama tidak boleh hanya diatur oleh kepentingan material atau logika kekuasaan. Tanpa dimensi spiritual yang sehat, bangsa mudah menjadi sangat canggih secara teknologi tetapi kehilangan jiwanya.

Namun justru karena pengaruh kaum spiritual sangat besar, kaum spiritual juga sangat rentan menjadi target manipulasi. Jika dimensi spiritual dibelokkan menjadi alat legitimasi kepasifan, maka kekuatan yang seharusnya membangunkan justru berubah menjadi obat penenang sosial. Jika agama dipersempit menjadi ritual tanpa tanggung jawab moral, maka masyarakat dapat menjadi religius secara simbolik tetapi kehilangan daya koreksi terhadap ketidakadilan. Karena itu, kaum spiritual yang dibutuhkan bangsa bukan sekadar pengelola simbol keagamaan, melainkan penjaga kejernihan ruhani yang mampu menghubungkan iman dengan tanggung jawab sosial.

Kelompok ketiga penjaga bangsa adalah kaum budaya. Sering kali bangsa terlalu fokus pada kekuasaan formal dan melupakan bahwa kebudayaan justru merupakan wilayah pembentukan karakter yang paling mendalam. Pemerintah bisa berganti dalam hitungan tahun. Kebijakan bisa berubah dalam satu periode pemerintahan. Tetapi budaya bekerja jauh lebih pelan, jauh lebih halus, dan jauh lebih dalam. Budaya membentuk selera masyarakat, membentuk sensitivitas moral masyarakat, dan membentuk cara manusia memandang kehormatan, tanggung jawab, kebersamaan, serta makna hidup. Karena itu kaum

budaya memegang posisi strategis sebagai penjaga jiwa peradaban suatu bangsa. Yang dimaksud dengan kaum budaya bukan hanya seniman dalam pengertian sempit tetapi semua unsur yang menjaga identitas, etika sosial, daya imajinasi kolektif, dan kualitas rasa sebuah bangsa.

Bangsa yang kehilangan penjaga budayanya akan mudah mengalami kolonisasi mental. Bangsa tersebut mungkin tetap merdeka secara administratif, tetapi batin bangsa itu mengadopsi seluruh orientasi luar tanpa kemampuan seleksi kritis. Bangsa itu kehilangan percaya diri peradabannya. Bangsa itu mulai malu pada dirinya sendiri. Bangsa itu memuja hal-hal luar secara refleks sambil meremehkan akar budayanya sendiri. Karena itu, kaum budaya bukan unsur dekoratif dalam kehidupan bangsa. Kaum budaya adalah penjaga kedalaman identitas bangsa.

Kelompok keempat penjaga bangsa adalah unsur patriotik yang dalam konteks Indonesia memiliki hubungan erat dengan tradisi pertahanan nasional, termasuk TNI/Polri, khususnya para purnawirawan.

Pembahasan tentang unsur patriotik ini tentu perlu kehati-hatian, karena TNI dan Polri adalah institusi formal negara yang memiliki posisi konstitusional tertentu. Namun dalam konteks yang lebih luas, yang sedang dibicarakan di sini adalah kualitas patriotik yaitu disiplin, keberanian, ketegasan, orientasi pengabdian, dan kesiapan menjaga keberlangsungan bangsa.

Mengapa purnawirawan memiliki tempat khusus dalam pembahasan unsur patriotik ini? Karena para purnawirawan berada pada posisi yang unik. Para

purnawirawan pernah hidup di dalam struktur disiplin kenegaraan, memahami logika pertahanan, memahami dinamika kekuasaan, tetapi sebagian dari mereka telah berada di luar keterikatan operasional formal. Dengan pengalaman itu, para purnawirawan berpotensi menjadi penjaga perspektif strategis jika tetap berorientasi pada kepentingan bangsa.

Tentu tidak semua purnawirawan otomatis memainkan fungsi kepatriotikan ini. Sebagaimana semua kelompok lain, kualitas individu purnawirawan tetap menentukan. Namun secara sosiologis, pengalaman institusional para purnawirawan memberi modal tertentu yang dapat berharga bagi kehidupan bangsa.

Bangsa membutuhkan unsur patriotik karena tidak semua ancaman terhadap bangsa datang dalam bentuk argumentasi akademik atau dinamika budaya. Ada kalanya bangsa membutuhkan ketegasan, keberanian, disiplin, dan kemampuan berpikir strategis dalam menghadapi ancaman yang lebih keras.

Namun sebagaimana unsur penjaga lainnya, kekuatan patriotik tanpa orientasi moral yang sehat juga dapat mengalami distorsi. Karena itu unsur patriotik harus berada dalam keseimbangan dengan tiga unsur penjaga lainnya. Di titik inilah keempat kaum penjaga bangsa harus dipahami bukan sebagai kelompok yang saling bersaing melainkan sebagai ekosistem penjaga peradaban yaitu kaum intelektual menjaga kejernihan akal bangsa, kaum spiritual menjaga kesehatan hati nurani bangsa, kaum budaya menjaga identitas dan rasa

kebangsaan, dan kaum patriotik menjaga daya tegak serta ketahanan bangsa.

Jika salah satu dari keempat kelompok penjaga ini melemah, keseimbangan bangsa terganggu. Jika dua atau tiga dari kelompok penjaga ini runtuh sekaligus, bangsa memasuki fase yang sangat berbahaya. Jika keempatnya sehat dan mampu bekerja dalam kesadaran kebangsaan yang matang, maka peluang pemulihan bangsa jauh lebih besar. Pada akhirnya bangsa tidak dijaga hanya oleh struktur formal negara karena bangsa dijaga oleh manusia-manusia yang tetap setia pada fungsi peradabannya ketika banyak hal lain mulai kehilangan arah. Dan sejarah menunjukkan bahwa ketika keempat unsur penjaga bangsa ini masih hidup, sebuah bangsa yang tampak lemah pun masih memiliki harapan untuk bangkit kembali.

SHIKSHAYATI RAJANITIVIDAM

BAB 21
Teknologi Menjaga Amanah

Setelah membahas tentang pentingnya manusia-manusia penjaga bangsa, kaum intelektual, spiritual, budaya, serta unsur patriotik yang menjaga daya tegak kebangsaan, maka muncul satu pertanyaan yang sangat penting dalam konteks peradaban modern yaitu apakah kualitas manusia saja cukup untuk menjaga amanah bangsa?

Pertanyaan tentang kecukupan kualitas manusia ini harus dijawab dengan sangat jujur, sebab sejarah manusia justru menunjukkan bahwa banyak sistem yang pada awalnya dibangun oleh orang-orang dengan niat baik perlahan mengalami distorsi, bukan semata-mata karena seluruh manusia dalam sistem tersebut berubah menjadi jahat, tetapi karena struktur yang menopang sistem tidak cukup kuat untuk menjaga amanah dalam jangka panjang.

Dalam kehidupan nyata, manusia adalah makhluk yang mulia sekaligus rentan. Manusia dapat datang dengan idealisme yang tulus, tetapi kemudian manusia berhadapan dengan kenyamanan kekuasaan. Manusia dapat memulai perjalanan dengan semangat pengabdian, tetapi perlahan manusia digerogoti oleh kepentingan pribadi, tekanan lingkungan, loyalitas kelompok, atau sekadar kelelahan psikologis akibat panjangnya perjalanan.



Karena itulah bangsa yang serius membangun peradaban tidak boleh menggantungkan seluruh masa depannya hanya pada asumsi bahwa manusia akan

selalu kuat secara moral. Integritas tetap menjadi fondasi utama bagi sebuah bangsa, tetapi integritas harus ditopang oleh sistem yang mampu menjaga, mengingatkan, membatasi, dan mengoreksi manusia ketika kelemahan manusiawi manusia mulai muncul. Dalam konteks inilah teknologi memperoleh maknanya yang sangat strategis.

Selama ini, dalam banyak pembicaraan tentang perjuangan bangsa, teknologi sering diposisikan hanya sebagai alat bantu administratif atau instrumen teknis yang sifatnya sekunder. Padahal dalam realitas peradaban modern, teknologi informasi telah menjadi bagian dari arsitektur utama dalam pengelolaan kehidupan manusia. Ekonomi bergerak melalui sistem digital. Komunikasi bergantung pada jaringan informasi. Keamanan nasional semakin berkaitan dengan penguasaan data. Bahkan legitimasi kekuasaan dan pembentukan opini publik hari ini sangat dipengaruhi oleh desain teknologi yang mengelola informasi.

Jika demikian keadaannya, maka menjadi tidak masuk akal apabila perjuangan membangun bangsa yang lebih sehat tetap menggunakan pola pengelolaan lama yang tertutup, bergantung pada memori manusia, atau terlalu mengandalkan kepercayaan personal tanpa dukungan sistem yang memadai. Jika bangsa ingin membangun model baru yang lebih sehat, maka teknologi harus diposisikan bukan sekadar sebagai alat bantu operasional, tetapi sebagai bagian dari desain penjagaan amanah itu sendiri.

Dalam konteks inilah gagasan tentang sistem teknologi informasi Sekolah Negarawan menjadi penting. Jika Sekolah Negarawan berbicara tentang lahirnya model kepemimpinan baru, tentang penjagaan amanah kebangsaan, tentang penguatan kedaulatan rakyat, dan tentang koreksi terhadap desain negara yang dianggap bermasalah, maka seluruh gagasan Sekolah Negarawan itu harus diterjemahkan ke dalam sistem yang tidak mudah dibajak oleh kelemahan manusia. Sebab salah satu ironi terbesar dalam sejarah perubahan adalah banyak gerakan yang lahir dengan idealisme tinggi, tetapi perlahan mengalami kerusakan internal karena gerakan-gerakan tersebut tidak memiliki mekanisme penjagaan yang memadai.

Teknologi, dalam konteks penjagaan amanah ini, harus dipahami sebagai instrumen akuntabilitas. Salah satu masalah klasik dalam hampir semua struktur kekuasaan adalah ketimpangan informasi. Mereka yang berada di dalam sistem mengetahui lebih banyak daripada mereka yang berada di luar sistem. Keputusan dibuat dalam ruang yang tidak mudah dijangkau oleh publik. Proses berjalan di balik dinding institusional. Dan rakyat, yang dalam teori disebut sebagai pemilik kedaulatan, sering kali hanya menerima hasil akhir tanpa benar-benar memahami bagaimana proses itu berlangsung.

Ketika informasi menjadi terlalu terkonsentrasi di tangan segelintir orang, kekuasaan cenderung mengalami distorsi. Bukan semata-mata karena semua aktor di dalam sistem berniat buruk, tetapi karena sistem yang tertutup secara alami menciptakan peluang

bagi penyimpangan. Dalam kondisi ketertutupan sistem seperti itu, rakyat kesulitan melakukan pengawasan bukan karena rakyat tidak peduli, tetapi karena rakyat tidak memiliki akses terhadap instrumen yang memungkinkan rakyat memahami apa yang sedang terjadi di dalam sistem.



Di sinilah teknologi modern menawarkan kemungkinan yang sangat penting. Sistem digital yang dirancang dengan benar memungkinkan aktivitas terekam secara sistematis, keputusan dapat ditelusuri, perubahan dapat didokumentasikan, distribusi amanah dapat dimonitor, dan pola penyimpangan dapat lebih mudah dikenali. Teknologi tidak membuat manusia menjadi sempurna, tetapi teknologi dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih sehat bagi penjagaan amanah.

Hal pertama yang menjadi fondasi dari sistem teknologi penjagaan amanah semacam ini adalah transparansi. Namun transparansi di sini tidak boleh dipahami secara dangkal sebagai sekadar membuka informasi sebanyak-banyaknya tanpa struktur. Transparansi yang sehat adalah keterbukaan yang dirancang secara cerdas sehingga pemilik amanah dapat memahami bagaimana proses berjalan, bagaimana keputusan dibuat, siapa yang memegang tanggung jawab tertentu, dan bagaimana penggunaan sumber daya dapat diverifikasi.

Dalam kehidupan berbangsa, salah satu penyebab utama tumbuhnya ketidakpercayaan publik adalah kaburnya proses pengambilan keputusan. Rakyat melihat hasil kebijakan, tetapi tidak memahami perjalanan menuju hasil itu. Rakyat mengetahui keputusan, tetapi tidak memiliki cukup informasi untuk membaca konteks keputusan tersebut. Dalam situasi kaburnya proses seperti itu, ruang spekulasi tumbuh di masyarakat. Ketidakpercayaan berkembang. Dan dalam jangka panjang, legitimasi sistem mengalami erosi.

Jika Sekolah Negarawan ingin menawarkan model tata kelola baru, maka Sekolah Negarawan harus belajar dari kelemahan sistem lama tersebut yaitu transparansi tidak boleh hanya menjadi jargon moral tetapi transparansi harus diterjemahkan menjadi desain operasional yang nyata dalam sistem teknologi. Di samping transparansi, unsur yang tidak kalah penting dalam sistem penjagaan amanah adalah rekam jejak.



Salah satu kelemahan besar dalam banyak institusi adalah hilangnya memori kelembagaan yaitu banyak keputusan diambil tanpa dokumentasi yang

memadai, banyak janji dibuat tanpa struktur yang memungkinkan publik menilai apakah janji itu ditepati, dan banyak tanggung jawab diberikan tanpa jejak yang jelas mengenai pelaksanaannya. Akibatnya ketika evaluasi diperlukan, sistem bergantung pada ingatan manusia, hubungan personal, atau narasi yang mudah dimanipulasi. Padahal bangsa yang sehat membutuhkan budaya pertanggungjawaban yang berbasis jejak objektif, bukan sekadar kesan subjektif dari segelintir orang.

Dalam konteks kebutuhan rekam jejak inilah sistem digital memiliki nilai strategis yang sangat besar. Sistem digital memungkinkan terbentuknya catatan kelembagaan yang lebih stabil, lebih dapat diverifikasi, dan lebih tahan terhadap manipulasi personal. Setiap amanah dapat dikaitkan dengan tanggung jawab yang jelas. Setiap proses dapat memiliki dokumentasi yang dapat ditelusuri. Setiap perubahan dalam sistem dapat meninggalkan jejak digital.

Bukan karena manusia harus dicurigai sejak awal, tetapi karena amanah publik memang memerlukan standar akuntabilitas yang lebih tinggi daripada hubungan sosial biasa. Lebih jauh lagi, sistem teknologi penjagaan amanah seperti ini membuka ruang bagi audit publik.

Dalam banyak model konvensional, audit sering dipahami sebagai aktivitas teknis internal yang dilakukan secara terbatas oleh pihak tertentu. Model audit konvensional seperti itu tetap memiliki nilai, tetapi dalam konteks perjuangan kebangsaan yang berbasis kedaulatan rakyat, pendekatan audit yang

lebih terbuka menjadi relevan. Jika rakyat benar-benar adalah pemilik amanah, maka harus ada mekanisme yang memungkinkan rakyat, secara proporsional dan bertanggung jawab, mengetahui apakah sistem berjalan sesuai prinsip yang dijanjikan.

Tentu audit publik tidak berarti semua orang bebas mencampuri seluruh aspek operasional tanpa struktur. Pemahaman audit publik yang kacau seperti itu justru dapat menciptakan kekacauan dalam sistem. Yang dimaksud dengan audit publik di sini adalah desain evaluasi yang memungkinkan adanya pengujian terhadap integritas sistem oleh komunitas pemilik amanah melalui mekanisme yang sehat, terukur, dan berbasis data.

Dalam dunia modern, teknologi memberi peluang yang jauh lebih besar untuk mewujudkan audit publik daripada era sebelumnya. Dengan desain teknologi yang matang, pengawasan tidak lagi bergantung sepenuhnya pada keberanian whistleblower individual atau investigasi manual yang lambat. Sistem teknologi dapat dirancang untuk secara inheren mempermudah keterlacakan setiap proses dan keputusan.

Pada akhirnya, seluruh pembahasan tentang teknologi penjagaan amanah ini bermuara pada satu hal yaitu pengawasan rakyat. Jika buku ini sejak awal berbicara tentang kedaulatan rakyat, maka kedaulatan rakyat itu tidak boleh berhenti sebagai slogan retoris yang hanya dihidupkan saat pemilu atau forum-forum formal karena kedaulatan rakyat harus diterjemahkan ke dalam kemampuan nyata rakyat untuk mengetahui,

mengawasi, dan mengevaluasi pengelolaan amanah yang dilakukan atas nama rakyat.

Masalah terbesar dalam banyak sistem modern adalah rakyat diminta memberikan legitimasi kepada sistem, tetapi rakyat tidak diberi alat yang cukup untuk melakukan pengawasan yang bermakna terhadap sistem. Rakyat memilih wakilnya, tetapi setelah proses pemilihan selesai, ruang partisipasi rakyat menyempit. Rakyat diberi simbol keterlibatan dalam kekuasaan, tetapi rakyat tidak selalu diberi akses terhadap substansi pengelolaan kekuasaan.

Sekolah Negarawan, jika ingin sungguh-sungguh menghadirkan model tata kelola baru, harus berani memutus pola ketimpangan tersebut. Teknologi harus digunakan bukan untuk mengendalikan rakyat, bukan untuk membangun oligarki digital baru, dan bukan untuk menciptakan ilusi partisipasi, tetapi untuk benar-benar memperkuat posisi rakyat sebagai pemilik amanah.

Di titik inilah teknologi tidak lagi sekadar soal perangkat lunak, server, dashboard, atau infrastruktur digital. Teknologi menjadi bagian dari filsafat tata kelola bangsa. Teknologi menjadi instrumen untuk memastikan bahwa idealisme tidak hanya hidup di dalam kata-kata, tetapi juga tertanam dalam sistem yang mampu menjaga manusia dari kelemahan dirinya sendiri.

Sebab sejarah telah mengajarkan satu pelajaran yang sangat penting, yaitu niat baik tanpa sistem yang sehat sering kali tidak cukup lama bertahan. Tetapi ketika integritas manusia dipadukan dengan desain

sistem yang transparan, terdokumentasi, dapat diaudit, dan terbuka terhadap pengawasan rakyat, maka peluang menjaga amanah menjadi jauh lebih besar.

SEKOLAH NEGARAWAN
SHIKSHAYATI RAJANITIVIDAM

BAB 22
Suluk Negarawan



Jika sepanjang perjalanan buku ini kita telah membahas tentang bagaimana sebuah bangsa dapat dikepung tanpa invasi fisik, bagaimana rakyat dapat dilumpuhkan melalui serangan multidimensi, bagaimana hanya sedikit manusia yang mungkin mampu bertahan dari tekanan zaman, bagaimana perjuangan menuntut pengorbanan, bahkan bagaimana sebuah bangsa membutuhkan koreksi terhadap desain ketatanegaraannya, maka pada titik ini kita sampai pada satu pertanyaan yang jauh lebih mendasar daripada seluruh pertanyaan sebelumnya, yaitu siapakah manusia yang akan menjalankan semua gagasan besar itu?

Pertanyaan tentang siapakah manusia pelaksana gagasan besar ini tampak sederhana, tetapi sesungguhnya sangat menentukan. Sebab sejarah terlalu sering menunjukkan bahwa persoalan bangsa tidak selalu gagal karena kekurangan gagasan. Banyak bangsa memiliki pemikir cerdas. Banyak gerakan memiliki manifesto yang kuat. Banyak organisasi memiliki desain yang baik. Banyak perubahan dimulai dengan semangat yang sangat tulus. Namun tidak sedikit di antaranya yang perlahan kehilangan arah, melemah, atau bahkan berubah menjadi sesuatu yang justru bertolak belakang dengan niat awalnya. Penyebab kegagalan perubahan sering kali bukan karena konsep perubahannya salah, melainkan karena manusia yang menjalankannya tidak cukup siap memikul konsekuensi dari gagasan yang mereka usung. Di sinilah persoalan perjuangan bangsa bertemu dengan persoalan pembentukan manusia.

Modernitas telah mengajarkan manusia untuk sangat percaya pada instrumen-instrumen rasional. Kita percaya pada desain kelembagaan, pada sistem pengawasan, pada teknologi informasi, pada pendidikan formal, pada indikator kinerja, pada perangkat hukum, pada arsitektur organisasi, dan pada berbagai instrumen yang memang penting dalam tata kelola kehidupan bersama.

Namun ada satu pelajaran besar yang juga terus diulang oleh sejarah, yaitu bahwa seluruh instrumen tata kelola itu pada akhirnya tetap dijalankan oleh manusia yang membawa kualitas batin tertentu. Sebuah sistem yang baik dapat rusak ketika sistem tersebut

dipegang oleh manusia yang rapuh jiwanya. Sebuah desain tata negara yang sehat dapat dibajak oleh ego pemegangnya. Sebuah organisasi yang lahir dengan idealisme dapat perlahan berubah menjadi kendaraan ambisi pribadi jika manusia di dalamnya tidak mengalami pembentukan batin yang cukup mendalam.

Karena itu, perjuangan kebangsaan yang sungguh-sungguh tidak cukup hanya berbicara tentang membangun sistem di luar diri manusia. Perjuangan kebangsaan juga harus berbicara tentang membangun manusia dari dalam dirinya sendiri.

Dalam konteks inilah Sekolah Negarawan memandang bahwa pendidikan kebangsaan tidak boleh berhenti pada pembentukan intelektual, kaderisasi kepemimpinan, atau penguatan kapasitas teknokratis. Semua unsur pendidikan itu penting, tetapi semua itu belum cukup. Ada wilayah lain yang jauh lebih sunyi, jauh lebih sulit, dan sering kali jauh lebih menentukan daripada seluruh arena sosial yang tampak di permukaan, yaitu wilayah batin manusia itu sendiri.

Sebab sebelum seorang manusia berhadapan dengan sistem yang korup, manusia tersebut terlebih dahulu berhadapan dengan dirinya sendiri. Sebelum seseorang diuji oleh kekuasaan, orang itu lebih dahulu diuji oleh egonya. Sebelum seorang pejuang menghadapi tekanan eksternal, pejuang itu lebih dahulu menghadapi pergulatan internal yang tidak terlihat oleh siapa pun. Tidak semua manusia kalah karena ancaman dari luar karena sebagian manusia justru kalah karena kelemahan yang tumbuh diam-diam dari dalam dirinya sendiri.

Ada manusia yang cerdas tetapi dikuasai kesombongan intelektual. Ada manusia yang berani tetapi diam-diam haus akan pengakuan. Ada manusia yang tampak idealis tetapi sesungguhnya belum bebas dari ambisi personal. Ada manusia yang berbicara tentang perubahan tetapi belum selesai dengan kebutuhan untuk dipuji. Ada manusia yang tampak kuat secara sosial tetapi rapuh batinnya ketika menghadapi kesepian. Ada manusia yang berbicara tentang amanah tetapi belum pernah sungguh-sungguh memeriksa niatnya sendiri.

Karena itulah Sekolah Negarawan memandang bahwa perjuangan bangsa tidak dapat dilepaskan dari pembentukan spiritual. Bukan spiritualitas dalam pengertian seremonial yang dangkal, bukan pula spiritualitas yang menjauhkan manusia dari realitas sosial, melainkan spiritualitas yang justru menyiapkan manusia agar mampu menghadapi realitas dengan kejernihan, kerendahan hati, dan kekuatan batin yang lebih matang.

Dalam tradisi Islam, salah satu konsep yang paling relevan untuk menjelaskan proses pembentukan spiritual ini adalah suluk. Suluk, dalam makna terdalamnya, bukan sekadar ritual ibadah tambahan, bukan aktivitas simbolik yang bersifat ornamental, dan bukan pula bentuk pelarian dari dunia nyata. Suluk adalah perjalanan seorang manusia untuk menata dirinya di hadapan Allah.

Suluk adalah proses pembentukan batin, pemurnian orientasi hidup, penertiban ego, dan pendisiplinan jiwa agar manusia tidak hidup hanya

mengikuti impuls-impuls nafsu yang tidak terkendali. Dalam tradisi tasawuf, suluk dipahami sebagai jalan menuju kedekatan spiritual dengan Sang Pencipta. Namun jika dibaca dalam konteks kebangsaan yang lebih luas, suluk juga dapat dipahami sebagai proses pembentukan kualitas manusia yang sangat relevan bagi kepemimpinan dan perjuangan sosial.

Sebab manusia yang ingin memikul amanah besar tanpa terlebih dahulu menata dirinya sendiri sesungguhnya sedang membawa risiko yang sangat besar bagi amanah itu.

Sejarah menunjukkan bahwa banyak perubahan sosial yang gagal bukan karena musuh perubahan terlalu kuat, tetapi karena manusia-manusia di dalam gerakan perubahan itu tidak cukup matang secara batin untuk menghadapi ujian kekuasaan, godaan pengaruh, tekanan sosial, atau kompleksitas psikologis dari perjuangan jangka panjang. Sebagian pejuang memulai dengan niat baik tetapi perlahan berubah karena godaan. Sebagian pejuang memulai dengan idealisme tetapi kemudian berkompromi dengan kepentingan. Sebagian pejuang datang dengan bahasa pengabdian tetapi diam-diam membangun kultus terhadap dirinya sendiri.

Fenomena kemunduran moral pejuang seperti ini tidak bisa diselesaikan hanya dengan pendidikan intelektual karena fenomena ini membutuhkan pembentukan spiritual. Dalam konteks itulah Suluk Negarawan lahir sebagai konsep. Suluk Negarawan bukan sekadar agenda keagamaan yang ditempelkan pada gerakan kebangsaan agar gerakan tersebut tampak

religius karena Suluk Negarawan adalah bagian dari metodologi pembentukan manusia penjaga bangsa.



Jika Sekolah Negarawan ingin melahirkan manusia-manusia yang mampu menjaga bangsa, maka manusia-manusia itu harus dibentuk tidak hanya

melalui ilmu, strategi, dan sistem tetapi juga melalui perjalanan batin yang serius. Karena seorang manusia yang memahami teori negara tetapi tidak memahami dirinya sendiri tetap berbahaya bagi bangsa. Seorang manusia yang memahami hukum tetapi belum menaklukkan egonya tetap rawan menyalahgunakan kekuasaan. Seorang manusia yang cerdas membaca persoalan bangsa tetapi belum jujur kepada dirinya sendiri tetap dapat menjadi bagian dari persoalan, bukan solusi. Suluk Negarawan lahir dari kesadaran bahwa perjuangan kebangsaan bukan hanya proyek intelektual tetapi juga proyek penyucian manusia.

Dalam praktiknya, Suluk Negarawan bertumpu pada kesadaran bahwa manusia memiliki keterbatasan yang tidak dapat diatasi hanya melalui perhitungan rasional. Modernitas sering membuat manusia merasa bahwa selama strategi perjuangan cukup matang, sistem cukup baik, dan organisasi cukup kuat, maka hasil perjuangan dapat dikendalikan sepenuhnya. Namun sejarah justru menunjukkan betapa sering realitas bergerak di luar kalkulasi manusia. Ada momentum dalam sejarah yang tidak dapat dipercepat oleh manusia. Ada jalan perubahan yang tidak dapat dibuka hanya dengan kecerdasan manusia. Ada pertolongan Ilahi yang tidak dapat dipaksa oleh desain teknokratis manusia. Di sinilah salah satu praktik spiritual yang menjadi bagian dari Suluk Negarawan memperoleh maknanya, yaitu doa tahlukah.

Doa Tahlukah, dalam konteks Suluk Negarawan, bukan sekadar ritual yang dijalankan tanpa kesadaran, melainkan bentuk latihan kerendahan hati spiritual.

Tahlukah adalah pengakuan bahwa manusia wajib berikhtiar secara maksimal, tetapi manusia tidak boleh terjebak dalam kesombongan yang merasa bahwa seluruh hasil perjuangan adalah produk kecerdasannya sendiri. Dalam perjuangan kebangsaan, latihan kerendahan hati seperti ini sangat penting karena manusia yang terlalu percaya pada dirinya sendiri sangat mudah runtuh ketika hasil perjuangan tidak berjalan sesuai rencana. Sebaliknya, manusia yang memahami batas dirinya justru memiliki daya tahan psikologis yang lebih sehat.

Kesadaran spiritual semacam ini juga tercermin dalam praktik doa. Dalam kehidupan modern, doa sering direduksi menjadi urusan privat yang terpisah dari kehidupan sosial. Padahal dalam tradisi Islam, doa adalah tindakan yang sangat mendasar dalam membentuk orientasi manusia. Doa bukan sekadar permintaan kepada Tuhan. Doa adalah pengakuan tentang posisi manusia di hadapan Tuhannya. Doa mengingatkan manusia bahwa dirinya bukan pusat sejarah, bukan pengendali mutlak realitas, dan bukan pemilik kepastian atas hasil perjuangannya.

Bagi seorang pejuang bangsa, kesadaran dari doa ini sangat penting. Sebab perjuangan yang terlalu bertumpu pada ego personal mudah berubah menjadi kelelahan batin. Ketika seluruh hasil perjuangan diikat pada ekspektasi manusia, kegagalan kecil saja dapat melahirkan frustrasi besar pada pejuang. Ketika perubahan tidak datang sesuai jadwal yang diinginkan oleh pejuang, harapan pejuang mulai goyah. Ketika

dukungan sosial tidak sebesar yang dibayangkan oleh pejuang, semangat pejuang mulai menurun.

Doa akan menata ulang orientasi batin pejuang itu, karena doa membuat pejuang tetap bekerja keras tetapi tidak diperbudak oleh ilusi kontrol total, doa membuat pejuang tetap berikhtiar tetapi tidak kehilangan ketenangan ketika hasil perjuangan belum tampak, dan doa membuat perjuangan menjadi bentuk penghambaan kepada Allah bukan sekadar ekspresi ambisi pribadi. Lebih dalam daripada doa, Suluk Negarawan juga menempatkan munajat sebagai bagian penting dari perjalanan spiritual ini. Jika doa dapat berlangsung dalam berbagai bentuk komunikasi spiritual, maka munajat adalah ruang yang lebih intim, lebih personal, dan lebih telanjang secara batin.

Dalam munajat, manusia tidak sedang berbicara kepada publik, tidak sedang membangun citra di hadapan orang lain, tidak sedang mengatur narasi untuk konsumsi publik, dan tidak sedang menunjukkan kekuatan lahiriah karena manusia sedang berhadapan dengan Allah dan dirinya sendiri. Dan justru di titik munajat itulah kejujuran yang paling mendalam menjadi mungkin bagi manusia.

Karena ada pertanyaan-pertanyaan eksistensial yang tidak dapat dijawab dalam ruang sosial, tetapi pertanyaan-pertanyaan itu harus dijawab dalam keheningan spiritual munajat. Beberapa pertanyaan yang harus dijawab yaitu apakah perjuangan ini benar-benar karena Allah, apakah kegelisahan terhadap bangsa lahir dari cinta kepada bangsa atau dari ego pribadi, apakah pengorbanan ini bentuk pengabdian

atau bentuk kebutuhan untuk merasa penting, apakah aku siap tetap berjalan meskipun perjuanganku tidak dikenal orang, dan apakah aku tetap akan berjuang jika sejarah tidak mencatat namaku. Pertanyaan-pertanyaan eksistensial seperti ini bukan retorika spiritual belaka karena pertanyaan-pertanyaan ini adalah ujian psikologis yang sangat nyata bagi setiap pejuang.

Banyak manusia mampu berbicara tentang pengabdian tetapi jauh lebih sedikit yang benar-benar siap melepaskan keterikatan batinnya terhadap pengakuan orang lain. Banyak manusia ingin perubahan sosial terjadi tetapi tidak semuanya siap menjalani jalan perjuangan yang tidak populer. Munajat adalah ruang untuk menghadapi kenyataan batin itu dengan jujur.

Dalam konteks yang lebih luas, seluruh praktik spiritual dalam Suluk Negarawan ini merupakan bagian dari ikhtiar spiritual. Kata ikhtiar sangat penting karena Suluk Negarawan tidak dibangun di atas semangat fatalistik, bukan pelarian dari kerja nyata, dan bukan bentuk spiritualitas pasif yang menjadikan doa sebagai pengganti strategi perjuangan.

Justru sebaliknya, Suluk Negarawan dibangun di atas keyakinan bahwa kerja lahiriah dan kerja batin harus berjalan bersama. Seorang pejuang tetap harus belajar, tetap harus berpikir, tetap harus membangun sistem perjuangan, tetap harus mengorganisasi gerakan, tetap harus mendidik masyarakat, dan tetap harus membangun teknologi, struktur, serta tata kelola yang sehat.



Namun semua kerja lahiriah itu harus dilakukan oleh manusia yang terus menjaga kebersihan orientasi

batinnya karena sistem tata kelola yang baik pun dapat dibajak oleh manusia yang batinnya keruh.

Dan di sinilah seluruh perjalanan Suluk Negarawan ini bermuara pada penyucian niat. Ini mungkin bagian paling sulit dari seluruh proses pembentukan manusia penjaga bangsa karena jauh lebih mudah mengoreksi kesalahan sistem daripada mengoreksi niat sendiri, jauh lebih mudah mengkritik perilaku elite daripada menghadapi ego pribadi, dan jauh lebih mudah berbicara tentang amanah di depan umum daripada benar-benar menjaga kebersihan motivasi dalam kesunyian. Namun justru karena sulit itulah penyucian niat menjadi pusat dari Suluk Negarawan.

Niat bukan sesuatu yang statis dalam diri manusia karena niat berubah, niat bergerak, niat dapat jernih hari ini dan keruh esok hari. Ego manusia sangat halus karena kadang ego tidak datang dalam bentuk ambisi kasar tetapi dalam bentuk yang lebih elegan yaitu kebutuhan untuk dianggap penting oleh orang lain, keinginan untuk merasa paling benar, dorongan untuk mengendalikan arah perjuangan sendiri, atau keterikatan terhadap citra moral tertentu di mata publik. Karena itu penyucian niat bukan pekerjaan satu kali melainkan disiplin spiritual seumur hidup.

Pada akhirnya, Suluk Negarawan adalah pengakuan bahwa perjuangan kebangsaan tidak cukup dibangun oleh manusia-manusia yang cerdas secara intelektual tetapi rapuh secara spiritual karena bangsa membutuhkan manusia yang kuat berpikir, sehat secara moral, matang secara psikologis, dan jujur di hadapan

Allah. Sebab negara tidak akan menjadi sehat hanya karena desain konstitusinya diperbaiki, bangsa tidak akan pulih hanya karena teknologi yang dimiliki bangsa sudah canggih, dan kedaulatan rakyat tidak akan otomatis hidup hanya karena mekanisme pemerintahan diperbarui karena semua desain dan teknologi itu tetap membutuhkan manusia yang mampu memikul amanah dengan kualitas jiwa tertentu.

Dan mungkin di situlah makna terdalam dari Suluk Negarawan yaitu bahwa sebelum seorang manusia berbicara tentang menyelamatkan bangsa, manusia tersebut terlebih dahulu harus bersedia menempuh perjalanan sunyi untuk menyelamatkan dirinya sendiri dari penyakit-penyakit batin yang dapat menghancurkan perjuangan dari dalam.

BAGIAN VII – INDONESIA BARU

BAB 23
Dari Bangsa Lumpuh Menjadi Bangsa Berdaulat



Setelah perjalanan panjang yang telah ditempuh dalam buku ini, mulai dari pembacaan tentang penjajahan modern yang bekerja secara halus, tentang berbagai bentuk perang multidimensi yang melumpuhkan bangsa, tentang manusia-manusia yang tersisa di tengah gempuran zaman, tentang jalan sunyi perjuangan, pengorbanan, pembentukan spiritual, hingga kebutuhan untuk melakukan koreksi terhadap desain ketatanegaraan, kita akhirnya sampai pada satu pertanyaan yang menjadi inti dari seluruh pembahasan ini yaitu mungkinkah sebuah bangsa yang telah lama

mengalami pelumpuhan benar-benar bangkit kembali menjadi bangsa yang berdaulat?

Pertanyaan tentang kemungkinan kebangkitan bangsa lumpuh ini penting, karena terlalu banyak bangsa dalam sejarah yang mampu mengenali persoalannya tetapi gagal menemukan jalur pemulihannya. Kesadaran bangsa terhadap masalah tidak selalu identik dengan kemampuan bangsa untuk bangkit. Bahkan tidak sedikit masyarakat yang sangat mahir mengkritik keadaannya sendiri tetapi kehilangan imajinasi tentang masa depan yang dapat dibangun. Kritik akhirnya berubah menjadi rutinitas harian.

Kekecewaan menjadi budaya kolektif. Skeptisisme menjadi identitas sosial. Dan bangsa perlahan terbiasa hidup dalam keadaan yang tidak sehat tanpa lagi sungguh-sungguh percaya bahwa perubahan besar mungkin terjadi. Karena itu, sebelum berbicara tentang kebangkitan bangsa, kita harus terlebih dahulu memahami makna kelumpuhan bangsa secara lebih jujur.

Bangsa yang lumpuh bukan berarti bangsa yang mati. Justru karena bangsa lumpuh masih hidup, kelumpuhan menjadi kondisi yang jauh lebih kompleks. Bangsa lumpuh masih memiliki tubuh kenegaraan, tetapi tubuh itu tidak bekerja sebagaimana mestinya. Bangsa lumpuh masih memiliki organ-organ penting kenegaraan, tetapi koordinasi antar organnya terganggu. Bangsa lumpuh masih memiliki kesadaran tertentu, tetapi kesadaran itu tidak cukup kuat untuk menggerakkan tindakan yang terarah.

Dalam pengertian inilah kelumpuhan bangsa menjadi metafora yang sangat tepat. Indonesia bukan bangsa yang tidak memiliki potensi. Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah, jumlah penduduk yang besar, warisan budaya yang kaya, sejarah perjuangan yang kuat, dan posisi geostrategi yang strategis. Namun potensi besar tidak otomatis menghasilkan kedaulatan jika unsur-unsur penggerak bangsa mengalami gangguan.

Kelumpuhan bangsa terjadi ketika akal bangsa kehilangan kejernihan, ketika moralitas publik bangsa melemah, ketika budaya bangsa kehilangan orientasi, dan ketika daya pertahanan bangsa tidak lagi memiliki ketegasan yang cukup untuk menjaga martabat bersama. Dalam kondisi kelumpuhan seperti itu, bangsa tetap tampak hidup dari luar, tetapi bangsa kehilangan energi strategis untuk bergerak menuju arah yang sehat. Bangsa lumpuh bereaksi terhadap peristiwa, tetapi tidak cukup kuat membentuk sejarahnya sendiri. Bangsa lumpuh sibuk mengelola gejala, tetapi tidak cukup jernih mengobati akar persoalan.

Karena itu, kebangkitan nasional yang sungguh-sungguh tidak dapat dipahami sebagai perubahan kosmetik. Kebangkitan nasional tidak cukup diukur dari pergantian figur pemerintah, dari perbaikan statistik jangka pendek, atau dari euforia yang sifatnya sesaat. Bangsa yang benar-benar ingin bangkit membutuhkan proses pemulihan yang jauh lebih mendalam. Bangsa yang ingin bangkit membutuhkan sesuatu yang dalam bahasa sederhana dapat disebut sebagai penyembuhan nasional.

Istilah penyembuhan penting karena istilah ini menggeser cara pandang kita terhadap perubahan. Jika persoalan bangsa adalah penyakit, maka pendekatan penyembuhan tidak cukup dengan dekorasi permukaan. Jika persoalan bangsa adalah kelumpuhan, maka yang dibutuhkan bukan sekadar perubahan posisi tubuh bangsa, tetapi pemulihan fungsi-fungsi vital bangsa. Dalam konteks inilah kebangkitan bangsa harus dibangun secara sistemik.

Banyak bangsa gagal dalam kebangkitannya karena terlalu fokus pada satu sektor sambil mengabaikan sektor lain. Ada bangsa yang sangat menekankan pembangunan ekonomi tetapi mengabaikan pembentukan karakter bangsanya. Ada bangsa yang fokus pada pendidikan teknis tetapi membiarkan budaya publik mengalami degradasi moral. Ada bangsa yang memperkuat aparatur formal negaranya tetapi kehilangan legitimasi moral di mata rakyatnya. Ada pula bangsa yang sangat aktif tetapi rapuh secara spiritual.

Bangsa tidak bangkit melalui satu dimensi saja karena bangsa bangkit melalui pemulihan yang menyeluruh di semua dimensi. Karena itulah jika kita berbicara tentang roadmap kebangkitan nasional, yang dibicarakan bukan sekadar program pemerintahan lima tahunan atau dokumen teknokratis melainkan peta transformasi peradaban. Roadmap semacam ini harus menjawab pertanyaan mendasar yaitu bagaimana bangsa ini memulihkan kemampuan berpikirnya, memulihkan kualitas moralnya, memulihkan orientasi budayanya, dan memulihkan daya pertahanannya.



Dimensi pertama kebangkitan bangsa adalah penyembuhan akal bangsa. Salah satu tragedi terbesar bangsa modern adalah ketika pendidikan formal tumbuh tetapi kejernihan berpikir publik justru tidak ikut bertumbuh. Kita hidup di zaman dengan akses informasi yang jauh lebih besar daripada generasi-generasi sebelumnya, tetapi limpahan informasi tidak otomatis melahirkan kebijaksanaan kolektif karena bahkan dalam banyak kasus justru sebaliknya yaitu manusia dibanjiri informasi tetapi kehilangan kemampuan menyaring, menafsirkan, dan memahami realitas secara mendalam.

Dalam konteks kebangsaan, kondisi ini sangat berbahaya karena bangsa yang kehilangan kejernihan akal akan mudah digerakkan oleh propaganda, mudah dipecah oleh manipulasi narasi, mudah terseret emosi kolektif yang tidak sehat, dan mudah tertipu oleh solusi-solusi instan yang tampak menarik tetapi rapuh secara substansi. Pendidikan yang hanya menghasilkan

operator teknis tanpa kedalaman berpikir strategis tidak cukup untuk membangun bangsa yang berdaulat karena bangsa membutuhkan manusia-manusia yang mampu berpikir struktural, memahami hubungan sebab-akibat dalam skala besar, membaca dinamika global, dan menghubungkan persoalan lokal dengan arsitektur kekuasaan yang lebih luas.

Karena itu penyembuhan akal bangsa berarti reformasi pendidikan dalam makna yang jauh lebih mendalam daripada sekadar perubahan kurikulum administratif yaitu penyembuhan akal bangsa berarti membangun budaya berpikir yang merdeka, keberanian intelektual untuk menguji asumsi-asumsi yang mapan, kemampuan membedakan pengetahuan dari propaganda, serta keberanian untuk menumbuhkan manusia yang tidak hanya patuh secara teknis tetapi juga matang secara reflektif. Bangsa yang akalnya sehat tidak mudah dimobilisasi hanya oleh slogan kosong, menuntut substansi dalam setiap wacana publik, tidak anti terhadap emosi kolektif tetapi tidak diperbudak olehnya, dan mampu berdialog dengan dunia modern tanpa kehilangan kemampuan berpikir mandiri.

Namun akal yang sehat saja tidak cukup untuk kebangkitan bangsa karena sejarah penuh dengan contoh manusia-manusia cerdas yang justru menjadi arsitek kerusakan besar karena kecerdasan mereka tidak dituntun oleh moralitas. Karena itu dimensi kedua dari kebangkitan nasional adalah penyembuhan moral bangsa.

Moralitas publik bukan sekadar persoalan etika individual karena moralitas publik adalah kualitas batin kolektif yang menentukan bagaimana sebuah masyarakat memahami amanah, kejujuran, tanggung jawab, keadilan, dan batas-batas kepantasan dalam kehidupan bersama. Ketika moralitas publik melemah, persoalan bangsa tidak lagi sekadar terletak pada kesalahan teknis tetapi pada erosi kepercayaan sosial yang mendasar.

Tidak ada bangsa yang dapat benar-benar kuat jika kepercayaan publiknya runtuh yaitu jika rakyat tidak percaya pada institusi negara, jika institusi negara tidak percaya pada rakyat, jika elite kekuasaan saling mencurigai tanpa dasar, jika hukum dipandang sebagai instrumen kekuasaan bukan sebagai alat keadilan, dan jika amanah publik dianggap sekadar peluang untuk keuntungan pribadi. Dalam situasi erosi kepercayaan seperti ini, bahkan sistem tata kelola terbaik sekalipun akan mengalami tekanan berat untuk berjalan tidak sesuai fungsinya.

Karena itu penyembuhan moral bangsa tidak bisa dibangun hanya melalui kampanye slogan etika karena penyembuhan moral bangsa membutuhkan pembentukan karakter yang serius sejak pendidikan dasar, keteladanan dari para pemimpin bangsa, budaya akuntabilitas yang kuat, dan revitalisasi orientasi spiritual yang sehat. Bangsa harus kembali membangun penghormatan terhadap amanah, rasa malu terhadap pengkhianatan moral, dan pemahaman bahwa kekuasaan bukan hak milik personal tetapi tanggung jawab publik. Namun moralitas pun tidak berdiri dalam

ruang kosong karena moralitas hidup di dalam kebudayaan. Karena itu dimensi ketiga kebangkitan bangsa adalah penyembuhan budaya bangsa.

Budaya sering direduksi menjadi persoalan seni, simbol, atau warisan tradisional padahal makna budaya jauh lebih luas yaitu budaya adalah sistem makna yang membentuk cara manusia memandang hidup. Budaya menentukan apa yang dianggap terhormat, apa yang dianggap memalukan, apa yang dinormalisasi dalam kehidupan sosial, dan apa yang dianggap penting oleh masyarakat.

Jika budaya publik menormalisasi hedonisme, maka pengorbanan untuk kepentingan bersama menjadi sesuatu yang asing bagi masyarakat. Jika budaya publik menormalisasi sinisme, maka idealisme kebangsaan dipandang naif dan ketinggalan zaman. Jika budaya publik menormalisasi imitasi tanpa daya kritis, maka identitas bangsa perlahan terkikis oleh arus global. Jika budaya publik menormalisasi kebisingan tanpa kedalaman, maka ruang refleksi kolektif menjadi semakin sempit.

Karena itu penyembuhan budaya bangsa berarti membangun kembali kualitas rasa kolektif masyarakat yaitu bangsa harus kembali menemukan kehormatan dalam kesederhanaan, martabat dalam pengabdian, kebanggaan dalam identitas yang sehat, dan kedewasaan dalam menghadapi arus global tanpa kehilangan akar budaya sendiri. Ini bukan berarti menolak modernitas dan bukan pula berarti romantisasi masa lalu secara membabi buta karena yang dibutuhkan oleh bangsa adalah budaya yang cukup percaya diri

untuk berdialog dengan dunia tanpa kehilangan pusat gravitasi budayanya sendiri. Bangsa yang budayanya sehat tidak menjadi xenofobik atau anti asing tetapi juga tidak kehilangan kemampuan seleksi kritis terhadap pengaruh luar karena bangsa yang budayanya sehat mampu mengambil yang bermanfaat dari luar tanpa membiarkan dirinya dijajah secara mental. Dan akhirnya dimensi keempat kebangkitan bangsa adalah penyembuhan jiwa pertahanan bangsa.

Pertahanan dalam pengertian ini tidak boleh dipahami secara sempit hanya sebagai urusan militer formal. Jiwa pertahanan jauh lebih luas dari sekadar kekuatan senjata. Jiwa pertahanan adalah kesadaran kolektif bahwa bangsa memiliki sesuatu yang layak dijaga, bahwa kedaulatan bangsa bukan slogan kosong, dan bahwa kehidupan bersama sebagai bangsa membutuhkan keberanian untuk mempertahankan martabat kolektif.

Bangsa yang kehilangan jiwa pertahanan akan mudah menyerah secara psikologis sebelum konflik nyata bahkan dimulai karena bangsa tersebut akan cenderung menghindari ketegasan demi kenyamanan jangka pendek, akan membiarkan penetrasi asing berlangsung tanpa refleksi kritis, dan akan kehilangan keberanian moral untuk mengatakan tidak ketika sesuatu yang asing mengancam kepentingan jangka panjang bangsanya. Karena itu penyembuhan jiwa pertahanan berarti membangun kembali patriotisme yang matang yaitu bukan patriotisme dangkal yang hidup dalam slogan kosong tanpa isi dan bukan pula chauvinisme emosional yang anti-dialog dengan dunia

luar. Yang dibutuhkan bangsa adalah patriotisme rasional yang memahami nilai bangsa, menghormati pengorbanan sejarah para pendahulu, dan memiliki ketegasan menjaga kepentingan kolektif tanpa kehilangan kedewasaan dalam bertindak. Dalam konteks inilah unsur pendidikan kebangsaan, pengalaman patriotik, disiplin sosial, dan keteladanan kepemimpinan menjadi sangat penting bagi pemulihan jiwa pertahanan bangsa.

Jika keempat dimensi ini dipulihkan yaitu akal, moral, budaya, dan jiwa pertahanan, maka bangsa mulai bergerak dari kondisi lumpuh menuju kondisi pulih. Namun pemulihan saja belum sama dengan kedaulatan karena kedaulatan adalah tahap berikutnya yang lebih tinggi.



Kedaulatan bukan hanya kemampuan bangsa untuk bertahan, tetapi kemampuan bangsa untuk

menentukan arah masa depannya sendiri. Kedaulatan berarti bangsa tidak sekadar bereaksi terhadap tekanan luar, tetapi mampu merancang masa depannya sendiri secara proaktif.

Kedaulatan berarti rakyat tidak hanya menjadi objek kebijakan negara, tetapi menjadi pemilik nyata kehidupan bernegara. Kedaulatan berarti institusi-institusi negara bekerja untuk kepentingan bangsa, bukan kepentingan segelintir orang.

Di titik inilah roadmap kebangkitan nasional menemukan makna strategisnya yaitu bahwa kebangkitan nasional bukan ledakan emosional sesaat yang cepat padam melainkan proses disiplin jangka panjang karena kebangkitan nasional membutuhkan generasi yang dibentuk secara sadar, sistem yang dikoreksi secara berkelanjutan, budaya yang dipulihkan secara sungguh-sungguh, dan spiritualitas yang dijaga agar tetap jernih. Bangsa yang lumpuh tidak bangkit dalam semalam.

Tetapi bangsa yang memiliki kejernihan untuk mengenali penyakitnya, keberanian untuk mengobati dirinya, dan kesabaran untuk membangun ulang fondasinya tetap memiliki peluang besar untuk kembali menjadi bangsa yang berdaulat. Dan mungkin seluruh perjalanan panjang buku ini sesungguhnya sedang mengarah ke titik itu yaitu bukan sekadar mengeluhkan luka bangsa tetapi membayangkan dengan serius bagaimana sebuah bangsa yang terluka dapat benar-benar pulih, berdiri tegak, dan kembali menentukan nasibnya sendiri.

SEKOLAH
NEGARAWAN
X
SHIKSHAYATI RAJANITIVIDAM

BAB 24
Gemah Ripah Loh Jinawi



Setelah menempuh perjalanan panjang dalam buku ini mulai dari pembacaan tentang bagaimana bangsa dapat dilumpuhkan secara perlahan, tentang berbagai bentuk penjajahan modern yang bekerja tanpa harus menancapkan bendera asing di tanah air, tentang krisis struktur ketatanegaraan, tentang manusia-manusia penjaga bangsa, tentang pengorbanan, hingga tentang disiplin spiritual yang diperlukan untuk melahirkan negarawan, maka tibalah kita pada pertanyaan yang paling penting dari seluruh proses ini yaitu bangsa seperti apa yang sebenarnya ingin dibangun.

Pertanyaan tentang bentuk bangsa yang ingin dibangun ini tidak boleh dianggap sederhana, karena terlalu banyak perjuangan dalam sejarah yang sangat mahir mengidentifikasi musuh tetapi gagal mendefinisikan masa depan.

Tidak sedikit gerakan yang sangat piawai membongkar kerusakan tetapi tidak cukup matang merumuskan seperti apa kehidupan yang ingin diwujudkan setelah kerusakan itu diperbaiki. Akibatnya, energi perjuangan habis untuk melawan sesuatu, tetapi energi tersebut tidak cukup kuat untuk membangun sesuatu. Kritik menjadi sangat kaya dalam gerakan, tetapi imajinasi menjadi miskin. Perlawanan menjadi keras, tetapi arah peradaban tetap kabur.

Karena itu, bangsa yang ingin bangkit tidak cukup hanya memiliki kesadaran tentang apa yang salah dalam bangsanya. Bangsa yang ingin bangkit harus memiliki kejernihan tentang apa yang benar.

Bangsa yang ingin bangkit tidak cukup hanya memahami apa yang ingin ditinggalkan. Bangsa yang ingin bangkit harus memahami apa yang ingin dituju.

Dalam konteks Indonesia, pertanyaan tentang bentuk bangsa yang ingin dibangun itu sesungguhnya bukan sesuatu yang sepenuhnya baru. Jauh sebelum republik modern ini berdiri, bahkan jauh sebelum istilah pembangunan, demokrasi, tata kelola pemerintahan, atau indikator ekonomi modern menjadi bahasa resmi negara, masyarakat Nusantara telah mengenal satu gambaran ideal tentang kehidupan bersama yang baik. Dalam tradisi Jawa, salah satu ungkapan yang sangat dikenal adalah gemah ripah loh jinawi.

Ungkapan gemah ripah loh jinawi sering diterjemahkan secara sederhana sebagai keadaan negeri yang subur, makmur, tenteram, dan penuh kecukupan. Namun jika dibaca lebih dalam, makna gemah ripah loh jinawi jauh lebih kaya daripada sekadar kelimpahan material.

Gemah ripah loh jinawi mengandung imajinasi tentang sebuah kehidupan bersama yang sehat, seimbang, harmonis, dan bermartabat. Gemah ripah loh jinawi bukan sekadar gambaran tentang sawah yang hijau atau hasil bumi yang melimpah, melainkan visi peradaban tentang masyarakat yang hidup dalam keseimbangan antara manusia, alam, moralitas, spiritualitas, dan tata kehidupan sosial yang tertib.

Inilah yang membuat konsep gemah ripah loh jinawi ini menarik yaitu bahwa konsep ini menunjukkan sejak lama bangsa ini sebenarnya

memiliki imajinasi peradaban tentang kehidupan yang baik.



Masalahnya dalam perjalanan sejarah modern, imajinasi peradaban itu sering terfragmentasi karena

pembangunan terlalu sering direduksi menjadi pertumbuhan ekonomi semata, kemajuan terlalu sering diukur dengan infrastruktur fisik, dan keberhasilan terlalu sering dibaca dari angka statistik yang tidak selalu mencerminkan kualitas hidup yang sesungguhnya. Padahal bangsa yang besar tidak dibangun hanya dengan logika pertumbuhan ekonomi karena bangsa yang besar dibangun dengan visi peradaban yang utuh.

Karena itu ketika kita berbicara tentang Indonesia Baru, yang sedang dibicarakan bukan sekadar perubahan pemerintahan, bukan sekadar reformasi kelembagaan, bukan sekadar pembaruan regulasi, dan bukan sekadar modernisasi administratif karena yang sedang dibicarakan adalah visi tentang kehidupan nasional yang lebih utuh yaitu sebuah Indonesia yang bukan hanya bertahan hidup tetapi benar-benar hidup dengan martabat. Dalam kerangka itulah gagasan gemah ripah loh jinawi memperoleh makna strategis sebagai simbol visi Indonesia yang adil, makmur, sehat, spiritual, berbudaya, dan berdaulat.

Dimensi pertama dari visi Indonesia Baru adalah keadilan. Tidak ada bangsa yang dapat benar-benar besar jika fondasi keadilannya rapuh sebab keadilan bukan sekadar instrumen hukum melainkan fondasi moral dari kehidupan bersama. Keadilan menentukan apakah rakyat merasa menjadi bagian dari negara atau justru merasa menjadi objek dari kekuasaan. Keadilan menentukan apakah institusi negara dipandang sebagai penjaga kepentingan bersama atau sekadar alat kelompok tertentu. Keadilan menentukan apakah

hukum menjadi sumber kepercayaan publik atau sumber ketakutan publik.

Keadilan dalam konteks bangsa modern tentu jauh lebih kompleks daripada sekadar pembagian hukuman dan penghargaan. Keadilan menyangkut akses terhadap kesempatan hidup yang layak, perlakuan yang setara di hadapan hukum, perlindungan terhadap yang lemah, distribusi tanggung jawab sosial yang proporsional, dan kehadiran negara yang tidak diskriminatif.

Namun lebih dalam daripada aspek-aspek prosedural, keadilan adalah pengalaman psikologis kolektif. Sebuah masyarakat mungkin secara formal memiliki banyak peraturan hukum, tetapi jika rakyat merasakan bahwa sistem hukum bekerja tidak seimbang, bahwa hukum lebih mudah menyentuh yang lemah daripada yang kuat, bahwa akses ekonomi terlalu terkonsentrasi di segelintir orang, atau bahwa peluang hidup terlalu dipengaruhi oleh kedekatan dengan pusat kekuasaan, maka rasa keadilan dalam masyarakat perlahan terkikis.

Bangsa yang kehilangan rasa keadilan tidak selalu langsung meledak dalam konflik karena kadang bangsa yang kehilangan rasa keadilan justru memasuki fase yang lebih berbahaya yaitu fase sinisme. Ketika rakyat tidak lagi percaya bahwa sistem dapat berlaku adil, maka moralitas publik ikut tergerus sehingga kepatuhan terhadap hukum berubah menjadi keterpaksaan belaka, loyalitas terhadap negara berubah menjadi hubungan transaksional, dan dalam jangka panjang kohesi nasional melemah. Karena itu Indonesia

Baru harus dibangun di atas fondasi keadilan yang substantif, bukan keadilan yang sekadar prosedural yaitu keadilan yang tidak berhenti pada teks hukum tetapi keadilan yang hidup dalam pengalaman nyata rakyat.

Dimensi kedua dari visi Indonesia Baru adalah kemakmuran. Namun kemakmuran yang dimaksud di sini tidak boleh dibaca secara sempit sebagai akumulasi angka pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi penting, tetapi pertumbuhan ekonomi tidak identik dengan kemakmuran rakyat. Sebuah negara dapat menunjukkan indikator ekonomi yang impresif sambil menyimpan ketimpangan sosial yang sangat besar. Sebuah kota dapat tampak modern secara visual sambil menyisakan kehidupan yang rapuh bagi sebagian besar warganya. Kemakmuran sejati harus dipahami sebagai kualitas kehidupan yang memungkinkan manusia hidup dengan kecukupan, martabat, dan harapan yang sehat.

Dalam konteks Indonesia, kemakmuran berarti bahwa kekayaan bangsa tidak menjadi paradoks. Bahwa negeri yang kaya sumber daya alam tidak menghasilkan rakyat yang terus hidup dalam kecemasan ekonomi struktural. Bahwa pembangunan tidak hanya terkonsentrasi pada wilayah tertentu. Bahwa produktivitas nasional tidak sekadar memperkaya sedikit pihak sambil meninggalkan mayoritas rakyat.

Kemakmuran juga harus dibangun di atas produktivitas nyata bangsa, bukan ketergantungan yang melemahkan, karena bangsa yang sehat bukan

bangsa yang hidup dari ilusi konsumsi melainkan bangsa yang memiliki kemampuan mencipta, memproduksi, mengelola, dan mendistribusikan kekayaannya dengan sehat. Namun kemakmuran material saja tidak cukup untuk membangun Indonesia Baru.

Karena itu dimensi ketiga visi Indonesia Baru adalah kesehatan. Kesehatan dalam visi Indonesia Baru tidak hanya berarti layanan medis yang tersedia, rumah sakit yang memadai, atau program kesehatan publik yang berjalan karena semua unsur teknis itu penting tetapi kesehatan sebagai visi peradaban jauh lebih luas dari sekadar infrastruktur medis yaitu kesehatan mencakup kesehatan fisik, kesehatan mental, kesehatan sosial, dan bahkan kesehatan ekologis.

Bangsa yang sehat adalah bangsa yang tidak menjadikan masyarakatnya terus-menerus hidup dalam tekanan struktural yang merusak kualitas hidup karena bangsa yang sehat memahami bahwa manusia bukan sekadar unit ekonomi tetapi makhluk yang membutuhkan kualitas hidup yang layak secara holistik. Kesehatan publik dalam visi Indonesia Baru berarti akses yang adil terhadap pelayanan kesehatan. Kesehatan mental berarti masyarakat tidak hidup dalam tekanan psikologis yang menghancurkan daya tahan kolektif. Kesehatan sosial berarti relasi antar manusia tidak sepenuhnya dirusak oleh kompetisi brutal dan atomisasi individualistik. Kesehatan ekologis berarti pembangunan tidak menghancurkan fondasi kehidupan jangka panjang bagi generasi mendatang. Dalam visi gemah ripah loh jinawi, kesehatan bukan

pelengkap pembangunan karena kesehatan adalah inti dari kualitas hidup bangsa.

Dimensi keempat dari visi Indonesia Baru adalah spiritualitas. Spiritualitas adalah salah satu unsur yang sangat sering diabaikan oleh model pembangunan modern yang terlalu materialistik padahal bangsa tidak hanya hidup dari ekonomi dan institusi formal karena bangsa hidup dari makna, bangsa hidup dari moralitas, dan bangsa hidup dari orientasi batin kolektif.

Bangsa yang kehilangan spiritualitas sehat sangat rentan mengalami kekosongan moral. Bangsa tersebut mungkin maju secara teknis, tetapi kehilangan jiwa kemanusiaannya. Bangsa tersebut mungkin efisien secara administratif, tetapi rapuh secara etis. Bangsa tersebut mungkin kaya secara material, tetapi miskin secara makna hidup.

Spiritualitas yang dimaksud di sini tentu bukan simbolisme religius yang dangkal melainkan kualitas batin yang membentuk tanggung jawab moral, kesadaran transenden, dan kemampuan manusia menempatkan dirinya secara proporsional di hadapan kehidupan. Bangsa yang spiritual bukan bangsa yang anti-modern dan bukan pula bangsa yang mencampuradukkan seluruh urusan teknis dengan simbolisme keagamaan karena yang dimaksud dengan bangsa spiritual adalah bangsa yang memahami bahwa manusia membutuhkan fondasi moral yang lebih dalam daripada sekadar insentif material yaitu bahwa amanah publik harus hidup dalam kesadaran bangsa bukan hanya karena takut sanksi hukum tetapi juga karena kesadaran batin akan tanggung jawab kepada Tuhan,

bahwa pengabdian publik bukan sekadar karier tetapi tanggung jawab moral dan spiritual, dan bahwa pembangunan tidak boleh memutus manusia dari makna hidup dan hubungannya dengan Yang Transenden.

Dimensi kelima dari visi Indonesia Baru adalah kebudayaan. Bangsa yang besar tidak hanya dibangun dengan kekuatan ekonomi dan sosial tetapi dengan kualitas peradabannya karena budaya adalah ruang tempat identitas, etika, rasa, imajinasi kolektif, dan orientasi hidup suatu bangsa dibentuk. Indonesia Baru tidak boleh menjadi proyek modernisasi yang kehilangan akar budayanya, tetapi Indonesia Baru juga tidak boleh menjadi nostalgia statis yang menolak perubahan zaman, karena yang dibutuhkan adalah budaya yang hidup yaitu budaya yang cukup percaya diri untuk berdialog dengan dunia tanpa inferior. Budaya yang tidak merasa rendah di hadapan modernitas, budaya yang mampu menyaring pengaruh global tanpa kehilangan identitas dirinya, dan budaya yang menjaga martabat sosial, adab publik, serta kualitas rasa kebangsaan. Bangsa yang berbudaya bukan bangsa yang sekadar melestarikan simbol-simbol budaya tetapi bangsa yang menjaga kedalaman jiwanya melalui nilai-nilai budaya yang hidup.

Dan akhirnya seluruh dimensi visi Indonesia Baru ini bermuara pada kedaulatan. Sebab keadilan tanpa kedaulatan mudah diganggu oleh kekuatan asing. Kemakmuran tanpa kedaulatan mudah dieksploitasi oleh kepentingan global. Kesehatan tanpa kedaulatan mudah dipengaruhi kepentingan eksternal yang tidak

sejalan dengan kepentingan rakyat. Budaya tanpa kedaulatan mudah dikolonisasi oleh budaya asing yang dominan. Spiritualitas tanpa kedaulatan mudah dimanipulasi oleh kekuatan luar.

Kedaulatan adalah kemampuan bangsa menentukan nasibnya sendiri secara bermartabat yaitu bukan kedaulatan dalam arti isolasi dari dunia, dan bukan kedaulatan dalam arti anti-dunia dan anti-pergaulan internasional, tetapi kedaulatan dalam arti memiliki kapasitas untuk mengambil keputusan strategis berdasarkan kepentingan jangka panjang bangsa sendiri, bukan sekadar menurut tekanan luar.

Indonesia Baru yang berdaulat adalah Indonesia yang mampu berdialog dengan dunia tanpa kehilangan dirinya sendiri, mampu bekerja sama dengan bangsa lain tanpa menjadi subordinat, mampu modern tanpa menjadi imitasi budak mode global, dan mampu kuat secara ekonomi dan sosial tanpa kehilangan kemanusiaan dan spiritualitasnya.

Pada akhirnya gemah ripah loh jinawi bukan sekadar nostalgia budaya dari masa lalu melainkan metafora tentang Indonesia yang utuh secara peradaban, yaitu sebuah Indonesia yang tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi tetapi membangun peradaban yang bermartabat, sebuah Indonesia yang tidak hanya ingin tampak maju di mata dunia tetapi sungguh-sungguh sehat secara struktural dan batin. Dan jika seluruh perjalanan panjang buku ini adalah upaya membongkar berbagai bentuk kelumpuhan bangsa, maka bab ini adalah upaya untuk mengingatkan bahwa tujuan akhir dari perjuangan

bukan sekadar melawan kerusakan melainkan menghadirkan kehidupan bersama yang layak diperjuangkan oleh seluruh anak bangsa.

EPILOG
Mentari Terbit Pagi Ini

Setelah perjalanan panjang yang ditempuh dalam buku ini, kita akhirnya sampai pada ujung sebuah perenungan yang sesungguhnya bukan akhir melainkan awal dari sebuah kemungkinan baru. Sebab buku ini tidak pernah dimaksudkan sekadar sebagai kumpulan kritik terhadap keadaan bangsa dan bukan pula sebagai pelampiasan kegelisahan terhadap kerusakan yang tampak di sekeliling kita. Jika seluruh halaman sebelumnya dipenuhi pembacaan tentang penjajahan modern, pelumpuhan bangsa, perang multidimensi, kerusakan struktur negara, kebutuhan akan manusia-manusia penjaga, jalan sunyi perjuangan, pengorbanan, hingga disiplin spiritual dalam Suluk Negarawan, maka semua itu sesungguhnya sedang mengantar kita pada satu kesimpulan sederhana namun mendalam yaitu bahwa bangsa ini belum selesai karena Indonesia belum selesai.

Kalimat itu penting, karena terlalu banyak orang yang diam-diam mulai kehilangan keyakinan terhadap masa depan negeri ini. Sebagian orang melihat kerusakan dan memilih menjadi sinis. Sebagian orang melihat kekacauan dan memilih menjadi apatis. Sebagian orang menyaksikan kompleksitas persoalan dan sampai pada kesimpulan bahwa perubahan terlalu mahal, terlalu sulit, atau terlalu mustahil untuk diperjuangkan. Tidak sedikit pula orang yang perlahan terbiasa hidup dalam ketidakberesan, seolah-olah

kondisi yang sakit ini adalah bentuk normal dari kehidupan berbangsa.

Namun sejarah manusia selalu menunjukkan bahwa kelelahan kolektif sering kali bukan tanda bahwa sebuah bangsa telah mati melainkan tanda bahwa bangsa tersebut terlalu lama menanggung luka yang belum disembuhkan. Dan bangsa yang terluka tidak selalu membutuhkan pidato besar dari para pemimpinnya karena kadang bangsa yang terluka hanya membutuhkan manusia-manusia yang tetap percaya bahwa penyembuhan masih mungkin.

Buku ini lahir dari keyakinan itu yaitu bahwa Indonesia, betapapun kompleks persoalannya, bukan bangsa yang kehilangan seluruh harapannya, bahwa di balik kegaduhan di negeri ini masih ada hati nurani yang belum mati, bahwa di balik kerusakan institusi masih ada manusia-manusia yang jujur dan berintegritas, bahwa di balik kebisingan zaman masih ada jiwa-jiwa yang diam-diam menjaga api kesadaran kebangsaan, dan bahwa di tengah medan perang multidimensi yang begitu rumit tetap ada segelintir manusia yang menolak menyerah.

Mungkin mereka sedikit jumlahnya. Mungkin mereka tidak populer di zamannya. Mungkin mereka tidak selalu dipahami oleh lingkungan sekitarnya. Mungkin jalan yang mereka tempuh adalah jalan sunyi yang sepi pengikut. Tetapi sejarah justru sering digerakkan oleh manusia-manusia semacam itu sebab perubahan besar tidak selalu lahir dari mayoritas yang nyaman karena kadang perubahan besar lahir dari minoritas yang tetap setia pada kejernihan hati nurani.

Sepanjang buku ini kita telah berbicara tentang bangsa yang lumpuh. Tentang akal yang dikaburkan. Tentang moral yang dilemahkan. Tentang budaya yang dilunturkan. Tentang spiritualitas yang dibius. Tentang struktur negara yang dianggap mengalami distorsi. Tentang rakyat yang secara formal disebut berdaulat tetapi secara substantif sering merasa jauh dari pusat pengambilan arah bangsa.

Semua pembacaan tentang kelumpuhan itu penting. Tetapi jika kita berhenti hanya pada diagnosis, maka buku ini kehilangan maknanya. Sebab mengenali penyakit bukan tujuan akhir dari sebuah perjuangan. Mengenali penyakit hanyalah langkah pertama menuju penyembuhan.

Karena itu jika ada satu pesan utama yang ingin ditinggalkan oleh seluruh perjalanan panjang buku ini, maka pesan utama itu sederhana yaitu bahwa bangsa ini harus kembali berdiri yaitu bukan berdiri dalam kemarahan kosong yang tidak produktif, bukan berdiri dalam nostalgia masa lalu yang tidak kritis, dan bukan berdiri dalam romantisme kejahatan politik sesaat yang dangkal tetapi berdiri sebagai bangsa yang lebih matang, lebih jernih, lebih sehat, lebih berdaulat, dan lebih sadar terhadap tanggung jawab sejarahnya.

Perjalanan menuju titik kebangkitan itu tentu tidak mudah karena tidak ada bangsa yang pulih dari kelumpuhan dalam satu malam, tidak ada luka peradaban yang sembuh hanya dengan slogan-slogan pejabat, tidak ada kerusakan struktural yang selesai hanya dengan pergantian wajah-wajah elite, dan tidak

ada kebangkitan nasional yang sungguh-sungguh tanpa kerja keras lintas generasi.

Karena itu buku ini tidak menawarkan ilusi perubahan instan melainkan menawarkan jalan yaitu jalan yang mungkin panjang, jalan yang mungkin berat, dan jalan yang mungkin tidak selalu ramai oleh pendukung tetapi jalan yang jika ditempuh dengan kejernihan tetap memberi kemungkinan bagi lahirnya Indonesia yang baru.

Di titik inilah seluruh gagasan tentang Sekolah Negarawan memperoleh maknanya yang paling dalam. Sekolah Negarawan bukan sekadar institusi pendidikan. Bukan sekadar gerakan intelektual. Bukan sekadar forum pendidikan politik biasa. Sekolah Negarawan adalah simbol dari satu keyakinan bahwa bangsa membutuhkan manusia-manusia yang dibentuk secara utuh yaitu cerdas secara intelektual, matang secara moral, kuat secara spiritual, sehat secara budaya, dan teguh dalam menjaga amanah kebangsaan.

Sebab bangsa yang sehat tidak lahir hanya dari sistem tata negara yang benar tetapi juga dari manusia yang benar. Dan manusia yang benar tidak lahir secara kebetulan karena manusia yang benar harus dibentuk, dididik, diuji, ditempa, dibersihkan niatnya, dan dijaga orientasinya. Karena itu perjuangan kebangsaan bukan hanya kerja praktis melainkan kerja peradaban. Dan kerja peradaban selalu membutuhkan kesabaran yang panjang.

Mungkin kita tidak melihat seluruh hasil kerja peradaban itu hari ini. Mungkin generasi yang menanam benih perubahan tidak menjadi generasi yang

memanen hasilnya. Mungkin banyak jalan masih harus ditempuh oleh generasi mendatang. Tetapi sejarah tidak selalu meminta kita menyelesaikan seluruh pekerjaan sendirian karena kadang sejarah hanya meminta kita memulai dengan benar.

Pada akhirnya seluruh pembicaraan tentang negara, rakyat, kedaulatan, perjuangan, pengorbanan, dan spiritualitas bermuara pada satu kesadaran sederhana yaitu bahwa manusia hanyalah pejalan. Kita datang ke dunia ini dengan segala keterbatasan. Kita berjuang dengan segala kekurangan yang melekat pada diri kita. Kita merancang masa depan dengan segala keterbatasan akal manusia. Kita berharap dengan segala ketidakpastian yang menghadang. Dan di atas semua ikhtiar dan harapan itu tetap ada wilayah yang tidak pernah sepenuhnya berada dalam kendali manusia. Karena itu setelah seluruh ikhtiar intelektual, sosial, dan spiritual dilakukan dengan sungguh-sungguh, pada akhirnya seorang pejuang bangsa tetap harus sampai pada titik penyerahan yang tenang, yaitu bahwa tugas manusia adalah berikhtiar sebaik-baiknya dan bahwa hasil akhir dari seluruh ikhtiar itu tetap berada di tangan Allah.

Dan mungkin karena itulah penutup yang paling tepat bagi seluruh perjalanan buku ini bukanlah teriakan kemenangan yang gemuruh melainkan kerendahan hati seorang hamba yang memahami batas dirinya di hadapan Tuhan. Bahwa setelah segala pergulatan batin, segala kegelisahan intelektual, segala jalan sunyi yang ditempuh, segala doa yang dipanjatkan, segala pengorbanan yang diberikan, dan

segala usaha untuk membangunkan kesadaran bangsa, kita tetap memohon dengan kesadaran yang dalam yaitu padamlah api kegelisahan yang menghanguskan hati, redalah badai persoalan yang terus menerpa, tenanglah hati-hati yang terlalu lama gelisah memikirkan nasib bangsa, pulihlah luka-luka bangsa yang terlalu lama dibiarkan terbuka, lembutlah kembali hubungan antara rakyat dan negerinya yang sempat renggang, jernihlah akal bangsa yang selama ini dikaburkan oleh berbagai propaganda, sehatlah moral bangsa yang selama ini digerogoti oleh kepentingan sesaat, dan bangkitlah jiwa bangsa yang selama ini dilumpuhkan oleh rasa takut dan kelelahan. Bukan karena kita merasa cukup kuat untuk memulihkan semua luka itu sendirian tetapi karena kita percaya bahwa ada kemurahan yang melampaui segala keterbatasan manusia.

Dan jika seluruh malam panjang perjuangan ini telah cukup menjadi pelajaran berharga, maka semoga benar bahwa pagi itu sedang mendekat. Sebab tidak ada malam yang diciptakan oleh Tuhan untuk berlangsung selamanya, tidak ada badai kehidupan yang abadi, dan tidak ada luka bangsa yang mustahil dipulihkan jika masih ada manusia yang mau berikhtiar dan Tuhan yang Maha Mengasihi.

Karena itu biarlah epilog ini ditutup bukan dengan rasa putus asa melainkan dengan harapan yang tenang yaitu bahwa setelah jalan yang panjang ditempuh, setelah kesunyian yang dalam dialami, setelah luka yang berat ditanggung, suatu hari nanti bangsa ini akan benar-benar melihat cahaya yang

berbeda. Dan ketika hari kebangkitan itu tiba, kita mungkin akan menyadari bahwa seluruh perjalanan panjang perjuangan ini sesungguhnya sedang menuju satu momen sederhana yang telah lama dirindukan oleh setiap hati yang mencintai negeri ini yaitu bahwa mentari terbit pagi ini.

SEKOLAH NEGARAWAN X SHIKSHAYATI RAJANITIVIDAM

DAFTAR PUSTAKA

Alatas, S. H., & Keller, S. (1988/1995). Terkait diskursus klasifikasi kaum intelektual sebagai minoritas strategis dan elite moral yang efektif.

Alatas, V., Banerjee, A., Hanna, R., Olken, B. A., Purnamasari, R., & Wai-Poi, M. (2019). "Does Elite Capture Matter? Local Elites and Targeted Welfare Programs in Indonesia". AEA Papers and Proceedings, 109: 334–39.

Asshiddiqie, Jimly, dkk. (2005). Kajian BPHN tentang Hubungan Antar Lembaga Negara Pasca Amendemen UUD 1945. Badan Pembinaan Hukum Nasional.

Benda, Julien. (1927). La Trahison des Clercs (The Treason of the Intellectuals). Paris: Grasset.

Bezmenov, Yuri. (1984). Soviet Ideological Subversion of America in Four Stages. (Membahas tahapan pelumpuhan bangsa: Demoralization, Destabilization, Crisis, Normalization).

Couldry, Nick, & Mejias, Ulises A. (2019). The Costs of Connection: How Data Is Colonizing Human Life

and Appropriating It for Capitalism. Stanford University Press.

Freire, Paulo. (1970). Pedagogy of the Oppressed. Continuum International Publishing Group.

Hadiz, Vedi R., & Robison, Richard. (2004). Reorganising Power in Indonesia: The Politics of Oligarchy in an Age of Markets. Routledge.

Huda, Ni'matul. (2008). UUD 1945 dan Gagasan Amandemen Ulang. Jakarta: Rajawali Pers.

Martinez-Bravo, M., Mukherjee, P., & Stegmann, A. (2017). "The Non-Democratic Roots of Elite Capture: Evidence From Soeharto Mayors in Indonesia".

Mubyarto. (1987). Ekonomi Pancasila: Gagasan dan Kemungkinan. Jakarta: LP3ES.

Nadjib, Emha Ainun (Cak Nun). (2006). Terangkum dalam buku biografi Jalan Sunyi Emha (Karya Ian L. Betts) dan berbagai literatur esai mengenai pergerakan kebudayaan independen.

Naquib al-Attas, Syed Muhammad. Terkait analisis Loss of Adab sebagai akar permasalahan runtuhnya keadilan, etika, dan degradasi kepemimpinan.

Nasution, A.H. (1953). Menjabarkan konsep Doktrin Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata) dan Fundamentals of Guerrilla Warfare.

Nkrumah, Kwame. (1965). Neo-Colonialism, The Last Stage of Imperialism. International Publishers.

Open Government Partnership, Ada Lovelace Institute, & AI Now Institute. (2021). Algorithmic Accountability for the Public Sector.

Sekolah Negarawan & X Institute. Diskursus kebangsaan, Teori Fraktal Sosial, dan kajian Suluk Negarawan di berbagai forum kebijakan publik dan tata kelola alternatif.

Syukur, M. Amin. (2004). Tasawuf Sosial. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Telle, Kari. (2017). "Faith on Trial: Blasphemy and 'Lawfare' in Indonesia". Ethnos: Journal of Anthropology, 83(2), 371-391.

Toynbee, Arnold J. A Study of History. (Membahas teori Siklus Peradaban, Tantangan & Respons, serta peran Creative Minority).

Winters, Jeffrey A. (1996). Kajian dan studi mendalam mengenai persitensi kekuasaan Oligarchy dan elite kekayaan di Indonesia.

Zuboff, Shoshana. (2019). The Age of Surveillance Capitalism: The Fight for a Human Future at the New Frontier of Power. New York: PublicAffairs.

SEKOLAH NEGARAWAN SHIKSHAYATI RAJANITIVIDAM